

**ISU GENDER DALAM PENGELOLAAN
PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN
(Studi Kasus : Kelurahan Mojosongo, Surakarta)**

TESIS

Disusun dalam rangka memenuhi persyaratan Program
Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh :

Yanuelva Etliana
L4D003070



**PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**

**ISU GENDER DALAM PENGELOLAAN
PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN
(Studi Kasus: Kelurahan Mojosongo, Surakarta)**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh :
Yanuelva Etliana
L4D003070

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 7 Mei 2005

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, Juni 2005

Pembimbing Pendamping



Ir. Mardwi Rahdriawan, MT

Pembimbing Utama



Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, Msc

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka. Apabila dalam Tesis saya ternyata ditemui duplikasi, jiplakan (plagiat) dari Tesis orang lain / Institusi lain, maka saya bersedia menerima sanksi untuk dibatalkan kelulusan saya dan saya bersedia melepaskan gelar Magister Teknik dengan penuh rasa tanggung jawab.

Semarang, Juni 2005



YANUELVA ETLIANA

L4D003070

Abstraksi

Fenomena isu gender yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia dilatarbelakangi oleh struktur dan budaya masyarakat yang membuat pembedaan peran antara laki-laki dan perempuan, yang dalam hal ini perempuan menjadi termarginalkan. Persoalannya, pembedaan tersebut kemudian cenderung menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai korbannya. Beban laki-laki dalam ruang publik menjadi lebih besar sekaligus lebih berat, sementara potensi yang dimiliki perempuan tidak mampu berkembang karena perannya di ruang publik menjadi terbatas. Isu gender secara khusus juga berkembang dalam kegiatan pengelolaan prasarana lingkungan di Kelurahan Mojosoongo.

Kelurahan Mojosoongo merupakan salah satu kawasan uji coba penataan lingkungan kumuh di Kota Solo. Proyek tersebut dinyatakan berhasil, terbukti dengan beberapa penghargaan yang berhasil diraihnya. Keberhasilan tersebut salah satunya dipengaruhi faktor peran serta masyarakat yang cukup tinggi, termasuk di dalamnya adalah peran serta kaum wanita. Pasca peremajaan, masyarakat setempat secara mandiri mengelola lingkungan beserta prasarana yang ada. Namun pada kenyataannya, pengelolaan tersebut lebih banyak dikoordinir oleh wanita melalui wadah PKK dan dapat dikatakan berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa wanita mempunyai potensi yang cukup besar dan akan bermanfaat bagi pembangunan apabila dikelola dengan baik dan dikoordinir melalui organisasi yang tepat.

Peran wanita dalam pengelolaan prasarana lingkungan di Kelurahan Mojosoongo meliputi prasarana jalan, prasarana sampah, prasarana sanitasi, dan MCK. Kesemuanya dikoordinir melalui organisasi PKK. Dalam hal ini PKK menerapkan manajemen yang terdiri dari Planning, Organizing dan Controlling. Secara umum pengelolaan tersebut berhasil.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Gender and Development (GAD). Pendekatan ini lebih memfokuskan pada relasi antara laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan prasarana di wilayah yang bersangkutan, sebagai upaya mengungkapkan posisi perempuan dan laki-laki, serta penentuan porsi peran yang harus dimainkan oleh masing-masing pihak secara seimbang, agar pengelolaan prasarana dapat lebih optimal.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa kesetaraan gender tidak perlu ditunjukkan dengan peran yang sama antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan yang dimaksud dalam konteks ini adalah kesempatan yang sama antara pria dan wanita untuk mengaktualisasikan dirinya secara struktural di masyarakat, serta relasi yang saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam penelitian ini juga muncul temuan unggulan yang mengungkapkan bahwa keberadaan PKK sebagai organisasi perempuan memiliki arti penting dalam upaya mengeliminir ketidakadilan terhadap perempuan melalui proses pembelajaran yang berlangsung dalam organisasi tersebut, dan secara lebih luas mampu turut berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Kata kunci : Isu gender, peran wanita, pengelolaan prasarana lingkungan

Abstract

The phenomena of gender issue appearing on development implementation in Indoensia was determined by communities' structure and culture, making the different roles between men and women. In this case, women were as parts eliminated. The problem was, the differences tend to make men and women became the victims. Men's responsibilities in public sectors would be larger and heavier, whereas women's abilities couldn't improve because their roles in public sectors were limited. In particular, the gender issue unfolded on management of neighborhood utilities in Mojosongo district.

Mojosongo district was one of slum and squatter are which was examined in renewal projects in Solo. This project was stated being success and it was proved by achieving some appreciations. The achievement was influenced by height of community roles, including women's participations. After the project, the people organized the neighborhood with all the utilities independently. Nevertheless, most of the activities is organized by women through PKK organization, and the fact that their efforts was success. The term showed that women had better abilities to manage and organized themselves to take a part in development through the perfect organization.

Women's roles in organized neighborhood utilities in Mojosongo district was included kampong's road utilities, sanitation, MCK, and waste ones. All of the activities were organized by PKK. In this case, the management was used by PKK consist of planning, organizing, and controlling. Generally, the activities were success.

The approach using in this research was Gender and Development (GAD). This approach was more focused on the relation between men and women in managing their neighborhood, as an effort on stating their position, and also determined the portion of roles which have to be done by each member balancely, in order to get the better advantages.

Based on the research, it was known that the balance of gender was not to be appeared by the same role between men and women. The balance meant in this case was the same opportunities between men and women to improve themselves in community, and also the complete relation between them in development implementation. It was also found the important point that showed the existence of PKK was important as an organization that could eliminate the women's subordination. The elimination could be done by the learning process through the organization. They could also participate on improving social welfare.

Key words : Gender issue, women's roles, management of neighborhood utilities

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Tesis ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan penuh ketulusan penulis sampaikan kepada:

1. Bapak-bapak Pengelola, para Dosen Pengajar, dan segenap Staf Program Pasca Sarjana MPWK-UNDIP yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu.
2. Bapak DR. Ir. Joesron Alie Syahbana, MSc dan Bapak Ir. Mardwi Rahdriawan, MT yang telah sudi meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing kami dalam penulisan hingga selesainya Tesis ini.
3. Bapak Ir. Hadi Wahyono, MA dan Ibu Ir. Rina Kurniati, MT selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan kritikan dan masukan berharga bagi penyempurnaan tulisan ini.
4. Keluargaku tercinta, yang selalu mendorong penulis dengan cinta dan kasih sayang.
5. Bapak Heru, Bapak Aco dan segenap warga Kelurahan Mojosongo yang telah berkenan memberikan informasi dan bantuan lainnya dalam upaya pengumpulan data.
6. Ibu-ibu tim Penggerak PKK Kelurahan Mojosongo yang telah berkenan membantu penjangkaran informasi tentang kegiatan PKK, khususnya mengenai kegiatan pengelolaan prasarana lingkungan setempat.
7. Bapak Budi Yulis dari Dinas Tata Kota dan DPU Kota Surakarta yang telah banyak membantu dalam pengumpulan data dan wawancara.
8. Rekan-rekan sekalian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini masih jauh sempurna, untuk itu segala sumbang saran dan kritik demi untuk perbaikan Tesis ini, penulis terima dengan lapang dada.

Akhirnya semoga tulisan ini dapat bermanfaat adanya.

Semarang, Juni 2005

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAKSI	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR PUSTAKA	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 Wajah Perempuan Indonesia	1
1.1.2 Wanita dalam Pembangunan	4
1.2 Permasalahan	7
1.3 Tujuan dan Sasaran Studi	11
1.3.1 Tujuan Studi.....	11
1.3.2 Sasaran Studi.....	11
1.4 Ruang Lingkup Studi.....	12
1.4.1 Ruang Lingkup Materi	12
1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah	13
1.5 Kerangka Pemikiran	15
1.6 Metode Penelitian	18
1.6.1 Pendekatan Studi.....	18
1.6.2 Pengumpulan Data.....	20
1.6.3 Pemeriksaan Keabsahan Data.....	23
1.6.4 Teknik Analisis.....	24
1.7 Sistematika Penulisan	28

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA ISU GENDER DAN PERAN SERTA PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN PRASARANA LINGKUNGAN	30
2.1	Konsep Gender	30
2.1.1	Perbedaan Gender Melahirkan Ketidakadilan terhadap Perempuan.....	33
2.1.2	Gender dan Struktur Sosial.....	38
2.2	Gender dan Isu Pembangunan	39
2.3	Perempuan dalam Pandangan Kultur Jawa.....	42
2.4	Perempuan dan Pembangunan	46
2.4.1	Pendekatan Perempuan dalam Pembangunan.....	46
2.4.2	Gerakan Perempuan dan Pembangunan	55
2.4.3	Akses Perempuan dalam Program Pembangunan	56
2.4.4	Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Indonesia	58
2.4.5	Penerapan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan.....	62
2.5.	Pengelolaan Lingkungan Permukiman Kumuh	65
2.6.	Rumusan Teoritis.....	67
BAB III	GAMBARAN KONDISI FISIK DAN PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN KELURAHAN MOJOSONGO	70
3.1.	Tinjauan Program Perbaikan Lingkungan Permukiman di Surakarta	70
3.2.	Gambaran Umum Kelurahan Mojosoongo	72
3.2.1	Kondisi Fisik Wilayah	72
3.2.2	Kondisi Sosial Ekonomi	74
3.3.	Kondisi Wilayah Sebelum Peremajaan.....	83
3.4.	Kondisi Wilayah Setelah Peremajaan.....	75

BAB IV	ANALISIS PERAN WANITA DALAM PENGELOLAAN PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN DI KELURAHAN MOJOSONGO	88
4.1	Aktivitas Wanita dalam Bidang Sosial Kemasyarakatan	88
4.2	Aktivitas Wanita dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga ...	93
4.3	Aktivitas Wanita dalam Pengelolaan Prasarana Lingkungan Permukiman.....	96
4.3.1	Peran Wanita dalam Pengelolaan Prasarana Sampah	96
4.3.2	Peran Wanita dalam Pengelolaan Prasarana MCK...	98
4.3.3	Peran Wanita dalam Pengelolaan Prasarana Sanitasi	100
4.3.4	Peran Wanita dalam Pengelolaan Prasarana Jalan Kampung.....	103
4.4	Pendekatan Peran Serta Wanita dalam Pengelolaan Prasarana Lingkungan dengan GAD (<i>Gender and Development</i>)	104
4.5	Pengaruh Budaya Jawa dan Surakarta terhadap Fenomena Peran Wanita di Kelurahan Mojosoongo.....	108
4.6	Tingkat Partisipasi Wanita dalam Mengelola Prasarana Lingkungan.....	110
4.7	Rumusan Konseptual Peran Wanita dalam Pengelolaan Prasarana Lingkungan di Kelurahan Mojosoongo.....	111
BAB III	PENUTUP.....	117
5.1	Kesimpulan	117
5.2	Temuan Unggulan.....	119
5.3	Rekomendasi	122

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Perbedaan Konsep Gender dan Seks.....	32
Tabel III.1	Penduduk Kelurahan Mojosoongo Menurut Mata Pencaharian Tahun 2005.....	75
Tabel III.2	Perbedaan Peran Gender di Kelurahan Mojosoongo.....	81

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Wajah Perempuan Indonesia

Pembangunan nasional pada hakekatnya rangkaian perubahan yang dilakukan secara menyeluruh, terarah dan berencana dalam rangka mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan, yaitu masyarakat yang memiliki keseimbangan antara kebutuhan lahiriah dan batiniah. Oleh karena itu pembangunan nasional mesti mengacu pada konsep pembangunan yang utuh, menyeluruh dan melibatkan peran aktif seluruh masyarakat. Tanpa peran aktif, maka pembangunan nasional akan mengalami hambatan dan bahkan kegagalan.

Gender yang merupakan konsep sosial yang membedakan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan. Fungsi dan peran tersebut dipilah-pilah menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Sehingga pada saat ini mulai muncul adanya budaya masyarakat yang membedakan peran laki-laki dan perempuan yaitu perbedaan peran laki-laki dan perempuan, ketidakadilan peran perempuan atau dalam hal ini perempuan dimarginalkan.

Mengingat jumlah populasi perempuan yang seringkali lebih besar dari laki-laki, potensi perempuan tidak dapat diabaikan dalam konstelasi pembangunan nasional. Perempuan berkualitas (fisik, mental dan psikologis) berpeluang untuk lebih meningkatkan kinerja produktivitas.

Ia juga akan lebih dapat berkontribusi maksimal terhadap keluarga, masyarakat dan negara. Ia tidak akan menjadi beban negara, dan justru menjadi aset negara yang sangat penting. Tidak dapat dibayangkan, manakala banyak perempuan tidak sehat, kurang pintar dan tak terampil, mereka tentu saja akan menjadi beban pembangunan, dan pada akhirnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sulit tercapai.

Dalam kurun waktu dua dasawarsa ini, secara umum terjadi peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang. Namun, di beberapa bidang strategis upaya pemberdayaan perempuan masih perlu ditingkatkan lagi, diantaranya di sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Termasuk dalam hal perlindungan terhadap perempuan yang menghadapi permasalahan-permasalahan sosial. Berikut contoh kasus terkini yang menetapkan wajah perempuan Indonesia dewasa ini dan kontribusi mereka terhadap konstelasi pembangunan nasional, yang didasarkan pada data statistik BPS tahun 1999-2000 :

- 54% perempuan Indonesia hanyalah lulusan SD ke bawah, 19% lulusan SLTP dan 27% lulusan SLTA, dari penduduk usia 10-44 tahun dan 45 ke atas. Angka buta huruf perempuan lebih tinggi dari laki-laki (3.816.681 perempuan dan 2.138.781 laki-laki). Angka partisipasi di SLTP: perempuan 87,07%, laki-laki 89%, dan SLTA: perempuan 61%, sedangkan laki-laki 68%.
- Di bidang kesehatan, 50% perempuan Indonesia mengalami anemia, dan kekurangan energi kalori sebanyak 18%. Angka Kematian Ibu akibat melahirkan berkisar antara 300 sampai 400 orang per 100 ribu kelahiran hidup. Ini berarti setiap jam ada dua orang ibu meninggal dunia akibat melahirkan (angka ini tertinggi di ASEAN).

- Di bidang ekonomi, sebagian besar perempuan masih berkibrah di sektor informal atau pekerjaan yang tidak memerlukan kualitas pengetahuan dan keterampilan canggih dan spesifik karena latar belakang pendidikan mereka yang rendah.
- Peranan mereka dalam politik (parpol dan lembaga legislatif), termasuk pula pada lembaga eksekutif dan yudikatif, seringkali masih muncul masalah eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Peran perempuan Indonesia secara kolektif dewasa ini memang masih belum menonjol, namun hal ini bukan berarti tidak ada ataupun stagnan. Ada beberapa perbaikan kondisi perempuan beberapa tahun belakangan, meski tidak bisa disebut sepanjang bangsa ini merdeka. Gerakan pemberdayaan perempuan masih banyak hambatan. Beberapa hal yang membuat kondisi perempuan menuju pada perbaikan, khususnya dalam hal ketimpangan gender yang semakin menurun, bisa diinventarisasi melalui: perempuan bekerja yang terus meningkat hingga sebelum krisis ekonomi tahun 1998 mencapai 40%. Angka ini sedikit lebih tinggi dari Asia Selatan yang 38% dan Asia Tengah serta Afrika Utara masing-masing 26%. Angka buta huruf perempuan yang terus turun hingga kurang dari 10% dewasa ini, dari di atas 50% pada dasawarsa 1960-an. Rata-rata lamanya bersekolah perempuan terus meningkat hingga menjadi sekitar 5,0 belakangan ini. Perempuan yang sekolah di sekolah menengah dan perguruan tinggi terus meningkat (Mosse, 1996 :164-165). Data Susenas 1997 menunjukkan 39% perempuan di daerah perkotaan dan 51% di pedesaan aktif secara ekonomi. Angka ini naik dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Sementara itu, hanya 0,3% menduduki jabatan manajerial dan administrasi, dan hanya 5% menjadi tenaga profesional awal 1990, perempuan menduduki sekitar sepertiga dari posisi pegawai negeri, termasuk sebagian pada jabatan sangat tinggi.

Di dalam ekonomi, produktivitas perempuan akan mampu memberdayakan diri sendiri dan keluarga secara lebih mandiri serta mampu menyejahterakan kehidupan mereka dengan optimal. Perempuan yang berkualitas di bidang ekonomi setidaknya mempunyai pendidikan memadai, sehat dan mempunyai kemampuan bereaksi menciptakan pekerjaan bagi diri sendiri dengan dukungan fasilitas yang ada.

Tingkat pendidikan yang rendah dan terbatasnya akses terhadap informasi menyebabkan perempuan menjadi rentan terhadap berbagai krisis yang terjadi, baik ekonomi maupun sosial. Perempuan masih terbelenggu dalam kondisi diskriminatif antara laki-laki dan perempuan. Akibatnya, angka buta huruf di kalangan perempuan cukup tinggi, pengangguran dan upah yang diterima pekerja perempuan cukup rendah bila dibandingkan dengan laki-laki. Oleh karena itu, Inpres No. 9 Tahun 2000 dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender melalui kegiatan advokasi, sosialisasi dan fasilitas gender. Bila kondisi perempuan ini dibiarkan, maka perempuan yang diharapkan sebagai elemen penting untuk berperan aktif dalam pembangunan akan sulit diwujudkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya terpadu dalam rangka memberdayakan perempuan baik.

1.1.2 Wanita dalam Pembangunan

Salah satu titik berat pembangunan yang dilakukan pemerintah bagi masyarakat adalah pembangunan di bidang perumahan dan permukiman beserta prasarana sebagai bentuk layanan untuk dapat mendukung kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan yang seringkali muncul dalam pembangunan di bidang perumahan dan permukiman adalah terbatasnya dana pemerintah untuk mensubsidi pembangunan rumah, dan sulitnya memobilisasi tabungan masyarakat untuk perumahan, sehingga pengadaan perumahan lebih banyak bertumpu pada kemampuan masyarakat sendiri. Sementara itu, pertumbuhan penduduk cenderung meningkat pesat, terutama di wilayah perkotaan sebagai akibat dari tingkat migrasi ke kota yang tinggi. Padahal pertumbuhan penduduk tersebut tidak diimbangi oleh peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga banyak kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mampu menikmati tinggal di perumahan yang layak dan sehat. Akibatnya, muncullah permukiman-permukiman kumuh di perkotaan dengan kondisi fisik dan sosial yang tidak memenuhi persyaratan teknis kesehatan.

Belakangan, pemerintah menggulirkan program-program peremajaan lingkungan permukiman kumuh sebagai langkah solusi bagi permasalahan perkotaan yang mendesak untuk segera ditanggulangi. Program peremajaan tersebut berprinsip partisipatif. Dalam menata lingkungan kumuh, peran masyarakat setempat sangat diperlukan untuk bersama-sama turut berusaha meningkatkan kualitas lingkungan hidup mereka.

Salah satu uji coba penataan lingkungan kumuh dilaksanakan pada sekitar tahun 1995-an di Kota Solo, tepatnya di bantaran Kali Anyar dan sekitarnya dengan upaya mengembalikan fungsi tanah sesuai proporsinya, sertifikasi tanah yang ditata lingkungannya, dan pembangunan fisik lingkungan permukiman dengan swadaya masyarakat. Penataan tersebut dilanjutkan dengan pengadaan prasarana penunjang seperti air bersih, perbaikan jalan dan jembatan, serta jamban keluarga dan MCK.

Program peremajaan tersebut dapat dikatakan berhasil, terbukti dengan diraihnya penghargaan Adipura selama tiga kali sebagai bentuk penghargaan karena terciptanya kebersihan di Kota Solo. Selain itu, setelah setahun berjalan, prestasi lain mulai dirasakan. Pertama terbaik dalam program P2WKSS (Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera) se Karasidenan Surakarta mewakili Karasidenan Surakarta dalam program terbaik P2WKSS se Jawa Tengah.

Berdasarkan paparan di atas, maka nampak bahwa peran masyarakat sangat menentukan keberhasilan program penataan lingkungan kumuh di Surakarta, termasuk di dalamnya peran wanita yang nampak menonjol melalui wadah P2WKSS. Meskipun P2WKSS saat ini sudah tidak banyak berperan lagi, namun peran wanita tetap menonjol dan dituangkan melalui wadah PKK.

Peran perempuan dalam pembangunan setidaknya mengandung dua pengertian. Pertama, pembangunan dapat memberikan kemudahan kepada perempuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarga. Kedua, pembangunan juga memberikan kemungkinan bagi perempuan untuk mengalirkan tenaga, ketrampilan, pikiran dan keahlian dalam proses pembangunan.

Pada saat ini terdapat kecenderungan yang cukup besar dimana perempuan menduduki peranan yang dominan dalam pekerjaan mencari nafkah. Perempuan turut berperan serta dalam bidang pertanian, peternakan, perdagangan, industri, pemerintahan, dan bahkan kegiatan politik.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan peran perempuan sangat besar, karena di satu sisi mereka menyediakan makanan bergizi bagi anggotanya, tetapi di sisi lain mereka turut mencari nafkah guna mewujudkan keinginan tersebut.

Melihat potensi perempuan yang cukup besar dan kerentanan terhadap kegagalan pembangunan, maka perempuan harus diberdayakan agar dapat menolong dirinya sendiri dan orang lain. sebagai manusia biasa dan penopang hidup keluarga sudah selayaknya perempuan diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam pembangunan. Berbagai program telah dilancarkan secara penuh oleh pemerintah, namun dalam kenyataan ketimpangan dan kesenjangan tetap saja melebar antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bentuk partisipasi. Padahal, apabila terjadi kegagalan pembangunan, maka akses yang paling rentan dan pertama dirasakan adalah oleh kaum perempuan

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan akhir-akhir ini memang menunjukkan frekuensi yang meningkat, namun keikutsertaan perempuan dalam pembangunan kelihatannya belum maksimal. Hal ini dapat dilihat pada kondisi memprihatinkan yang melilit perempuan, yang mana perempuan masih dianggap memiliki status dan kedudukan yang rendah dalam kehidupan masyarakat.

1.2 Permasalahan

Mojosongo adalah sebuah kelurahan yang terletak di bagian Timur Laut Kota Surakarta. Luas wilayah administratif kelurahan termasuk terbesar di Surakarta sekitar 532 hektar. Jumlah penduduk kelurahan Mojosongo pada saat ini adalah 40.203 jiwa yang terdiri dari 10.743 KK dengan kepadatan penduduk $7.544/\text{km}^2$. Laju pertumbuhan penduduk kelurahan Mojosongo adalah 1,66% lebih tinggi di bandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk kota Surakarta yang sebesar 0,77%. Migrasi penduduk yang pindah selama tahun 2000 sebanyak 355 dan jumlah penduduk yang datang sebanyak 1.061 dan merupakan tertinggi di Surakarta.

Tingginya jumlah kedatangan penduduk untuk tinggal menggambarkan tingginya daya tarik kelurahan Mojosongo yang didukung dengan lahan relatif luas, banyaknya perumahan yang dibangun pada kawasan tersebut dan lokasinya yang sangat mudah dijangkau dari pusat kota. Letak strategis dengan aksesibilitas yang cukup tinggi meningkatkan nilai kawasan ini dan pada gilirannya semakin menarik bagi penduduk untuk tinggal. Tetapi sebagian besar pendatang tersebut berasal dari golongan masyarakat berpenghasilan rendah yang mulai terpinggirkan dari pusat kota atau pendatang dari luar kota yang mencari keuntungan di kota. Kondisi inilah yang mendorong terbentuknya permukiman kumuh.

Mengenai karakteristik masyarakat, pada umumnya masyarakat bekerja pada sektor informal terdiri dari buruh, tukang becak, perajin sangkar burung, pembuat tahu tempe, bekerja pada peternakan babi dan lain-lain. Kondisi sosial ekonomi termasuk dalam golongan masyarakat berpenghasilan rendah dimana sebagian besar masyarakat memiliki tingkat pendapatan yang terbatas dan pendidikan yang rendah. Kondisi sosial kemasyarakatan yang ada tidak jauh berbeda dengan kondisi sosial ekonominya. Perilaku warga terhadap lingkungannya hampir sama dengan perilaku masyarakat pada permukiman kumuh lain. tidak adanya tempat sampah yang memadai mendorong warga membuang sampah di saluran air. Tidak adanya fasilitas MCK yang layak di lingkungan mereka apalagi di dalam rumah juga mendorong mereka untuk membuang hajat di saluran ataupun pekarangan.

Pada tahun 1983/1984 di Surakarta program perbaikan lingkungan permukiman dimulai dengan pelaksanaan program perbaikan kampung melalui *Urban Development Project V*, yang dilaksanakan pada 28 kampung seluas 400 ha.

Program ini menggunakan bantuan dana Bank Dunia (IBRD) bersama-sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di tahun 1983/1984 sampai dengan tahun 1987/1988. pada saat itu program perbaikan lingkungan yang dilaksanakan hanya mempertimbangkan mengenai peningkatan infrastruktur fisik saja sebagai upaya untuk mengurangi penurunan kualitas lingkungan di kampung-kampung berkepadatan tinggi dan golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Program perbaikan lingkungan yang ada belum menyentuh faktor ekonomi dan faktor sosial. Salah satu daerah yang masuk dalam program ini adalah Kelurahan Mojosongo.

Kemudian perbaikan lingkungan permukiman kumuh dilanjutkan dengan program KIP tahun 1991 sampai tahun 1993 melalui program KIP tahap III yang meliputi 9 kampung seluas 160 Ha. Selanjutnya pada bulan September 1993 Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Pekerjaan Umum, Dirjend Cipta Karya Direktorat Bina Program menetapkan program yang dikenal dengan SSUDP (*Semarang Surakarta Urban Development Program*) yang menetapkan Surakarta sebagai bagian dari pembangunan perkotaan terpadu bersama dengan kota Semarang.

Program perbaikan lingkungan kumuh kembali dilaksanakan melalui program perbaikan kampong (KIP) sebagai bagian dari program SSUDP di kota Surakarta. Adapun lokasinya adalah lokasi yang pernah mendapat program perbaikan kampung sebelumnya dan lokasi kampung yang belum pernah mendapatkan program perbaikan kampung. Salah satu program yang dilaksanakan adalah peremajaan lingkungan permukiman di Mojosongo. Peremajaan lingkungan permukiman di Mojosongo ini dikelompokkan ke dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana secara umum, kegiatan *redevelopment* dan kegiatan *resettlement*.

Sebagai salah satu daerah yang dikenai program peremajaan, wilayah Kelurahan Mojosongo termasuk salah satu wilayah yang berhasil menata lingkungannya. Selain itu berdasarkan pantauan PT. Wiswakharman sebagai konsultan pendamping dalam penataan lingkungan kumuh di wilayah tersebut, dinilai bahwa tingkat peran serta masyarakat pada kawasan yang diremajakan di Mojosongo pada umumnya cukup tinggi.

Jumlah penduduk yang telah diremajakan sebanyak 9.378 jiwa. Bila dilihat dari komposisi penduduknya dapat diketahui bahwa jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Di samping itu, peran wanita dalam penataan lingkungan kumuh nampak menonjol melalui wadah P2WKSS. Meskipun P2WKSS saat ini sudah tidak banyak berperan lagi, namun peran wanita tersebut tetap nampak menonjol dalam wadah PKK yang menggantikan paguyuban P2WKSS.

Melihat kondisi tersebut di atas, hal menarik yang menjadi pertanyaan penelitian dalam studi ini adalah **'bagaimana peran serta perempuan dalam pengelolaan prasarana lingkungan permukiman di Mojosongo Surakarta?'**. Mengingat selama ini banyak penelitian yang terkait dengan perbedaan peran laki-laki dan perempuan (gender) memperlihatkan bahwa terdapat indikasi terjadinya ketidakadilan terhadap perempuan. Untuk itu perlu diteliti sejauh mana peran serta perempuan dalam pengelolaan prasarana.

1.3 Tujuan dan Sasaran Studi

1.3.1 Tujuan Studi

Melihat latar belakang dan permasalahan seperti tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan isu gender dalam pengelolaan lingkungan permukiman di Mojosoongo Surakarta. Hal ini terutama berkaitan dengan peran serta wanita dalam kegiatan pengelolaan tersebut.

1.3.2 Sasaran Studi

Berdasarkan tujuan seperti tersebut di atas maka yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi kondisi fisik dan prasarana permukiman di Kelurahan Mojosoongo pasca peremajaan permukiman.
2. Mengidentifikasi karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di lingkungan permukiman di Kelurahan Mojosoongo Surakarta.
3. Mendeskripsikan bentuk peran serta perempuan dalam mengelola prasarana lingkungan permukiman di Mojosoongo Surakarta.
4. Mendeskripsikan tingkat peran serta perempuan dalam pengelolaan prasarana permukiman di Mojosoongo Surakarta.
5. Menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat peran serta perempuan dalam pengelolaan prasarana lingkungan permukiman di Mojosoongo Surakarta.

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Ruang Lingkup Materi

Dengan maksud untuk memperjelas dan mempersempit permasalahan yang dibahas, penulis perlu untuk membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Penelitian ditekankan pada pembahasan mengenai peran serta perempuan dalam pengelolaan prasarana lingkungan permukiman di Mojosongo Surakarta.
2. Peran serta perempuan dalam pengelolaan prasarana yang dimaksud di sini merupakan keterlibatan perempuan dalam perawatan dan pengembangan fisik prasarana yang telah dibangun untuk menjamin keberlanjutan fungsinya dalam rangka mendukung aktivitas masyarakat.
3. Pengertian prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan dimana kondisi dan kinerja berpengaruh pada kelancaran aktivitas masyarakat yang dilayaninya. Adapun jenis prasarana yang dikaji dalam penelitian ini adalah prasarana lingkungan yang mampu dikelola oleh masyarakat, yaitu:
 - Prasarana jalan, karena masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan tingkatan layanan prasarana tersebut sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan masyarakat.
 - Prasarana sanitasi, yang berupa drainase yaitu saluran di sepanjang kiri kanan jalan karena memiliki hubungan langsung dengan kegiatan sehari-hari dan masyarakat memiliki kemampuan untuk mengoperasikan dan memeliharanya. Rendahnya kinerja saluran akan mengakibatkan genangan yang berpengaruh langsung pada aktivitas masyarakat dan kondisi lingkungan.

- Prasarana pembuangan sampah yaitu mulai dari pembuangan sampah pada tempat yang telah disediakan sampai pengumpulan di tempat pembuangan sementara yang ada pada lingkungan tersebut.
4. Pembahasan ditekankan pada peran serta perempuan dalam lingkungan permukiman sedangkan peran serta perempuan selama setelah pelaksanaan proyek peremajaan lingkungan permukiman di Mojosoongo dibahas sebatas bentuk sumbangan dan tingkat peran serta tersebut.
 5. Mengenai variabel-variabel penelitian berkaitan dengan faktor-faktor yang pendukung dan penghambat peran serta wanita.

1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah

Kota Surakarta merupakan pusat wilayah pengembangan VIII Jawa Tengah Bagian Selatan-Timur, memiliki wilayah seluas 44,04 km² dengan jumlah penduduk tahun 2000 adalah 550.251 jiwa serta dengan tingkat kepadatan 12.494 jiwa/km². dalam hal ini wilayah kelurahan Mojosoongo masuk dalam SWP X yang di dalam RUTRK termasuk wilayah pengembangan perumahan dan permukiman, memiliki luas wilayah 5,33km² dengan jumlah penduduk tahun 2000 adalah 38.659 jiwa dan tingkat kepadatan 7.254 jiwa/km². Adapun kawasan yang terkena proyek peremajaan lingkungan permukiman merupakan bagian wilayah Kelurahan Mojosoongo yang terletak di sebelah Utara Sungai Kali Anyar terdiri dari 7 RW dengan luas ±30 ha.

Pertimbangan pemilihan lokasi studi ini didasarkan karena awalnya pada kawasan Mojosoongo dilaksanakan proyek peremajaan lingkungan permukiman yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan peran serta masyarakat.

Proyek tersebut merupakan proyek pertama pemerintah dalam peremajaan lingkungan permukiman di Surakarta dengan skala besar. Kegiatan peremajaan ini melibatkan masyarakat secara aktif. Proyek ini tidak hanya bersifat fisik saja, tetapi lebih besar lagi juga disertai upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi. Tindak lanjut dari proyek ini adalah pengelolaan prasarana yang telah dibangun oleh masyarakat setempat. Fenomena pengelolaan prasarana ini menjadi menarik, karena selain dilatarbelakangi oleh kegiatan peremajaan, juga karena dalam kenyataannya urusan pengelolaan tersebut lebih banyak dilakukan oleh kaum wanita di kelurahan tersebut. Dengan demikian nampak bahwa peran wanita telah “hidup” bahkan terlihat cukup dominan.

Kenyataan tersebut berbeda dengan beberapa anggapan peneliti di negara Barat yang lebih banyak mengungkapkan ketertindasan perempuan oleh adanya isu gender tersebut. Disamping itu juga fokus penelitian dititikberatkan pada peran serta perempuan karena jumlah perempuan yang ada di wilayah tersebut lebih besar dibandingkan jumlah laki-laki. Dengan demikian dimungkinkan terdapat potensi yang besar pada diri perempuan di kelurahan tersebut yang masih bisa digali lebih dalam lagi.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan program peremajaan lingkungan permukiman, unit pendekatan yang dipakai adalah RW di kelurahan Mojosongo Surakarta yang terkena proyek peremajaan lingkungan permukiman, sehingga penelitian ini menggunakan unit spasial lingkungan RW pula. Alasan pemilihan lingkup RW ini adalah:



PROGRAM STUDI
MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

TESIS

ISU SUDER DALAM PENGELOMPOKAN
PRASARANA LINGKUNGAN PERUMAHAN
(STUDI KASUS : KELURAHAN MOJOSONGO, SURABAYA)

PETA

WILAYAH STUDI

LEGENDA



Kantor Kelurahan



Batas Kelurahan



Jalan Perummas



Jalan Lokal



Sungai



Pusat Aktivitas Ekonomi
Berupa Pasar



Wilayah Penelitian (RW I-VII)



Wilayah Penelitian (RW VIII-XII)

UTARA

SKALA

U

1 : 10.000



NO. PETA

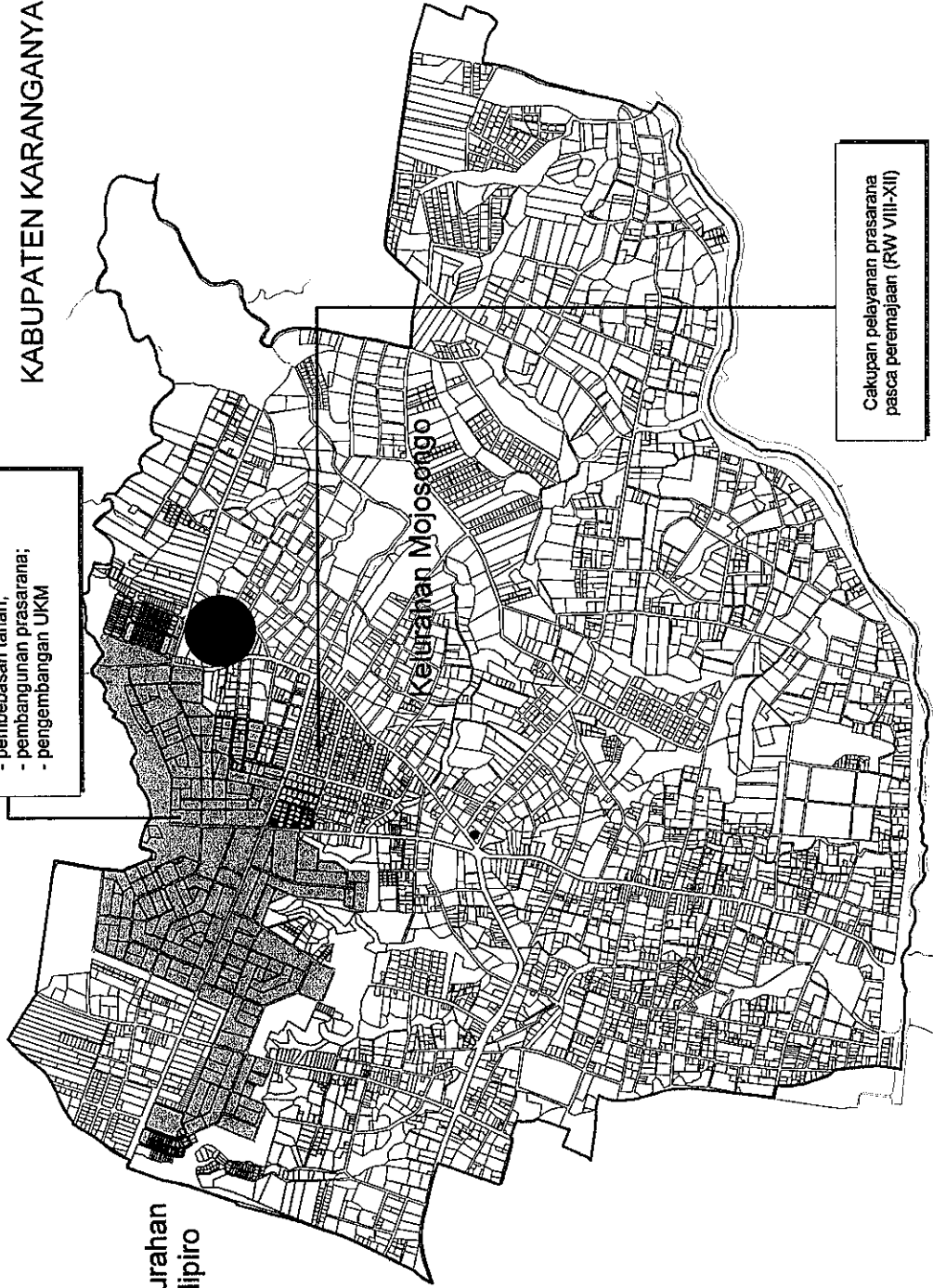
HAL. PETA

SUMBER

BAPPEDA KOTA SURABAYA

KABUPATEN KARANGANYAR

Wilayah Peremajaan (RW I-VII) :
- pembangunan perumahan baru;
- pembebasan tanah;
- pembangunan prasarana;
- pengembangan UKM



Cakupan pelayanan prasarana
pasca peremajaan (RW VIII-XII)

Kelurahan
Kadipiro

Kelurahan Jebres

- a. Sejak perencanaan dan pelaksanaan masyarakat yang dilibatkan untuk mengkoordinasi adalah pada lingkup RW.
- b. Pada tingkat RW sudah dimungkinkan terjadinya pengelolaan prasarana oleh masyarakat sendiri.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia muncul fenomena dimana terdapat perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut muncul karena latar belakang dan struktur budaya masyarakat yang membuat suatu stereotip perilaku laki-laki dan perempuan yang diterima oleh lingkungan mereka. Hal itu melahirkan suatu isu gender dimana perempuan umumnya termarginalkan.

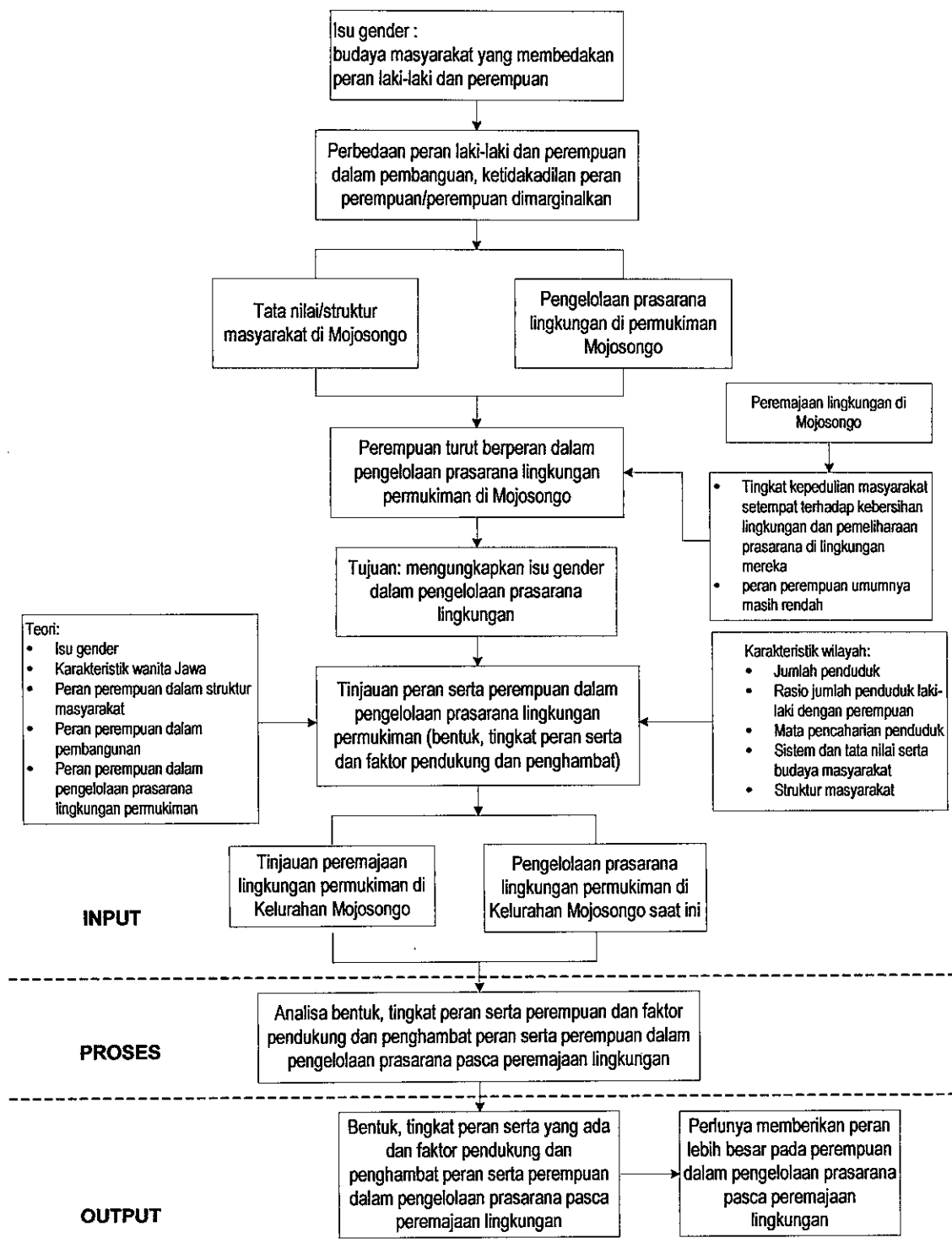
Dalam rangka memperbaiki kualitas lingkungan salah satu usaha yang dilakukan Pemerintah Surakarta adalah melakukan peremajaan lingkungan permukiman di Mojosongo. Dalam kegiatan peremajaan ini masyarakat setempat diikutsertakan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek dengan maksud untuk memperoleh dukungan dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat serta adanya pengelolaan lebih lanjut oleh masyarakat. Dalam hal ini tidak terkecuali kaum perempuan yang merupakan populasi terbesar yang ada di wilayah studi. Namun, pada kenyataannya setelah dilakukan peremajaan masyarakat justru terkesan kurang peduli terhadap pemeliharaan kebersihan lingkungan dan pengelolaan prasarana lingkungan di sekitar rumah mereka. Hal ini juga tidak terlepas dari minimnya peran perempuan di kelurahan setempat.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang diangkat berhubungan dengan upaya mengungkapkan peran serta perempuan yang ada dengan tujuan mengetahui bentuk dan tingkat peran serta perempuan dalam lingkungannya. Terutama difokuskan pada pengelolaan prasarana pasca peremajaan lingkungan permukiman di Mojosongo Surakarta yang telah dilakukan dengan program *redevelopment, resettlement*.

Untuk menjawab permasalahan dan mencapai tujuan tersebut, maka dilakukan analisis tentang bentuk, tingkat peran serta perempuan dan faktor pendukung dan penghambat terhadap peran serta perempuan dalam pengelolaan prasarana pasca peremajaan lingkungan. Sebelumnya perlu dilakukan kajian pustaka tentang isu gender dan karakteristik wanita Jawa kaitannya dengan peran mereka dalam pembangunan khususnya pengelolaan prasarana. Disamping itu analisis didasarkan pada kondisi fisik dan sosial budaya masyarakat yang ada di Kelurahan Mojosongo.

Hasil analisis dari penelitian ini adalah gambaran lebih dalam tentang bentuk, tingkat peran serta perempuan dan faktor pendukung dan penghambat peran serta perempuan dalam pengelolaan prasarana pasca peremajaan lingkungan di Kelurahan Mojosongo.

Selanjutnya dapat diberikan suatu rekomendasi upaya-upaya untuk memberikan peran yang lebih besar pada perempuan dalam pengelolaan prasarana di Kelurahan Mojosongo. Untuk ringkasnya mengenai kerangka pemikiran studi, dapat dilihat pada gambar I.1.



GAMBAR 1.1
KERANGKA PEMIKIRAN STUDI

1.6 Metode Penelitian

Penelitian merupakan metode studi yang dilakukan seseorang atau beberapa orang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah yang diteliti. Metode penelitian adalah suatu cara kerja yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan aturan-aturan baku (sistem dan metode) dari masing-masing disiplin ilmu yang digunakan (Handayani dan Sugiarti, 2002). Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah sebagai berikut :

1.6.1 Pendekatan Studi

Penelitian ini merupakan penelitian berperspektif gender. Penelitian gender adalah suatu kajian yang dilaksanakan untuk memahami terjadinya perbedaan peran sosial yang disebabkan oleh aspek gender. Esensi penelitian berperspektif gender adalah suatu kajian yang secara jelas berusaha mengungkapkan pengalaman perempuan dan hubungan gender sesuai dengan isu sentral yang perlu mendapat perhatian (Handayani dan Sugiarti, 2002).

Dunia ilmu pengetahuan yang bersifat androsentris tidak memperhitungkan perempuan dalam teori dan metodologi, karena itu cara-cara baru perlu ditempuh. Demikian pula selama penelitian studi perempuan/ gender, metodologi penelitian bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang terbebas dari karakteristik ketidakberuntungan dalam berbagai bentuk.

Agar metodologi studi perempuan/ gender dapat dikuasai maka peneliti harus menguasai badan ilmu tentang studi perempuan/gender. Bagi penelitian yang berfokus pada gender, kepekaan peneliti terhadap masalah gender harus tinggi, sehingga metodologi penelitian tidak bias lelaki atau nonseks. Secara epistemologis metodologi penelitian studi perempuan/ gender berdasarkan paradigma baru. Paradigma ini mengubah dan mengembangkan sumber daya manusia perempuan yang terbebas dari berbagai macam ketidakberuntungan seperti ketertinggalan, keterbelakangan, subordinasi, eksploitasi, serta perlakuan yang tidak memandang bahwa perempuan sebagai zat biologis yang berharkat dan bermartabat sederajat dengan laki-laki.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis. Pendekatan fenomenologis berusaha memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang dengan maksud menemukan "fakta" atau "penyebab". Penyelidikan fenomenologis bermula dari diam. Keadaan "diam" merupakan upaya untuk menangkap apa pengertian sesuatu yang sedang diteliti dengan menekankan aspek-aspek subjektif dari perilaku manusia. Peneliti dalam menggunakan pendekatan fenomenologi berusaha untuk dapat masuk ke dalam dunia konseptual subjek penyelidikannya agar dapat memahami bagaimana dan apa makna yang disusun subjek tersebut di sekitar kejadian-kejadian dalam kehidupan sehariannya. Singkatnya, peneliti berusaha memahami subjek dari sudut pandang subjek itu sendiri dengan tidak mengabaikan membuat tafsiran, dengan membuat skema konseptual.

1.6.2 Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data perlu ditentukan terlebih dahulu parameter penelitian, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, penjarangan informasi dari responden, serta pencatatan data.

- Parameter penelitian

Parameter digunakan untuk membatasi lingkup penelitian. Dengan demikian bidang penelitian akan lebih terfokus dan tidak berkembang luas ke sana ke mari, sehingga tidak mengaburkan masalah yang sebenarnya. Selain itu parameter ini juga berguna untuk menegaskan setting, dimana lokasi penelitian ini dilakukan (Abdul Aziz dalam Bungin, 2003 : 44).

Dalam penelitian ini parameter yang digunakan mengacu pada situasi yang bersangkutan, yang terdiri dari unsur :

- ⇒ Lokasi, dalam hal ini adalah tempat dimana peremajaan lingkungan permukiman kumuh pernah dilakukan, yaitu Kelurahan Mojosongo, khususnya RW I – XII.
- ⇒ Pelaku, dalam hal ini lebih menitikberatkan pada keterlibatan perempuan dalam pengelolaan prasarana lingkungan. Namun, perlu juga dilakukan tinjauan tentang peran masyarakat secara keseluruhan.
- ⇒ Aktivitas, dalam hal ini adalah apa yang dilakukan pelaku yaitu kegiatan pengelolaan prasarana lingkungan setempat.

- Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara, yaitu sebagai berikut :

⇒ Pengumpulan data primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan pengamatan/ observasi, dalam hal ini dibantu dengan alat bantu untuk mencatat atau merekam kejadian/ aktivitas yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Selain itu juga dilakukan wawancara untuk mendapatkan informasi tentang peran serta perempuan dalam kegiatan pengelolaan prasarana lingkungan. Wawancara ini dilakukan secara informal, sehingga informasi yang diinginkan dapat berkembang namun juga tidak bias.

⇒ Pengumpulan data sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menelaah dokumen yang berkaitan dengan penelitian, yaitu dokumen yang dikeluarkan dinas/ badan/ lembaga yang berwenang. Dokumen ini diperlukan sebagai pembanding keabsahan data.

- *Purposive Sampling*

Dalam menentukan teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam suatu penelitian, ada tiga hal yang harus selalu diperhatikan yaitu biaya, tenaga dan waktu. Dalam suatu penelitian biasanya populasi yang diteliti banyak jumlahnya, sehingga tidak mungkin mampu meneliti semuanya. Untuk itu diperlukan penarikan beberapa contoh/ sampel dari populasi tadi. Pengambilan contoh tersebut dinamakan *sampling*.

Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* (pengambilan sampel bertujuan). Tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada ke dalam ramuan konteks yang unik (Moleong, 2002 : 165). Dalam *purposive sampling*, orang-orang yang dijadikan sebagai sampel dikatakan sebagai informan, yaitu orang yang menjadi pelaku, terlibat, berperan secara langsung maupun tidak langsung, ataupun mengetahui permasalahan yang ada.

Sampel tujuan dapat ditandai dari ciri-ciri sebagai berikut (Moleong; 2002 : 165):

1. Sampel tidak dapat ditentukan atau ditarik terlebih dahulu.
2. Pemilihan sampel secara berurutan, tujuannya memperoleh variasi sebanyak-banyaknya hanya dapat dicapai apabila pemilihan satuan sampel dilakukan jika satuan sebelumnya sudah dijaring dan dianalisis.
3. Penyesuaian berkelanjutan dari sampel.
4. Pemilihan berakhir jika sudah terjadi pengulangan.

Berdasarkan ciri sampel bertujuan di atas, maka dalam penelitian ini jumlah sampel tidak dapat ditentukan secara pasti. Adapun pemilihan sampel berakhir apabila data yang diinginkan dari responden sudah terjadi pengulangan.

- **Catatan Lapangan**

Catatan lapangan adalah catatan yang memuat segala data yang didapatkan dari kegiatan survey. Catatan lapangan ini terdiri dari deskripsi objektif tentang segala sesuatu yang terjadi, dan juga komentar, tafsiran, refleksi, pemikiran, dan pandangan peneliti tentang objek yang diamati.

Dalam membuat catatan lapangan ini, perlu dibuat suatu pengkodean dan kategorisasi data. Pengkodean adalah cara sistematis agar dapat diperoleh gambaran tentang keseluruhan sehingga data yang diperlukan mudah dicari kembali (Nasution, 1988 : 134-135). Kode-kode tersebut dapat berupa :

- a) Sumber asal informasi seperti catatan lapangan, laporan, dokumen, dan sebagainya.
- b) Penandaan jenis responden pada wawancara.
- c) Penandaan cara pengumpulan data.

Selanjutnya dilakukan kategorisasi, yaitu pengelompokan informasi yang didapat ke dalam bagian-bagian isi yang secara jelas berkaitan (Moleong, 2002 : 193). Kelompok yang ditentukan dapat sebagai berikut :

- Kategori 1, kelompok pertanyaan tentang kondisi umum prasarana lingkungan permukiman Kelurahan Mojosongo
- Kategori 2, kelompok pertanyaan tentang kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat di Kelurahan Mojosongo
- Kategori 3, kelompok pertanyaan tentang peran wanita dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, ekonomi, dan pengelolaan prasarana lingkungan di Kelurahan Mojosongo

1.6.3 Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data atau disebut juga verifikasi data diperlukan agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Cara yang dilakukan dalam memeriksa keabsahan data adalah dengan membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara.

Selain itu dapat juga dengan membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain yang memiliki latar belakang yang berbeda, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2002 : 178).

1.6.4 Teknik Analisis

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan (Singarimbun, 1995). Analisis yang akan dipergunakan dalam kajian ini adalah teknik analisis kualitatif yang bersifat deskriptif, berkaitan dengan isu gender dan peran serta perempuan dalam pengelolaan prasarana lingkungan permukiman di Mojosongo Surakarta.

Adapun definisi “Analisis Kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2002 : 3). Analisis kualitatif ini berusaha untuk menjelaskan beberapa fakta dalam hubungan sebab akibat tersebut, diperlukan keterangan tertulis atau lisan dari laporan yang merupakan terjadinya masalah dimaksud, dan bagaimana pemecahannya, Subagyo (1991) menyatakan sebagai berikut: “Analisis kualitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data baik berupa data kualitatif maupun kuantitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi., uraian dan bentuk bahasa prosa, kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru atau atau menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.

Mengacu pendapat di atas, dengan demikian teknik analisis data kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terhadap analisis data, baik yang diperoleh dari dokumen maupun analisis wawancara dalam setiap variabel penelitian yang diwujudkan dalam bentuk penjelasan atau keterangan, yang didukung oleh data lapangan dan informasi yang memperkuat penjelasan dimaksud. Dengan demikian akan diperoleh suatu kebenaran dalam hasil penelitian yang dilakukan.

Data yang telah diperoleh melalui wawancara mengenai kondisi sosial ekonomi perempuan, bentuk dan peran serta perempuan dalam pengelolaan prasarana lingkungan, tingkat peran serta perempuan dan faktor-faktor pendukung dan penghambat peran serta perempuan dalam pengelolaan prasarana lingkungan di Kelurahan Mojosongo Surakarta kemudian diolah dengan menggunakan teknik analisa deskriptif. Pengertian deskriptif tidak hanya sekedar menemukan data atau fakta dan kemudian menyajikannya dalam bentuk mentah, kemudian penafsirannya diserahkan kepada pembaca yang berminat, melainkan juga melakukan analisis serta menyajikan data dan fakta yang sudah terolah beserta penafsirannya. Lebih lanjut teknik ini digunakan untuk menganalisa data dengan cara:

- Mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul,
- Menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada,
- Menggambarkan proses yang sedang berlangsung,
- Menggambarkan kecenderungan atau pendapat yang sedang berkembang.

Berdasarkan hasil tersebut akan dapat dilakukan penafsiran terhadap data dan akan diperoleh kesimpulan dari fenomena yang sedang berlangsung. Deskripsi ini dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan pengelompokan jawaban-jawaban dari responden.

Apabila data telah terkumpul, maka dilakukan klasifikasi data menjadi 2 (dua) kelompok yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data yang dihasilkan kemudian diolah melalui proses pengecekan, pemberi tanda, simbol, kode bagi tiap-tiap data sesuai dengan pengelompokannya dan sesuai kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta pengelompokan data dengan cara yang teliti dan teratur, kemudian dihitung dan dijumlahkan berapa banyak gejala, peristiwa, item dan lain-lain yang termasuk dalam satu kategori. Data kualitatif yang diperoleh dari wawancara kemudian dilakukan pengelompokan jawaban untuk diberi kode sebelum diproses lebih lanjut untuk diketahui distribusi frekuensinya. Data yang bersifat kualitatif, digambarkan hasilnya dengan kata-kata atau kalimat, dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan sedemikian rupa hingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi.

Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yaitu melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas dan sebagainya. Data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian dikelompokkan jawabannya dan diberi kode untuk selanjutnya diproses agar diketahui frekuensinya.

2. Penyajian data

Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Tetapi sekarang, penyajian data dapat berupa tabel, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian dapat dilihat fenomena apa yang sedang terjadi. Pada studi ini, penyajian data lebih banyak menggunakan tabel-tabel untuk menunjukkan distribusi frekuensi.

3. Menarik kesimpulan

Dari permulaan pengumpulan data, mulai dilakukan arti pencarian informasi, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Melalui kegiatan penelitian, kesimpulan yang mula-mula belum jelas kemudian menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan akhir mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan dan metode pencarian ulang yang digunakan dalam kecakapan peneliti.

Berdasarkan uraian di atas, ketiga kegiatan tersebut diatas merupakan kegiatan yang saling terkait pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar. Dengan perkataan lain, ketiga jenis kegiatan tersebut dan kegiatan pengumpulan data merupakan proses siklus dan interaktif.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini dibagi menjadi beberapa bab-bab yang menguraikan :

Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang; permasalahan dan rumusan masalah; tujuan dan sasaran; ruang lingkup kajian dan wilayah; kerangka penelitian; metode pendekatan studi dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka Isu Gender dan Peran Serta Perempuan dalam Pengelolaan Prasarana Lingkungan

Berisi teori-teori yang terkait dengan konteks penelitian ini, antara lain tentang konsep gender, perbedaan peran gender yang melahirkan ketidakadilan terhadap perempuan, perempuan dalam kultur Jawa, pemeliharaan lingkungan permukiman kumuh, serta beberapa pendekatan peran serta perempuan dalam pembangunan.

Bab III Gambaran Kondisi Fisik dan Prasarana Lingkungan Permukiman di Kelurahan Mojosongo

Bab ini berisi gambaran perkembangan lingkungan di Kota Surakarta; gambaran umum Kelurahan Mojosongo dan diakhiri dengan gambaran umum kawasan yang telah diremajakan di Mojosongo.

Gambaran tersebut meliputi kondisi wilayah sebelum peremajaan, pelaksanaan peremajaan dan kondisi wilayah sesudah diremajakan atau pemeliharaan prasarana pasca peremajaan.

Bab IV Analisis Serta Peran Perempuan dalam Pengelolaan Prasarana Pasca Peremajaan Lingkungan Permukiman

Bab ini berisi tentang bentuk peran serta perempuan dalam pengelolaan prasarana lingkungan di Mojosongo Surakarta, tingkat peran serta perempuan dalam pengelolaan prasarana lingkungan di Mojosongo Surakarta, faktor-faktor pendukung dan penghambat peran serta perempuan di Mojosongo Surakarta dan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan yang ada. Dan pada akhirnya dapat diketahui temuan-temuan unggulan dari adanya peran wanita dalam pengelolaan prasarana permukiman di Kelurahan Mojosongo.

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi

Di dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian tersebut. Selain itu juga dipaparkan temuan-temuan unggulan dari hasil analisis yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA ISU GENDER DALAM PENGELOLAAN PRASARANA LINGKUNGAN

2.1 Konsep Gender

Gender sejak dua dasa warsa terakhir telah menjadi bahasa yang memasuki setiap analisis sosial menjadi pokok bahasan dalam wacana perdebatan mengenai perubahan sosial serta menjadi topik penting dalam setiap perbincangan mengenai pembangunan. Namun apa sesungguhnya yang dimaksud dengan gender dan mengapa dikaitkan dengan usaha emansipasi kaum perempuan? untuk itu diperlukan penjelasan mengenai konsep gender.

Kata 'gender' sering diartikan sebagai kelompok laki-laki, perempuan, atau perbedaan jenis kelamin. Untuk memahami kata gender, harus dibedakan dengan kata seks atau jenis kelamin. Seks mengandung arti perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan yang secara biologis memiliki perbedaan dan ciri-ciri sendiri. Maksudnya adalah laki-laki dan perempuan merupakan makhluk yang secara kodrati memiliki fungsi-fungsi organisme yang berbeda, yang secara permanen tidak dapat berubah dan tidak dapat dipertukarkan. Secara struktur biologis atau jenis kelamin, manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan yang masing-masing memiliki alat dan fungsi biologis yang melekat serta tidak dapat dipertukarkan (Handayani dan Sugiarti, 2002 : 4-5).

Konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan.

Bentukan sosial atas laki-laki dan perempuan itu antara lain : kalau perempuan dikenal sebagai makhluk yang lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Sifat-sifat di atas dapat dipertukarkan dari waktu ke waktu.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa gender dapat diartikan sebagai konsep sosial yang membedakan (dalam arti : memilih atau memisahkan) peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena antara keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, tetapi dibedakan atau dipilah-pilah menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan (Handayani dan Sugiarti, 2002 : 6).

Sementara itu menurut Julia C. Mosse dalam buku Gender dan Pembangunan (1996 : 3-4), pengertian gender adalah seperangkat peran atau perilaku yang telah ditentukan oleh masyarakat bagi kita untuk menjadi laki-laki dan perempuan dalam suatu lingkungan sosial. Setiap masyarakat mempunyai suatu 'naskah' untuk diikuti oleh anggotanya dimana mereka harus memainkan peran feminin atau maskulin. Hal itu mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga dan sebagainya. Julia C. Mosse juga menambahkan bahwa suatu masyarakat dapat memiliki naskah yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, tetapi nilai inti dari suatu kultur, yang mencakup peran gender berlangsung dari generasi ke generasi seperti halnya bahasa (Mosse, 1996 : 4).

Salah satu hal yang menarik mengenai peran gender adalah, peran-peran itu berubah seiring waktu dan berbeda antara satu kultur dengan kultur lainnya. Peran itu juga amat dipengaruhi oleh kelas sosial, usia dan latar belakang etnis. Gender juga dapat menentukan akses kita terhadap pendidikan, kerja, alat-alat dan sumber daya yang diperlukan untuk industri dan ketrampilan. Gender bisa menentukan kesehatan, harapan hidup, dan kebebasan gerak kita. Yang jelas, gender ini akan menentukan seksualitas, hubungan dan kemampuan kita untuk membuat keputusan dan bertindak secara otonom. Gender bisa jadi merupakan satu-satunya faktor terpenting dalam membentuk kita akan menjadi apa nantinya. Untuk dapat lebih memahami konsep gender, maka di bawah ini disajikan tabel yang menunjukkan perbedaan antara makna konsep gender dengan seks.

Tabel II.1
Perbedaan Konsep Gender dan Seks

No.	Karakteristik	Gender	Seks
1	Sumber pembeda	Manusia (masyarakat)	Tuhan
2	Visi, misi	Kebiasaan	Kesetaraan
3	Unsur pembeda	Kebudayaan (tingkah laku)	Biologis (alat reproduksi)
4	Sifat	Harkat, martabat dapat dipertukarkan	Kodrat tertentu, tidak dapat dipertukarkan
5	Dampak	Terciptanya norma-norma /ketentuan tentang 'pantas' atau 'tidak pantas' laki-laki pantas menjadi pemimpin perempuan 'pantas' dipimpin dll, sering merugikan salah satu pihak, kebetulan adalah perempuan.	Terciptanya nilai-nilai kesempurnaan, kenikmatan, kedamaian, dll. Sehingga menguntungkan kedua belah pihak
6	Ke-berlaku-an	Dapat berubah, musiman dan berbeda antara kelas	Sepanjang masa, dimana saja, tidak mengenal pembedaan kelas

Sumber : Handayani dan Sugiarti, 2002

Konsep gender yang berkembang di masyarakat melahirkan perbedaan yang biasanya dibakukan dalam suatu aturan masyarakat. Untuk selanjutnya, hal itu menimbulkan persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang umumnya menimpa kaum perempuan.

2.1.1 Perbedaan Gender Melahirkan Ketidakadilan terhadap Perempuan

Seperti dikatakan sebelumnya bahwa terdapat perbedaan peran gender yang berlaku di masyarakat. Sejarah perbedaan gender (*gender difference*) antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses sosialisasi, penguatan dan konstruksi sosial kultural, keagamaan, bahkan melalui kekuasaan negara. Melalui proses yang cukup panjang sehingga gender lambat laun menjadi seolah-olah ketentuan Tuhan atau kodrat dan ketentuan biologis yang tidak dapat diubah lagi (Handayani dan Sugiarti, 2002 : 9-10).

Sesungguhnya perbedaan gender (*gender difference*) tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun persoalannya tidaklah sesederhana yang dipikirkan, ternyata perbedaan gender tersebut telah melahirkan berbagai ketidakadilan baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan. Ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur dimana kaum lelaki dan perempuan menjadi korban dari sistem itu. Guna memahami bagaimana perbedaan gender telah berakibat pada ketidakadilan gender tersebut dapat dipahami melalui berbagai manifestasi ketidakadilan tersebut (Handayani dan Sugiarti, 2002 : 16-20).

a. Gender dan Marginalisasi Perempuan

Bentuk manifestasi ketidakadilan gender adalah proses marginalisasi atau pemiskinan terhadap kaum perempuan. Marginalisasi atau disebut juga pemiskinan ekonomi. Ada beberapa mekanisme proses marginalisasi kaum perempuan karena perbedaan gender. Dari segi sumbernya bisa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsiran agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Sesungguhnya banyak proses di dalam masyarakat dan negara yang memarginalkan masyarakat, seperti proses eksploitasi namun ada salah satu bentuk pemiskinan yang berakibat hanya pada jenis kelamin tertentu (perempuan) yang disebabkan oleh keyakinan gender. Ada berbagai macam dan bentuk, serta mekanisme proses marginalisasi perempuan akibat dari ideologi tersebut. Dari segi sumbernya dapat dipilah menjadi sumber kebijakan pemerintah, keyakinan atau tafsiran keagamaan, tradisi atau kebiasaan, bahkan asumsi ilmu pengetahuan.

b. Gender dan Subordinasi Pekerjaan Perempuan

Subordinasi adalah anggapan tidak penting dalam keputusan politik. Perempuan tersubordinasi oleh faktor-faktor yang dikonstruksikan secara sosial. Hal ini disebabkan karena belum terkondisikan konsep gender dalam masyarakat yang mengakibatkan adanya diskriminasi kerja bagi perempuan. Anggapan sementara perempuan itu irrasional atau emosional, sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, dan berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Perempuan diidentikkan dengan jenis-jenis pekerjaan tertentu.

Diskriminasi yang diderita oleh kaum perempuan pada sektor prosentase jumlah pekerja perempuan, penggajian, pemberian fasilitas, serta beberapa hak-hak perempuan yang berkaitan dengan kodratnya yang belum terpenuhi. Agar perempuan tidak tersubordinasi lagi, maka perempuan harus mengejar berbagai ketinggalan dari lelaki untuk meningkatkan kemampuan kedudukan, peranan, kesempatan, dan kemadirian, serta ketahanan mental spiritualnya. Dengan demikian perempuan mampu berperan bersama laki-laki sebagai mitra sejajar yang selaras, serasi, seimbang yang ditujukan dalam kehidupan nyata sehari-hari.

Bentuk subordinasi terhadap perempuan yang menonjol adalah bahwa semua pekerjaan yang dikategorikan sebagai reproduksi dianggap lebih rendah dan menjadi subordinasi dari pekerjaan produksi yang dikuasai kaum lelaki. Hal ini menyebabkan banyak lelaki dan perempuan sendiri akhirnya menganggap bahwa pekerjaan domestik dan reproduksi lebih rendah dan ditinggalkan. Subordinasi terhadap jenis pekerjaan perempuan ini ternyata tidak hanya terjadi di rumah tangga, juga terproyeksi di tingkat masyarakat dan tempat pekerjaan.

c. Gender dan Stereotip atas Pekerjaan Perempuan

Stereotip adalah pelabelan terhadap suatu kelompok atau jenis pekerjaan tertentu. Stereotip adalah bentuk ketidakadilan. Secara umum stereotipi merupakan pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu, dan biasanya pelabelan ini selalu berakibat kepada ketidakadilan, sehingga dinamakan pelabelan negatif.

Hal ini disebabkan pelabelan yang sudah melekat pada laki-laki, misalnya adalah manusia yang kuat, rasional, jantan dan perkasa. Sedangkan perempuan adalah makhluk yang lembut, cantik, emosional atau keibuan.

Dengan adanya pelabelan tersebut tentu saja akan muncul banyak stereotip yang oleh masyarakat sebagai hasil hubungan sosial tentang perbedaan lelaki dan perempuan. Oleh karena itu perempuan identik dengan pekerjaan-pekerjaan di rumah, maka peluang perempuan untuk bekerja di luar rumah sangat terbatas, bahkan ada juga yang berpendidikan tidak pernah menerapkan pendidikannya untuk mengaktualisasikan diri. Akibat adanya stereotip (pelabelan) ini banyak tindakan-tindakan yang seolah-olah sudah merupakan kodrat.

d. Gender dan Kekerasan Terhadap Perempuan

Dalam hampir semua kelompok masyarakat, terdapat perbedaan tugas dan peran sosial atas laki-laki dan perempuan. Tanpa disadari, perbedaan tugas dan peran ini telah menghambat potensi dasar laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal. Realitas ini menunjukkan bagaimana jenis kelamin telah menghambat seseorang untuk mempelajari ilmu pengetahuan tertentu, mengembangkan bakat dan minat dalam bidang tertentu, dan sebagainya, semata-mata karena alasan bahwa hal itu lebih pantas (secara sosial budaya) bagi jenis kelamin tertentu. Jika diperhatikan bahwa kekerasan yang terjadi pada perempuan merupakan kekerasan yang disebabkan adanya keyakinan gender.

Bentuk kekerasan ini tidak selalu terjadi antara laki-laki terhadap perempuan akan tetapi antara perempuan dengan perempuan atau bahkan antara perempuan dan laki-laki. Meskipun demikian perempuan menjadi lebih rentan karena posisinya yang pincang di mata masyarakat baik secara ekonomi, sosial maupun politik. Posisi perempuan pada umumnya dianggap lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

Kekerasan terhadap perempuan sering terjadi karena budaya dominasi laki-laki terhadap perempuan. Kekerasan digunakan oleh laki-laki untuk memenangkan perbedaan pendapat, untuk menyatakan rasa puas, dan seringkali hanya untuk menunjukkan bahwa laki-laki berkuasa atas perempuan. Pada dasarnya kekerasan yang berbasis gender adalah refleksi dari sistem patriarki yang berkembang di masyarakat.

e. Gender dan Beban Kerja Lebih Berat

Dengan berkembangnya wawasan kemitrasejajaran berdasarkan pendekatan gender dalam berbagai aspek kehidupan, maka peran perempuan mengalami perkembangan yang cukup cepat. Namun perlu dicermati bahwa perkembangan perempuan tidaklah “mengubah” perannya yang “lama” yaitu peranan dalam lingkup rumah tangga (peran reproduktif). Maka dari itu perkembangan peranan perempuan ini sifatnya menambah, dan umumnya perempuan mengerjakan peranan sekaligus untuk memenuhi tuntutan pembangunan. Untuk itulah maka beban kerja perempuan terkesan berlebihan.

Karena adanya anggapan bahwa perempuan bersifat memelihara, rajin dan tidak akan menjadi kepala rumah tangga, maka akibatnya semua pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Sehingga perempuan menerima beban ganda, selain harus bekerja domestik, mereka masih harus bekerja membantu mencari nafkah. Bagi golongan kelas kaya, beban kerja ini kemudian dilimpahkan kepada pembantu rumah tangga (*domestic worker*). Mereka inilah yang sesungguhnya menjadi korban dari bias gender di masyarakat. Mereka bekerja berat, tanpa perlindungan dan kebijakan negara. Selain tanpa perlindungan hubungan mereka bersifat feodalistik dan perbudakan, serta masalahnya belum bisa secara transparan dilihat oleh masyarakat luas.

2.1.2 Gender dan Struktur Sosial

Pengaruh gender dalam struktur sosial dapat dilihat dari budaya pada suatu masyarakat. Di satu sisi struktur sosial dapat dilihat melalui peran yang dimainkan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Pada sisi lain struktur sosial dapat dilihat pada status sosial kelompok-kelompok dalam masyarakat, seperti distribusi kekayaan, penghasilan, kekuasaan dan prestise. Struktur sosial yang berkembang dalam masyarakat di dalam lintasan sejarah, perempuan ditempatkan di dalam posisi minoritas. Sementara itu, ketimpangan status berdasarkan jenis kelamin bukan sesuatu yang bersifat universal.

Tinjauan yang dilakukan di beberapa wilayah yang berbeda budaya masyarakatnya, seperti dilakukan oleh Julia C. Mosse (1996 : 62-64), menunjukkan bahwa subordinasi terhadap gender perempuan dalam struktur sosial memiliki tingkatan yang berbeda pula. Beberapa contoh kasus tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- Kebanyakan orang yang lahir dan besar di negara-negara utara dengan tradisi demokrasi liberal, diyakini dapat melakukan apa saja yang ingin dilakukan, dan berlaku dengan cara tertentu karena mereka telah memilihnya. Maka secara teori, setiap langkah kehidupan terbuka bagi perempuan di Utara. Namun, pada saat yang sama, mereka terus menerus diingatkan bahwa peran utamanya adalah menjadi istri dan ibu.
- Di beberapa negara termasuk Indonesia, berlaku sistem patriarki, yang mana diartikan bahwa kepala rumah tangga laki-laki memiliki kekuasaan hukum dan ekonomi yang mutlak atas anggota keluarga laki-laki dan perempuan yang menjadi tanggungannya. Pengertian yang paling mutakhir, istilah 'patriarki' mulai digunakan di seluruh dunia untuk menggambarkan dominasi laki-laki atas perempuan dan anak-anak di dalam keluarga dan ini berlanjut kepada dominasi laki-laki dalam semua lingkup kemasyarakatan lainnya.

2.2 Gender sebagai Isu Pembangunan

Istilah gender yang sering diangkat hanya soal perempuan. Dalam pelatihan gender pun misalnya, seolah hanya perlu diikuti oleh perempuan. Analisis gender muncul pada waktu kaum sosialis menanggapi pandangan dari kaum feminis radikal.

Feminisme radikal mengangkat permasalahan ketidakadilan terhadap perempuan dari aspek budaya yang dikuasai kaum laki-laki (patriarki) (Murniati, 2004 :96). Ternyata, perbedaan antara seks dan gender mempunyai implikasi yang sangat penting, karena manusia berkembang sebagai hasil konstruksi sosial. Dalam memperbaiki kehidupan, masyarakat perlu memahami perbedaan seks dan gender. Perbedaan seks tidak otomatis sejalan dengan perbedaan gender karena gender merupakan hasil sosialisasi masyarakat yang dapat berbeda karena waktu, tempat dan kemauan masyarakat untuk mengubah. Sedangkan perbedaan seks biologis dan universal. Perbedaan gender menghasilkan pemberian peran gender pada laki-laki dan perempuan oleh masyarakat sesuai dengan kehendaknya.

Konstruksi sosial perbedaan peran gender telah memberikan pengertian mendasar (ideologi) bagi laki-laki dan perempuan. Ternyata dalam proses kehidupan masyarakat, terjadi ketimpangan dan ketidakadilan gender (Murniati, 2004 : 97-99).

1. Ketidakadilan gender dalam hubungan kerja: perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai peran dalam produksi benda atau jasa, di sektor publik dari tingkat lingkungan sampai tingkat pemerintah. Tetapi, tugas-tugas yang berhubungan dengan fungsi reproduksi masyarakat, pekerjaan-pekerjaan domestik, hampir selalu menjadi tanggung jawab perempuan. Akibatnya, jam kerja perempuan jauh lebih panjang dibanding laki-laki. Pekerjaan reproduksi dianggap rendah dan tidak dinilai ekonomis, padahal pekerjaan domestik ini merupakan pekerjaan mempersiapkan tenaga kerja masyarakat.

2. Ketidakadilan gender dalam hubungan dengan sumber alam dan manfaatnya: perbedaan gender sangat mencolok. Perempuan melakukan 2/3 dari pekerjaan dunia, tetapi hanya menerima 1/10 pendapatan dunia. Pemakaian sumber alam dan manfaat serta pengawasannya, ditetapkan menurut istilah gender yang telah terkonstruksi secara sosial. Dalam beberapa masyarakat, perempuan tidak boleh memiliki tanah. Akibatnya, untuk menanam bahan pangan, mereka harus bergantung kepada bapak, suami atau saudara laki-laki. Dalam masyarakat lainnya, perempuan tidak boleh mengikuti kursus pemberantasan buta aksara, dengan alasan bahwa perempuan sudah banyak pekerjaannya. Setiap harinya, jumlah jam kerja perempuan lebih banyak dari jumlah jam kerja laki-laki, tetapi tidak diperhitungkan secara ekonomi.
3. Ketidakadilan gender dalam kaitannya dengan hak asasi. Hak asasi perempuan tidak diakui di dunia. Dalam pembicaraan hak asasi, tidak otomatis hak asasi perempuan termasuk di dalamnya. Kenyataan ini membuktikan bahwa perempuan tidak mempunyai hak pribadi, meskipun untuk menentukan fungsi reproduksi sendiri. Perempuan tidak memiliki hak untuk menentukan hidupnya sendiri, karena dipaksa kawin misalnya. Perempuan tidak dapat menentukan jenis pekerjaan, karena mereka sudah ditentukan dengan pekerjaan domestiknya. Dalam banyak kebudayaan yang mempunyai mitos pemotongan alat kelamin perempuan atau perusakan badan, perempuan secara terus-menerus atau bahkan dibunuh sebagai bagian dari upacara adat.

Politik pembangunan Indonesia sekarang ini memperhatikan ketidakadilan gender tersebut. Oleh karena itu, masih terjadi diskriminasi dan berbagai ketidakadilan terhadap perempuan. Padahal jumlah penduduk Indonesia sendiri lebih separuhnya adalah perempuan. Situasi ini sangat menantang perempuan Indonesia.

2.3 Perempuan dalam Pandangan Kultur Jawa

Kultur Jawa sering dianggap tidak kenal demokrasi. Salah satu sebabnya adalah tradisi kebudayaan Jawa merupakan tradisi kerajaan, tradisi absolutisme. Akan tetapi, sungguh menarik jika kemudian justru ditemukan pola kesetaraan dalam masyarakat Jawa, yang condong menempatkan kedudukan setiap anggota keluarga (suami atau istri) dalam posisi yang kurang lebih seimbang. Bahkan kedudukan serta peran seorang ibu dianggap penting dalam masyarakat Jawa karena kaum ibu tidak hanya mengasuh dan mendidik anak serta mendampingi suami, tetapi juga diperkenankan untuk keluar rumah melakukan kegiatan ekonomi (Handayani dan Novianto, 2004 : 12-13).

Kenyataan tersebut sejalan dengan pendapat Engels bahwa wanita hanya bisa melepaskan diri dari kekuasaan patriarkal apabila berperan secara ekonomi. Jika peranan wanita dalam ekonomi keluarga jauh lebih berarti dibandingkan suami maka wanita akan mempunyai kekuasaan, pengaruh, kekuatan, posisi tawar yang baik, serta kebebasan yang sama dengan suaminya. Sementara itu Koentjoroningrat memberikan pernyataan yang sedikit berbeda, yaitu dominasi wanita melalui jaringan yang terjadi di dalam keluarga, wanita lebih dominan dalam urusan rumah tangga, sedangkan laki-laki tidak berfungsi.

Dalam kultur Jawa, masyarakat menyebut perempuan dengan ‘wanita’, yang maknanya berasal dari kata *wani* (berani) dan *ditata* (diatur). Artinya, seorang wanita adalah sosok yang berani ditata atau diatur. Dalam kehidupan praktis masyarakat Jawa, wanita adalah sosok yang selalu mengusahakan keadaan tertata sehingga untuk itu pula dia harus menjadi sosok yang berani ditata. Sementara itu, seorang ahli filsafat UGM Damardjati Supadjar mengungkapkan bahwa kata ‘wanita’ berasal dari kata *wani* (berani) dan *tapa* (menderita). Artinya, wanita adalah sosok yang berani menderita bahkan untuk orang lain (Handayani dan Novianto, 2004 : 24).

Karakter wanita Jawa sangat identik dengan kultur Jawa, seperti bertutur kata halus, tenang, diam/kalem, tidak suka konflik, mementingkan harmoni, menjunjung tinggi nilai keluarga, mampu mengerti dan memahami orang lain, sopan, pengendalian diri tinggi/terkontrol, daya tahan untuk menderita tinggi, memegang peranan secara ekonomi, dan setia/loyalitas tinggi (Handayani dan Novianto, 2004 : 130). Dalam masyarakat Jawa juga muncul konsep paternalistik, yang memandang bahwa istri adalah *konco wingking*. Jadi secara publik atau formal baik berdasarkan persepsi laki-laki ataupun wanita Jawa sendiri, ide tentang wanita tetap ‘subordinat’ atau dalam hal ini derajat wanita dipandang lebih rendah. Namun seiring berjalannya waktu, hal itu tidak selalu berlaku dalam kenyataan sehari-hari. *Konco wingking* misalnya, menjadi orang yang berada di belakang itu tidak selalu lebih buruk, lebih rendah, dan kurang menentukan.

Berdasarkan hasil penelitian dinyatakan bahwa secara umum wanita diharapkan untuk mengambil peran subordinat, kecuali posisi mereka disahkan oleh keturunan (diturunkan) karena ketiadaan laki-laki atau perkawinan. Dengan demikian, wanita memiliki kesempatan yang terbatas untuk menjadi pemimpin, yaitu hanya pada lingkup institusi-institusi wanita, seperti perkumpulan mahasiswi, perawat, dan semua sekolah wanita. Dampaknya adalah keterbatasan kemampuan wanita untuk berpartisipasi secara efektif dalam tim manajemen, akibat kurangnya pengalaman wanita dalam memimpin tim (Handayani dan Novianto, 2004 : 169).

Selama ini terdapat perbedaan peran laki-laki dan perempuan ke dalam dua wilayah, yaitu wilayah publik dan privat. Wilayah publik terdiri atas pranata publik, negara, pemerintahan, pendidikan, media, dunia bisnis, kegiatan perusahaan perbankan, agama, dan kultur, yang mana di hampir semua masyarakat di dunia ini didominasi laki-laki. Yang jelas, ada perempuan individu yang memasuki dan mungkin pada akhirnya memimpin pranata semacam itu, namun dimana-mana tidak ada perempuan sebagai satu kelompok yang menjalankan kekuasaan dan pengaruh di wilayah publik dalam cara yang sama seperti yang dilakukan laki-laki.

Suku, kelas, dan agama mungkin memainkan peran besar, yang menjadikan akses perempuan terhadap kekuasaan lebih kecil dibandingkan laki-laki dari latar belakang yang sama. Ini berimplikasi penting terhadap praktik pembangunan untuk memastikan bahwa pembangunan tidak berat sebelah serta menguntungkan perempuan maupun laki-laki. Karena perempuan tidak terwakili dengan semestinya dalam lingkup publik, mereka kurang mampu menjalankan kekuasaan dan mempengaruhi kesejahteraan gendernya (Mosse, 1996 : 106).

Konsep tersebut di atas, ternyata tidak sama dengan kenyataan yang terdapat dalam masyarakat Jawa. Memang selama ini wanita Jawa tidak mempunyai status yang sah ataupun peran yang penting dalam ruang publik atau formal, seperti untuk ikut berbicara dalam bidang politik dan pengaturan kebijaksanaan umum. Ditambah lagi dengan karakter wanita Jawa yang cenderung pasif, tenang, dan tidak suka memberontak, maka dimungkinkan bahwa wanita Jawa akan selalu berada dalam posisi subordinat. Namun pada kenyataannya, para wanita Jawa membangun kekuasaan tidak dengan melawan kekuasaan tetapi justru bermain di dalam ruang kekuasaan itu sendiri. Dalam hal ini ruang kekuasaan yang diharapkan wanita terlibat di dalamnya adalah ruang domestik atau keluarga/rumah tangga.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran wanita Jawa dalam berbagai aspek kehidupan sangat besar. Namun peran tersebut nyaris tidak dapat disentuh oleh suatu konstruksi teori ilmiah dari sudut pandang Barat. Hal itu disebabkan peran wanita mendominasi ruang domestik (keluarga/rumah tangga), yang kemudian efeknya berlanjut ke ruang publik. Denys Lombard bahkan menambahkan bahwa para ibu di Indonesia, yakni kaum wanita, jelas memegang peranan penting yang sangat menonjol, bahkan kedudukannya lebih tinggi daripada wanita pada masyarakat Asia lainnya. Mereka memiliki kekuasaan dan pengaruh yang besar, meskipun berada di belakang layar, tetapi tetap ampuh dan bersumber pokok pada kelompok perkumpulan mereka (Handayani dan Novianto, 2004 : 14).

2.4 Perempuan dan Pembangunan

Pada bab ini, pembahasan akan lebih menitikberatkan pada peran perempuan dalam pembangunan. Selain juga tentang pengaruh pembangunan itu sendiri terhadap peningkatan kesejahteraan perempuan.

2.4.1 Pendekatan Perempuan dalam pembangunan

Banyak program yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka kesejahteraan perempuan. Namun jika diperhatikan program tersebut belum memberikan implikasi kepada perempuan secara menyeluruh. Disamping itu, belum ada kesiapan dari pengambil kebijakan untuk merancang program yang benar-benar memberdayakan kaum perempuan secara makro. Berbagai pendekatan yang telah dilakukan oleh pemerintah mulai dari WID, WAD dan GAD akan dibahas pada uraian berikut ini (Handayani dan Sugiarti, 2002 : 38-43).

a. Pendekatan WID (*Women In Development*)

Berkenaan dengan pola pemikiran modern, didapatkan bahwa pembangunan merupakan proses kemajuan yang berjalan secara linier dan pasti. Dalam kenyataannya, posisi perempuan tertinggal dalam proses pembangunan, baik sebagai pelaku, objek maupun pemanfaat pembangunan. Hal ini terjadi di hampir seluruh negara-negara di dunia internasional, terutama negara-negara berkembang. Untuk meningkatkan peran kaum perempuan dalam pembangunan, serta adanya pengakuan atas potensi perempuan dalam pembangunan, maka sejak tahun 1970-an banyak lembaga dan organisasi keuangan mulai mengalokasikan dana untuk membiayai program-program khusus bagi perempuan.

Women in Development berarti terintegrasikannya perempuan dalam pelaksanaan dan proses pembangunan. Ketertinggalan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan disebabkan oleh tidak dilibatkannya perempuan karena berbagai alasan, baik alasan klasik seperti peran subordinat perempuan maupun alasan-alasan yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial budaya. Dalam dunia pemikiran sosial dikenal istilah peran domestik dan peran publik. Peran domestik adalah peran-peran dalam hubungan dengan kerumahtanggaan, keluarga dan tugas-tugas rutin di rumah sehari-hari. Peran domestik ini seringkali menjadi tugas dan tanggung jawab perempuan. Sebaliknya peran publik berkaitan dengan dunia di luar rumah, baik dalam pekerjaan formal, kemasyarakatan, dan sosial ekonomi banyak diidentikkan dengan dunia kaum laki-laki. Pemikiran asuntif seperti inilah menjadikan perempuan kurang berperan dalam sektor publik yang termasuk di dalamnya merupakan bagian dari proses pembangunan. Untuk lebih meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan maka ditempuhlah strategi dengan pendekatan WID.

Pendekatan WID lebih mengarah pada upaya-upaya terhadap peranan perempuan agar lebih dapat terintegrasikan dalam pembangunan. Pendekatan WID berusaha mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan, artinya melibatkan perempuan dalam proses pembangunan. Secara konkret WID menekankan pada cara atau strategi yang perlu ditempuh untuk membela kaum perempuan agar mendapat kesempatan untuk berpartisipasi yang sama dengan laki-laki dalam pemerolehan kesempatan pendidikan, pekerjaan, dan beberapa aspek kehidupan bermasyarakat yang lain.

Program-program yang dapat diterapkan untuk pelaksanaan pendekatan WID adalah program-program yang dapat menghasilkan pendapatan bagi perempuan. Untuk lebih mendorong perempuan memasuki dunia publik, maka diperlukan beberapa persyaratan antara lain pendidikan dan ketrampilan. Untuk itu implikasinya dengan pemberian kesempatan belajar dalam jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi akan lebih memberikan kemampuan intelektual dan ketrampilan bagi perempuan. Diharapkan dengan pemberian pendidikan ini, perempuan dapat mewakili kemampuan kognitif, efektif dan psikomotorik yang menunjang sektor-sektor produktif atau publik di masyarakat. Selain pendidikan juga pemberian bekal ketrampilan, baik melalui lembaga-lembaga formal maupun non formal. Diharapkan melalui pendidikan ketrampilan akan memberikan nilai tambah bagi perempuan dalam mencari penghasilan atau menambah keluarga. Program yang lain antara lain pemberian fasilitas kesejahteraan sosial seperti pemenuhan kebutuhan kesehatan bagi perempuan.

b. Pendekatan WAD (*Women and Development*)

WAD singkatan dari *Women and Development* (Perempuan dan Pembangunan). Kata penghubung 'dan' menunjukkan pada pengertian kesejajaran antara kata 'perempuan' dan 'pembangunan'. Kalau pendekatan WID menekankan terintegrasinya perempuan dalam pembangunan, maka WAD lebih mengarah pada hubungan antara perempuan dan proses pembangunan. Jadi setelah WID terimplementasi, pembicaraan beralih pada bagaimana hubungan atau keterkaitan antara perempuan dan proses pembangunan.

Dalam pendekatan WAD tidak dibahas letak kedudukan laki-laki dan perempuan. Sudah ada pemahaman bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan, kesempatan dan peran yang sejajar. Oleh karena itu masalahnya sekarang bagaimana posisi laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Hal ini sangat berkorelasi dengan situasi negara. Pada beberapa negara berkembang atau beberapa negara yang tergolong dalam jajaran dunia ketiga, peran laki-laki dan perempuan dalam posisi yang ter subordinasi secara struktur internasional. Khususnya mereka yang berada dalam golongan kelas sosial bawah.

Pendekatan WAD tampaknya lebih kritis dari pada WID, tetapi WAD kurang dapat menjawab hubungan patriarki yang terjadi dalam corak produksi masyarakat. WAD akan berhasil menaikkan peran perempuan apabila ditunjang oleh struktur politik yang lebih stabil dan merata, baik dalam skala maksimal nasional maupun internasional. Implementasi pendekatan WAD dititik beratkan pada pengembangan kegiatan peningkatan pendapatan tanpa memperhatikan unsur waktu yang digunakan oleh perempuan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan berada di luar tugas dan tanggung jawab unsur domestik. Kegiatan domestik berada di luar jalur kegiatan pembangunan. Oleh karena WAD menekankan pada hubungan antara laki-laki dan proses pembangunan maka implementasinya adalah ukuran produktivitasnya adalah ukuran produktivitas perempuan baik secara kesempatan maupun kemauan yang dimiliki. Kesamaan yang dimiliki WID dan WAD yaitu sama-sama dalam kerangka ekonomi dan politik negara.

c. Pendekatan GAD (*Gender and Development*)

Setelah kita mengetahui arti pendekatan WID dan WAD yang berorientasi pada aspek sosial dan politik, maka pendekatan GAD (*Gender and Development*) lebih menekankan pada orientasi hubungan sosial. Seperti kita ketahui bahwa gender dapat dimaknai sebagai hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, bukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara jenis kelamin. Gender lebih mengarah pada hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan. Hubungan ini dikonstruksi baik secara sosial maupun budaya. Kenyataan klasik yang sering kita dengar adalah perempuan berada dalam hubungan yang ter subordinasi dengan laki-laki. Pendekatan GAD lebih menekankan bagaimana hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan.

Pendekatan GAD muncul pada dekade 1980-an sebagai salah satu implementasi dari WID. GAD muncul dari teori bahwa sektor dan reproduksi merupakan kausalitas penindasan terhadap kaum perempuan. Pandangan bahwa perempuan cenderung diartikan pada peran domestik dan bukan pada sektor publik merupakan ditempatkannya perempuan pada posisi yang subordinat. Pendekatan GAD menitikberatkan analisisnya pada jawaban atas pertanyaan : mengapa perempuan ditempatkan pada peran-peran yang inferior di masyarakat? Untuk menjawabnya perlu pendekatan holistik atau menyeluruh tentang aspek-aspek kehidupan manusia. Untuk dapat mengetahui posisi perempuan dalam masyarakat perlu ditinjau kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya. Jadi pendekatan holistik dipakai untuk memahami posisi perempuan dalam suatu masyarakat, termasuk di dalamnya proses pembangunan.

Dalam pendekatan GAD, posisi perempuan diletakkan dalam konstruksi sosial gender serta pemberian peran tertentu pada perempuan maupun laki-laki. Laki-laki berperan atau terlibat dalam penempatan posisi perempuan. Artinya nasib kaum perempuan turut dipikirkan oleh laki-laki. Laki-laki turut berperan serta dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan perempuan. Hal inilah yang disebut dengan hubungan gender.

Dalam kerangka makro peran negara sangat berpengaruh terhadap penempatan posisi perempuan. Bagaimana partisipasi pemerintah atau negara terhadap emansipasi perempuan? Kalau diperhatikan dalam GBHN telah tersirat peran perempuan dalam pembangunan bangsa. Hal ini memperlihatkan bahwa peranan negara dalam memberikan tempat bagi perempuan. Oleh sebab itulah dalam pendekatan GAD, perempuan berada dalam posisi "*agent of change*" atau berperan aktif sebagai agen perubahan, tidak sekedar hanya sebagai objek pembangunan atau penerima program pembangunan secara pasif. Karena itu program pembangunan memfokuskan pada relasi gender, ketimbang memfokuskan pada kaum perempuan saja.

Dengan demikian agenda GAD tidak hanya sekedar menjawab kebutuhan praktis, untuk mengubah kondisi kaum perempuan, melainkan juga menjawab kebutuhan strategis kaum perempuan, yakni memperjuangkan perubahan posisi kaum perempuan, termasuk konter hegemoni dan konter *discourse* terhadap ideologi gender yang mengakar dalam keyakinan baik kaum perempuan maupun kaum lelaki.

Pendekatan GAD secara implementatif cenderung mengarah pada adanya komitmen pada perubahan struktural. Oleh sebab itulah pelaksanaan GAD memerlukan dukungan sosial budaya masyarakat dalam politik nasional yang menempatkan perempuan sejajar dengan laki-laki. GAD tidak mungkin terlaksana bila dalam politik suatu negara masih menempatkan perempuan dalam posisi yang inferior dan subordinatif.

Sementara itu menurut Caroline Moser (dalam Mosse, 1996 : 200), wanita mempunyai arti yang sangat penting bagi pembangunan, namun selama ini hal itu terabaikan. Oleh karena itu, ia mengemukakan suatu gagasan tentang tiga hal yang dibutuhkan perempuan dari pembangunan, yaitu sebagai berikut :

- Pengakuan terhadap nilai ekonomi kerja perempuan yang dibayar dan tidak dibayar
- Pengakuan bahwa sebagian besar pembangunan berpengaruh merugikan kepada perempuan
- Argumen bahwa pengejaran persamaan, di pasar dan di rumah, akan menyelesaikan masalah ini

Selanjutnya Moser mengemukakan tiga pendekatan untuk meningkatkan peran perempuan terhadap pembangunan. Pendekatan tersebut adalah sebagai berikut (Mosse, 1996 : 200-213) :

a. Pendekatan Antikemiskinan (*anti-poverty approach*)

Pendekatan antikemiskinan menitikberatkan perhatian guna menghasilkan pendapatan bagi perempuan melalui akses yang lebih baik terhadap sumber daya produktif, seperti tanah dan kredit.

Sejak 1970an, proyek peningkatan pendapatan bagi perempuan miskin berkembang laksana jamur di musim hujan, dan menjadi salah satu bentuk paling lazim dari kegiatan pembangunan, khususnya jenis pembangunan yang didukung NGOs. Kebanyakan dari proyek ini bertujuan meningkatkan produktivitas kerja yang telah dilakukan perempuan. Misalnya, pemasaran atau produksi makanan berskala kecil. Namun secara keseluruhan, proyek peningkatan pendapatan bagi perempuan jarang diperlakukan seserius proyek bagi laki-laki. Tetapi proyek tersebut mungkin juga menawarkan kemungkinan memberdayakan perempuan (Mosse, 1996 : 204).

Pendekatan ini dapat dikatakan sejalan dengan pendekatan WID, karena memiliki inisiatif/tujuan yang hampir sama, yaitu menekankan peningkatan sisi produktif kerja dan tenaga perempuan, khususnya untuk menghasilkan pendapatan.

b. Pendekatan Efisiensi (*efficiency approach*)

Pendekatan efisiensi terhadap perempuan dalam pembangunan digambarkan dengan baik oleh dua dokumen yang diterbitkan oleh Bank Dunia dan ODA Inggris. Kedua dokumen tersebut secara garis besar menyatakan keyakinan terhadap satu hal penting bahwa pembangunan hanya akan efisien bila perempuan dilibatkan. Catatan Moser tentang pendekatan efisiensi menjelaskan bahwa pendekatan itu memiliki 'implikasi bagi perempuan tidak hanya sebagai penghasil keturunan, tetapi juga semakin meningkat menjadi manajer komunitas.

Keterlibatan perempuan sangat penting bagi efisiensi dalam suatu proyek pembangunan karena mereka sering lebih efisien dan setia dibanding laki-laki. Namun demikian, keterlibatan perempuan lebih banyak karena elastisitas waktu perempuan (karenanya kerugian bagi perempuan dalam istilah waktu yang dibutuhkan dari mereka mungkin sangat berat). Selain itu, kebijakan pembangunan pada tingkat makro menuntut efisiensi dan produktivitas, sehingga langkah yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengubah biaya dari perekonomian dibayar ke perekonomian tak dibayar. Langkah tersebut cenderung memanfaatkan buruh perempuan yang tidak dibayar. Pendekatan efisiensi sejalan dengan pendekatan WAD, yang cenderung menitikberatkan kepada kegiatan yang mendatangkan pendapatan dan kurang mengindahkan tenaga perempuan yang disumbangkan dalam mempertahankan keluarga dan rumah tangga (Mosse, 1996 : 207-209).

c. Pendekatan Pemberdayaan (*empowerment approach*)

Satu-satunya pendekatan perempuan terhadap pembangunan yang melihat semua aspek kehidupan perempuan dan semua kerja yang dilakukan perempuan (kerja produktif, reproduktif, privat, dan publik) dan menolak upaya apapun untuk menilai rendah pekerjaan mempertahankan keluarga dan rumah tangga, mulai dikenal sebagai 'pemberdayaan', atau secara lebih umum, pendekatan Gender dan Pembangunan (*Gender and Development/GAD*) terhadap perempuan dalam pembangunan.

Pemberdayaan lebih terkait dengan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom up*) daripada pendekatan dari atas ke bawah (*top down*), dan kebanyakan pemikiran tentang pemberdayaan datang dari tulisan feminis dan gerakan perempuan yang muncul di Selatan. Pendekatan ini melacak akar-akar subordinasi dalam ras, kelas, sejarah kolonial, dan posisi negara-negara Selatan dalam tata ekonomi internasional. Pendekatan ini memahami tujuan pembangunan bagi perempuan dalam pengertian kemandirian dan kekuatan internal, dan sedikit banyak lebih menekankan pada pembuatan undang-undang yang berkenaan dengan kesamaan antara laki-laki dan perempuan daripada pemberdayaan perempuan itu sendiri untuk berusaha mengubah dan mentransformasikan struktur yang sangat bertentangan dengan mereka, seperti undang-undang perburuhan, kontrol laki-laki atas tubuh dan hak reproduktif perempuan, undang-undang sipil, dan hak atas kekayaan (Mosse, 1996 : 209-210).

2.4.2 Gerakan Perempuan dan Pembangunan

Di Indonesia, kata “pembangunan” dapat dimasukkan dalam kategori jaringan yang menjadi kata kunci dalam segala hal. Masuknya kaum perempuan pada kelompok kaum buruh, menimbulkan gagasan untuk meningkatkan potensi perempuan dalam bersaing. Perempuan dipandang sebagai tenaga yang kurang mampu bersaing, karena kurang produktif dibanding laki-laki. Kemudian muncul strategi perempuan dalam pembangunan yang dinamakan *Women in Development* (WID) dengan perempuan dipandang sebagai masalah, karena kurang mampu bersaing dan untuk itu perlu dididik (Murniati, 2004 : 103).

Oleh karena perempuan merupakan lebih dari separuh sumber produksi, maka pendidikan perempuan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, sehingga pembangunan menjadi efektif. Perempuan dilibatkan dalam proses pembangunan, tetapi otonomi perempuan sama sekali diabaikan. Sebenarnya, kaum perempuan telah berperan penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Pekerjaan yang dilakukan kaum perempuan di sektor domestik dan publik, telah berfungsi untuk mempertahankan eksistensi masyarakat. Ini berarti, perempuan telah ikut berperan mendukung eksistensi struktur masyarakat internasional yang timpang.

2.4.3 Akses Perempuan dalam Program Pembangunan

Secara *de jure* pengakuan akan pentingnya perempuan dalam pembangunan telah tersurat dalam GBHN 1993, 2000. Namun pada kenyataannya perempuan berkecenderungan dijadikan objek dalam program pembangunan. Perempuan belum dapat berperan secara maksimal baik sebagai pelaku maupun penikmat pembangunan. Hal ini disebabkan pemahaman tentang perempuan hanya sebatas peran domestik (privat) sehingga kurang diperhatikan dalam pengambilan kebijakan. Disamping itu juga diperjelas dengan berkembangnya budaya patriarki yang menempatkan peran laki-laki sebagai makhluk yang berkuasa dengan berangkat pada pelabelan terhadap dirinya. Kondisi ini secara tidak langsung akan mempengaruhi kesenjangan perempuan sebagai warga bangsa untuk ikut akses dalam program pembangunan.

Dalam hal gender kesenjangan ini adanya perbedaan akses antara perempuan dan lelaki terhadap sumber daya. Lebih rendahnya akses mereka terhadap sumber daya semua contoh sumber daya, juga tenaga kerja mereka sendiri menyebabkan produktivitas perempuan cenderung lebih rendah dari lelaki. Selain itu, dalam banyak komunitas perempuan diberi tanggung jawab melaksanakan hampir semua pekerjaan-pekerjaan domestik sehingga ia tidak cukup waktu lagi untuk mengurus dan meningkatkan kemampuan dirinya. Adapun akar penyebab kesenjangan akses atas sumber daya adalah diskriminasi sistematis melalui penyadaran. Untuk membangun kesadaran terhadap perempuan dapat dilakukan melalui proses pendidikan. Dengan aktif bertindak dan berpikir sebagai pelaku, dengan terlibat langsung dalam permasalahan yang nyata, maka akan terbangun suasana dialogis (Handayani dan Sugiarti, 2002 : 25).

Pada akhirnya kondisi ini akan menumbuhkan kesadaran yang menjauhkan seseorang dari “rasa takut akan kemerdekaan” (*fear freedom*). Dengan menolak penguasaan dan penindasan maka tiba pada pengakuan akan pentingnya peran proses penyadaran. Menyadari bahwa pendidikan merupakan suatu proses yang terus-menerus, maka proses penyadaran akan selalu ada dan merupakan proses yang sejati (*inherent*) dalam keseluruhan proses pendidikan itu sendiri. Jadi proses penyadaran merupakan proses inti atau hakikat dari proses pendidikan. Dunia kesadaran seseorang memang tidak boleh berhenti, ia terus berproses dan berkembang dan meluas dari satu tahap ke tahap berikutnya, dari tingkat “kesadaran naif” sampai ke tingkat “kesadaran kritis”, sampai ke tingkat kesadaran yang paling tinggi dan terdalam yakni “kesadarannya kesadaran”.

2.4.4 Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Indonesia

Heterogenitas perempuan Indonesia disebabkan oleh status ekonomi, etnis, pendidikan dan pengalaman masa lampau (budaya). Dengan demikian, bermacam-macam watak perempuan memerlukan rancangan khusus. Dalam berbagai penetapan pemerintah Orde Baru, sesungguhnya telah ditetapkan berbagai konsepsi dasar mengenai perempuan dalam pembangunan (Murniati, 2004 : 110), sebagai berikut:

1. Hak-hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki di dalam segala aspek kehidupan di semua aktivitas pembangunan.
2. Peran harmoni perempuan pada keluarga dan masyarakat.
3. Hormat pada martabat perempuan dan perlindungan bagi fungsi ciri-ciri biologis khusus (reproduksi) perempuan.
4. Mengembangkan suasana sosial budaya yang menguntungkan dan meningkatkan kecakapan perempuan untuk partisipasi yang lebih luas dalam pembangunan.
5. Mendorong LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) untuk lebih berpartisipasi, di antaranya gerakan kesejahteraan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
6. Meningkatkan peran orang tua untuk mendidik anak.

Pada sisi lain, pemerintah Orde Baru juga memiliki beberapa program peningkatan peran perempuan yang menjadi bagian integral dari pembangunan nasional. Upaya itu bisa dilihat dalam konteks program: (1) Pengurangan kemiskinan, (2) Meningkatkan kualitas sumber daya perempuan, (3) Pembangunan yang merata, (4) Pembangunan ekonomi yang cepat, (5) Partisipasi masyarakat luas, (6) Stabilitas nasional yang kuat, serta (7) Pembangunan yang lestari.

Berbicara tentang partisipasi, terdapat beberapa tingkatan yang menurut Arnstein (dalam Panudju, 1999 : 72-76) terbagi menjadi 8 tipologi, yaitu sebagai berikut :

1. *Manipulation* atau manipulasi

Tingkatan partisipasi ini adalah yang paling rendah, karena masyarakat hanya dipakai namanya sebagai anggota dalam berbagai badan penasehat *advising board*. Dalam hal ini tidak ada partisipasi masyarakat yang sebenarnya dan tulus, tetapi diselewengkan dan dipakai sebagai alat publikasi dari pihak penguasa.

2. *Therapy* atau penyembuhan

Istilah ini diambil dari *group therapy* atau kelompok penyembuhan. Dengan berkedok melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, para perancang memperlakukan anggota masyarakat seperti proses penyembuhan pasien penyakit jiwa dalam *group therapy*. Meskipun masyarakat terlibat dalam banyak kegiatan, pada kenyataannya kegiatan tersebut lebih banyak untuk mengubah pola pikir masyarakat yang bersangkutan daripada mendapatkan masukan atau usulan-usulan mereka.

3. *Informing* atau pemberian informasi

Memberi informasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka, tanggung jawab dan berbagai pilihan, dapat menjadi langkah pertama yang sangat penting dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat. Meskipun demikian yang sering terjadi penekanannya lebih pada pemberian informasi satu arah dari pihak pemegang kuasa kepada masyarakat.

Tanpa adanya kemungkinan untuk memberikan umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat. Dalam keadaan semacam ini, terutama bila informasi diberikan pada saat-saat terakhir perencanaan, masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana program tersebut agar dapat menguntungkan mereka. Alat-alat yang sering dipergunakan untuk komunikasi searah adalah media berita, pamflet, poster, dan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan.

4. *Consultation* atau konsultasi

Mengundang opini masyarakat, setelah memberikan informasi kepada mereka, dapat merupakan langkah penting dalam menuju partisipasi penuh dari masyarakat. Akan tetapi, bila konsultasi dengan masyarakat tersebut disertai dengan cara-cara partisipasi lain, cara ini tingkat keberhasilannya rendah, karena tidak adanya jaminan bahwa kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan. Metode yang sering dipergunakan adalah *attitude surveys* atau survei tentang arah pikir masyarakat, *neighbourhood meeting* atau pertemuan lingkungan masyarakat dan *public hearing* atau dengar pendapat dengan masyarakat.

5. *Placation* atau perujukan

Pada tingkat ini masyarakat mulai mempunyai beberapa pengaruh meskipun beberapa hal masih tetap ditentukan oleh pihak yang mempunyai kekuasaan. Dalam pelaksanaannya beberapa anggota masyarakat yang dianggap mampu dimasukkan sebagai anggota dalam badan-badan kerja sama pengembangan kelompok masyarakat bersama wakil-wakil dan berbagai instansi pemerintah.

Dengan sistem ini usul-usul atau keinginan dari masyarakat berpenghasilan rendah dapat dikemukakan. Namun, seringkali suara dari masyarakat tersebut tidak diperhitungkan karena kemampuan dan kedudukannya yang relatif lebih rendah, atau jumlah mereka terlalu sedikit bila dibanding dengan anggota-anggota instansi pemerintah yang lain.

6. *Partnership* atau kemitraan

Pada tingkat ini, atas kesepakatan bersama, kekuasaan dalam berbagai hal dibagi antara pihak masyarakat dengan pihak pemegang kekuasaan. Dalam hal ini disepakati bersama untuk saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijaksanaan dan pemecahan berbagai masalah yang dihadapi. Setelah adanya kesepakatan tentang peraturan dasar tersebut maka tidak dibenarkan adanya perubahan-perubahan yang dilakukan secara sepihak oleh pihak manapun.

7. *Delegated power* atau pelimpahan kekuasaan

Pada tingkat ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana atau program tertentu. Pada tahap ini masyarakat mempunyai kewenangan untuk memperhitungkan bahwa program-program yang akan dilaksanakan bermanfaat bagi mereka. Untuk memecahkan perbedaan yang muncul, pemilik kekuasaan yang dalam hal ini adalah pemerintah harus mengadakan tawar-menawar dengan masyarakat dan tidak dapat memberikan tekanan-tekanan dari atas.

8. *Citizen control* atau masyarakat yang mengontrol

Pada tingkat ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Mereka mempunyai kewenangan penuh di bidang kebijaksanaan, aspek-aspek pengelolaan dan dapat mengadakan negosiasi dengan “pihak-pihak luar” yang hendak melakukan perubahan.

Bagaimana perempuan Indonesia berpartisipasi dalam pembangunan masih harus dicermati, terutama pada tataran praktisnya, bagaimana perempuan Indonesia selama ini diperlukan oleh pemerintahnya. Banyak bukti menunjukkan, bagaimana proses pembangunan itu sendiri bukan saja paradoksal, melainkan juga kontraproduktif bagi pertumbuhan apresiasi terhadap sumber daya perempuan dalam pembangunan.

2.4.5 Penerapan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan

Apa yang dilakukan oleh Orde Baru dalam penerapan kebijakan pemberdayaan perempuan, dapat dijadikan contoh, bagaimana perempuan hanya menjadi objek dari pembangunan semata. Program integrasi bagi partisipasi perempuan pada pembangunan yang dinamakan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), dapat dilihat sebagai contoh kebijakan Orde Baru dalam pemberdayaan perempuan. Selanjutnya, dapat dianalisis bagaimana cara kerja dari program tersebut (Murniati, 2004 : 112).

Program kerja ini dilaksanakan melalui organisasi perempuan pada tingkat akar rumput, seperti PKK, yang merupakan kelompok utama dalam pergerakan perempuan di Indonesia zaman Orde Baru. PKK ini dikontrol oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri. Para istri gubernur merupakan ketua PKK di setiap provinsi secara otomatis. Demikian pula, istri bupati, istri camat, istri lurah adalah ketua PKK pada masing-masing tingkatannya. Program datang dari atas, dan harus dilaksanakan sampai di tingkat akar rumput. Ada beberapa penyesuaian pada tiap wilayah, namun penyesuaian itu tidak menguntungkan kepada rakyat, khususnya yang ada di pulau-pulau luar Jawa.

Sebenarnya, dalam Repelita keenam, 1993-1998, memiliki objek khusus bagi perempuan untuk berpartisipasi, sehingga meningkatkan kualitas perempuan dan menciptakan budaya sosial yang mendukung perkembangan perempuan sebagai individu maupun dalam relasi sosialnya. Suasana sosial budaya diperlukan untuk memproses kesadaran gender, sebagaimana perencanaan ini telah memasukan perspektif gender. Namun, sosialisasi dan praktik perspektif gender ini tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Pengembangan kualitas perempuan sebagai sumber daya manusia mengalami banyak hambatan pada ekonomi, sosial, budaya masyarakat akar rumput itu sendiri, disamping tata laksana penyelenggaraan program memerlukan manajemen komunikasi yang lebih baik. Untuk melaksanakan program pemberdayaan ini, harus ada aktivitas-aktivitas pendidikan wajib bagi anak usia 9 tahun, pendidikan sains dan teknologi, pendidikan, kesehatan dan nutrisi beserta fasilitas-fasilitasnya.

Pada kenyataannya, program pemberdayaan untuk pengembangan kualitas perempuan dan perlindungan buruh bisa dilakukan melalui aktivitas pendidikan kejuruan, pendidikan teknologi, pelatihan untuk koperasi, manajemen dan hukum.

Pada sektor sosial, gerakan perempuan masih berada dalam posisi tawar-menawar pada masyarakat. Menurut budaya (tradisi, etnis), posisi perempuan masih subordinat (bagian atau di bawah). Gerakan sosial budaya sedang berproses sebagaimana gerakan sosial, namun masih terdapat ambiguitas. Di satu sisi, perempuan diharapkan sebagai agen perubahan, di sisi lain perempuan merupakan penghalang. Dalam pembentukan ambiguitas ini, interpretasi agama juga mempunyai pengaruhnya (Murniati, 2004 : 113-114).

Kelompok-kelompok independen yang kemudian dikenal dengan sebutan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) itu, secara aktif meningkatkan peranan dan posisi perempuan pada pembangunan sektor informal. Mereka mengembangkan kecakapan perempuan mendapatkan kapital. Menciptakan pasar, latihan ketrampilan manajerial, keterampilan teknis dalam perdagangan, rancangan ekspansi perusahaan dan membangun jaringan bisnis (jaringan perdagangan yang adil).

Berbagai LSM perempuan juga mengorganisasikan buruh perempuan. Mereka menjadi buruh perempuan dalam masalah hukum dan organisasi, kesadaran gender, kepemimpinan. Ada pula LSM yang bergerak di bidang buruh ringan serta berbagai bentuk pendampingan legal untuk perempuan, kesehatan dan reproduksi, serta program-program pendidikan nonformal perempuan pada perspektif gender dan mengelola WCC-WIC (*Women Crisis Centre-Women Information Centre*) (Murniati, 2004 : 114).

Namun, semuanya itu tak bisa menutupi kenyataan bahwa penguatan perempuan di segala sektor, masih merupakan sebuah rancangan. Berbagai individu perempuan yang tumbuh sebagai pribadi yang kuat, tidaklah mengidentifikasi bahwa masalah kesetaraan perempuan sudah selesai sampai di sini, karena dalam konstruksi sosial masyarakat, tidak ada perubahan signifikan dalam memandang partisipasi perempuan dalam pembangunan ini. Apalagi pemerintah sendiri.

2.5 Pengelolaan Lingkungan Permukiman Kumuh

Yang dimaksud dengan pengelolaan lingkungan adalah usaha secara sadar untuk memelihara atau dan untuk memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Karena persepsi tentang kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup secara manusiawi, tidak sama untuk semua golongan masyarakat dan berubah-ubah dari waktu ke waktu, maka pengelolaan lingkungan haruslah bersifat lentur. Pengelolaan lingkungan ini penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi. Karena makin tinggi kualitas lingkungan, maka makin banyak pula keuntungan yang dapat diambil dari lingkungan sekaligus semakin besar daya dukung lingkungan terhadap masyarakat (Soemarwoto, 1997 : 43).

Gambaran tentang lingkungan permukiman kumuh adalah lingkungan permukiman yang kondisi tempat tinggal atau tempat huniannya berdesakan, luas rumah tidak sebanding dengan jumlah penghuni, rumah berfungsi sekedar tempat istirahat dan melindungi diri dari panas, dingin dan hujan, lingkungan dan tata permukiman tidak teratur, bangunan sementara, acak-acakan tanpa perencanaan.

Ditambah lagi, prasarana kurang fasilitas sosial kurang, mata pencaharian penghuni tidak tetap dan usaha non-formal, tanah bukan milik penghuni, pendidikan rendah, rawan kebakaran, banjir dan rawan terhadap timbulnya penyakit.

Salah satu upaya untuk mengatasi lingkungan permukiman kumuh tersebut adalah dengan melaksanakan peremajaan permukiman kumuh. Peremajaan permukiman kumuh diartikan sebagai pembongkaran sebagian atas seluruh permukiman kumuh yang sebagian besar atau seluruhnya berada di atas tanah negara dan kemudian di tempat yang sama dibangun prasarana dan fasilitas lingkungan serta bangunan-bangunan lainnya yang sesuai dengan rencana tata ruang kota yang bersangkutan. dalam peremajaan lingkungan kumuh dianut pola tidak menggusur warga, bahkan harus meningkatkan pendapatan mereka (Komarudin, 1997 : 91). Peremajaan lingkungan permukiman kumuh harus dapat memecahkan masalah kumuh secara mendasar. Dalam peremajaan lingkungan permukiman kumuh, perlu dilakukan penelitian tentang sikap, perilaku, dan pandangan masyarakat di lingkungan tersebut.

Peran serta perempuan dalam pengelolaan prasarana lingkungan permukiman dapat diketahui dari aktivitas masyarakat yang ikut terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan kegiatan di lingkungan permukimannya. Keinginan untuk berperan tersebut karena mereka ingin dipandang sebagai milik dari suatu kelompok atau masyarakat, tidak ingin dilihat sebagai orang yang penyendiri, karena adanya niat untuk membentuk dan mempertahankan harga diri, ingin memperoleh otonomi sebesar-besarnya, tanggung jawab, serta kekuasaan untuk menentukan keputusan pada pekerjaannya (Salusu, 1998 : 18).

2.6 Rumusan Teoritis

Berdasarkan kajian mengenai peran serta perempuan dan pembangunan, dapat dibuat suatu rumusan berdasarkan literatur yang relevan untuk membantu menjelaskan fenomena yang diangkat dalam penelitian ini.

Konsep gender merupakan konsep yang membedakan peran antara laki-laki dan perempuan, yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial budaya dari suatu lingkungan masyarakat. Dengan demikian, setiap lingkungan masyarakat yang berbeda, baik secara kelas sosial, etnis, maupun budaya, maka jenis peran laki-laki dan perempuan yang ditentukan juga berbeda.

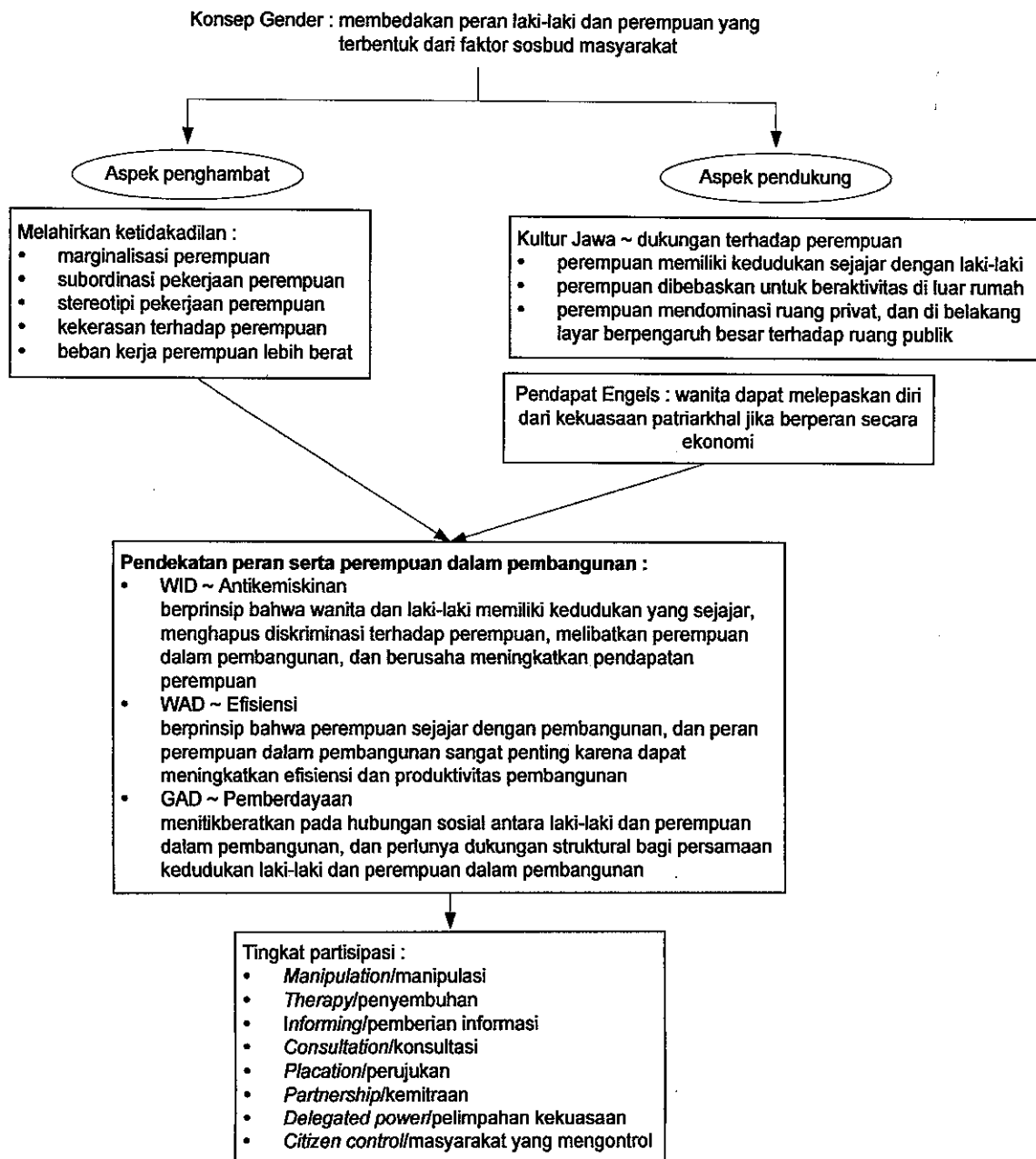
Adanya pembedaan gender tersebut melahirkan ketidakadilan, yang khususnya terjadi pada perempuan. Ketidakadilan tersebut diantaranya berupa marginalisasi perempuan, subordinasi pekerjaan perempuan, stereotipi pekerjaan perempuan, kekerasan terhadap perempuan, dan beban kerja perempuan lebih berat. Perlakuan tersebut tidak hanya sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga seringkali berlangsung dalam proses pembangunan.

Sementara itu, dalam kultur Jawa perempuan ditempatkan pada posisi yang tinggi, atau dapat dikatakan telah sejajar dengan kaum pria. Selain sebagai istri dan ibu dalam suatu keluarga/ rumah tangga, wanita Jawa dibebaskan untuk beraktivitas di luar rumah, terutama untuk melakukan kegiatan ekonomi. Dukungan yang diberikan oleh kultur Jawa terhadap perempuan tersebut merupakan peluang bagi perempuan untuk melepaskan diri dari kekuasaan patriarkhal.

Dalam kehidupan sosial, perempuan lebih banyak berperan dalam wilayah privat, yaitu dalam keluarga atau rumah tangga. Sementara untuk wilayah publik lebih banyak dikuasai oleh laki-laki. Meskipun terdapat beberapa perempuan yang mampu menduduki posisi yang penting dalam wilayah publik, tetapi masih sangat jarang suatu kelompok perempuan yang dapat mendominasi wilayah publik.

Permasalahan kaum perempuan berakar dari rendahnya kualitas sumber daya kaum perempuan itu sendiri, hal tersebut mengakibatkan kaum perempuan tidak mampu bersaing dengan kaum laki-laki dalam masyarakat termasuk dalam pembangunan. Padahal apabila perempuan mampu mengembangkan kemampuan yang dimilikinya, maka bukan tidak mungkin apabila perempuan dapat lebih diterima masyarakat, khususnya untuk memasuki ruang publik. Hal ini diperkuat dengan pendapat Engels, bahwa peran wanita secara ekonomi dapat membantu perempuan melepaskan diri dari kekuasaan patriarkhal.

Pembangunan selalu mempunyai dampak berbeda terhadap siapa yang diuntungkan, tidak saja mereka yang berada pada kelas pengambil kebijakan, melainkan ternyata pembangunan juga berbeda bagi kaum laki-laki yang lebih positif dibandingkan terhadap kaum perempuan. Kenyataan ini menempatkan perempuan pada posisi yang terpinggirkan dari proses pembangunan.



Sumber : Hasil Analisis, 2005

GAMBAR 2.1
Rumusan Teoritis

BAB III

GAMBARAN KONDISI FISIK DAN PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN KELURAHAN MOJOSONGO

3.1 Tinjauan Program Perbaikan Lingkungan Permukiman di Surakarta

Di Surakarta program perbaikan lingkungan permukiman telah dimulai pada tahun 1983 / 1984 dengan pelaksanaan program perbaikan kampung melalui *Urban Development Project V*, yang dilaksanakan pada tanggal 28 kampung seluas 400 ha, program ini menggunakan bantuan dana Bank Dunia (IBRD) bersama-sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di tahun 1983 / 1984 sampai dengan tahun 1987 / 1988. Pada saat itu program perbaikan lingkungan yang dilaksanakan hanya mempertimbangkan mengenai peningkatan infrastruktur fisik saja sebagai upaya untuk mengurangi penurunan kualitas lingkungan di kampung-kampung berkepadatan tinggi dan golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Program perbaikan lingkungan yang ada belum menyentuh faktor ekonomi dan faktor sosial.

Kemudian program perbaikan lingkungan permukiman kumuh dilanjutkan dengan program KIP tahun 1991 sampai dengan tahun 1993 melalui program KIP tahap III yang meliputi 9 kampung seluas 160 ha. Selanjutnya pada bulan September 1993 Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Pekerjaan Umum, Dirjen Cipta Karya Direktorat Bina Program menetapkan program yang dikenal dengan SSUDP (*Semarang Surakarta Urban Development Program*) yang menetapkan Surakarta sebagai bagian dari pembangunan perkotaan terpadu bersama dengan kota Semarang.

Program perbaikan lingkungan kumuh kembali dilaksanakan melalui program perbaikan kampung atau *Kampung Improvement Project (KIP)*. Sebagai program yang merupakan bagian dari SSUDP kota Surakarta. Lokasi program perbaikan kampung SSUDP terletak di daerah yang telah di studi dan berdasarkan kriteria yang dibuat oleh Cipta Karya. Lokasi yang dimaksud termasuk lokasi yang pernah mendapat program perbaikan kampung sebelumnya dan lokasi kampung yang belum pernah mendapatkan program perbaikan kampung.

Salah satu program yang dilaksanakan adalah peremajaan lingkungan permukiman di Mojosongo. Pada program peremajaan SSUDP ini tidak saja memperhatikan perbaikan kualitas fisik lingkungan saja, namun mulai memperhatikan perbaikan masalah-masalah sosial ekonomi masyarakat. Program ini telah mulai menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam program perbaikan lingkungan permukiman. Masyarakat mulai dilibatkan dalam setiap tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penggunaan dan pemeliharaan.

Peremajaan lingkungan permukiman yang salah satunya dilakukan di Kelurahan Mojosongo adalah peremajaan yang dilakukan di atas tanah negara. Hal ini memerlukan pengaturan lebih lanjut. Mengingat setiap lingkungan memiliki karakteristik fisik dan social ekonomi yang berbeda, sehingga memerlukan model peremajaan lingkungan yang berbeda pula.

Untuk tujuan peningkatan kualitas fisik dan sosial ekonomi tersebut maka pada program perbaikan kampung SSUD menggunakan strategi berdasarkan tiga unsur penting perbaikan lingkungan yang disebut dengan TRIBINA yaitu bina lingkungan, manusia dan usaha.

3.2 Gambaran Umum Kelurahan Mojosongo

Pembahasan mengenai gambaran umum Kelurahan Mojosongo mencakup dua hal, yaitu kondisi fisik yang terdiri dari letak, batas dan luas wilayah, topografi dan penggunaan lahan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat, struktur sosial masyarakat, paguyuban masyarakat, dan sikap masyarakat dalam pengelolaan lingkungannya.

3.2.1 Kondisi Fisik Wilayah

a. Letak, Batas, dan Luas Wilayah

Kelurahan Mojosongo secara administrasi termasuk dalam wilayah Kecamatan Jebres Kota Surakarta, memiliki luas wilayah 532,927 Ha dan merupakan kelurahan dengan wilayah terluas di Surakarta terdiri dari 31 RW dengan batas wilayah sebelah utara berbatas dengan Kabupaten Karanganyar, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Jebres, dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kadipiro

b. Topografi

Wilayah daerah Surakarta sebagian besar terdiri atas dataran rendah dengan kemiringan 0 – 8 % atau perbedaan tinggi 0 – 3 meter. Sementara untuk topografi wilayah Kecamatan Mojosongo sendiri agak bergelombang dengan kemiringan 15%. Berada di bagian utara Kali Anyar dengan ketinggian rata-rata 112 m dpl dan terbagi dalam 31 RW serta 149 RT. Kondisi topografi ini ditambah tanah yang kurang stabil di beberapa tempat merupakan salah satu penghambat dalam kegiatan pembangunan prasarana.

c. Penggunaan Lahan

Penggunaan tanah di Kelurahan Mojosongo sebagian besar digunakan untuk permukiman, sedangkan lahan di sepanjang jalan-jalan utama berfungsi untuk lahan campuran perumahan dan perdagangan. Permukiman yang ada memiliki kualitas bangunan yang bervariasi dari bangunan permanen, semi permanen dan temporer. Namun secara umum bangunan semi permanen lebih mendominasi, terutama di bagian selatan yang berdekatan dengan pusat kota dan berada di bantaran Sungai Kali Anyar.

Di kelurahan tersebut juga dibangun kompleks perumahan yang diusahakan oleh Perum Perumnas Cabang V Surakarta, pada tahun 1979, dimana Perum Perumnas Cabang V tersebut telah membangun Perumnas Mojosongo. Perumnas ini menempati areal seluas 60,15 Ha yang terbagi menjadi 31 RW (Rukun Warga) dan 139 RT (Rukun Tetangga). Jumlah RW ini relatif besar untuk ukuran satu kelurahan. Oleh karena itu pemenuhan kebutuhan permukiman dan infrastruktur pendukungnya perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius.

Status lahan di Kelurahan Mojosongo selain status hak milik dan hak guna bangunan banyak terdapat tanah-tanah negara yang mempunyai akses yang baik ke pusat-pusat perekonomian, namun dengan kondisi lahan yang kurang memenuhi syarat seperti kelerengan yang terlalu tajam, di bantaran sungai dan sebagainya.

3.2.2 Kondisi Sosial Ekonomi

a. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kelurahan Mojosongo sampai dengan bulan Februari 2005 adalah 41.345 jiwa yang terdiri dari 10.845 KK dengan kepadatan penduduk 12.890 jiwa/km². Hal itu menunjukkan bahwa Kelurahan Mojosongo merupakan kelurahan yang berpenduduk sangat padat. Ditambah lagi dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,66%. Dengan kenyataan tersebut, maka tidaklah mengherankan jika kebutuhan akan permukiman beserta prasarana pendukungnya sangat tinggi. Hal ini perlu menjadi perhatian yang serius, mengingat kapasitas lahan di kelurahan tersebut yang semakin terbatas. Di samping itu, tingkat migrasi masuk ke kelurahan tersebut per tahun juga cukup tinggi, yaitu 90 orang. Tingginya jumlah kedatangan penduduk untuk tinggal menggambarkan tingginya daya tarik Kelurahan Mojosongo, apalagi sekarang ini banyak perumahan yang dibangun pada kawasan tersebut dan lokasinya yang sangat mudah dijangkau dari pusat kota.

Sementara itu rasio jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di kelurahan tersebut adalah 20.492 jiwa penduduk laki-laki dan 20.853 jiwa penduduk perempuan. Melihat angka tersebut, maka jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki. Meskipun jika dilihat secara keseluruhan, selisihnya tidak begitu signifikan atau dapat dikatakan hampir sama. Dengan demikian secara kuantitas, sumber daya perempuan di kelurahan tersebut mempunyai potensi yang cukup besar untuk memainkan peranan penting dalam penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang ada di lingkungan kelurahan tersebut, salah satunya adalah prasarana lingkungan.

b. Mata Pencaharian dan Tingkat Pendidikan Masyarakat

Mata pencaharian penduduk Kelurahan Mojosoongo sebagian besar adalah buruh industri, buruh bangunan, pedagang, pengusaha dan lain-lain yang terkonsentrasi pada wilayah bagian selatan sampai dengan Bantaran Kali Anyar. Selain itu terdapat pula penduduk yang bermata pencaharian sabagai pegawai swasta maupun pegawai negeri yang tersebar di seluruh kawasan tetapi terbanyak di kawasan Perumahan Mojosoongo. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.1
Penduduk Kelurahan Mojosoongo Menurut Mata Pencaharian Tahun 2005

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentasi (%)
1	Petani sendiri	82	0,3
2	Pengusaha	253	0,9
3	Buruh industri	4.586	16,28
4	Buruh bangunan	7.244	25,72
5	Pedagang	449	1,59
6	Pengangkutan	229	0,81
7	PNS/ABRI	4.367	15,51
8	Pensiunan	983	3,49
9	Lain-lain	9.972	35,4
	Jumlah	28.165	100,00

Sumber : Monografi Kelurahan Mojosoongo, 2005

Yang dimaksud dengan mata pencaharian lain-lain adalah mereka yang bekerja sebagai jasa makelar, jasa blantik, jasa pengemudi, jasa perantara dalam perdagangan, dan sebagainya. Berdasarkan tabel tersebut, maka mata pencaharian terbesar yang dilakukan penduduk Kelurahan Mojosongo adalah Lain-lain sebesar 35,4 %. Sedangkan urutan selanjutnya adalah buruh bangunan dan buruh industri, yang masing-masing sebesar 25,72% dan 16,28 %. Sebagaimana karakteristik penduduk perkotaan pada umumnya, maka penduduk Kelurahan Mojosongo sebagian besar bekerja di bidang non-pertanian. Mata pencaharian masyarakat umumnya didominasi oleh sektor swasta, namun ada juga yang telah mampu berwiraswasta dengan mendirikan industri kecil atau industri rumah tangga, sebagai contoh adalah pabrik tahu dan tempe. Industri ini paling banyak diusahakan oleh warga yang tinggal di RW 3 Kelurahan Mojosongo.

Kondisi perekonomian masyarakat Kelurahan Mojosongo sedikit banyak diuntungkan oleh keberadaan Pasar Mojosongo. Dampak dari kegiatan pasar tersebut adalah berkembangnya kegiatan sektor informal yang dijalankan oleh masyarakat setempat. Dengan demikian keberadaan pasar menjadi aset yang strategis bagi masyarakat dalam membuka lapangan usaha yang baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun pada kenyataannya, imbas dari kegiatan pasar tersebut belum mampu 'mengangkat' perekonomian masyarakat secara umum, meskipun sebenarnya masyarakat cukup terbantu dengan adanya pasar tersebut di Kelurahan Mojosongo. Jenis mata pencaharian masyarakat yang sebagian besar masih berkaitan dengan kegiatan perdagangan dan transportasi, secara garis besar masih menghasilkan pendapatan yang relatif kecil.

Dari gambaran mata pencaharian penduduk di Kelurahan Mojosongo dan juga didukung oleh informasi yang didapatkan dalam wawancara, maka dapat diketahui bahwa tingkat pendapatan masyarakat kelurahan tersebut secara rata-rata adalah menengah ke bawah. Tingkat pendapatan masyarakat yang masih relatif rendah ini diperkirakan akan mempengaruhi besar kecilnya kontribusi yang dapat mereka berikan dalam kegiatan pengelolaan prasarana di lingkungannya, atau dengan kata lain upaya pemberdayaan masyarakat dapat terhambat oleh kemampuan ekonomi masyarakat yang masih rendah.

Adapun mengenai tingkat pendidikan masyarakat juga masih relatif rendah. Sebagian besar penduduk tidak tamat SD, yaitu sejumlah 5.698 orang, disusul kemudian tamatan SMP 5.443 orang., sedangkan tamatan SD sejumlah 5.005 orang.

c. Struktur sosial masyarakat

Sejak beberapa tahun terakhir ini, di Kelurahan Mojosongo banyak didirikan perumahan oleh developer, selain perumahan yang didirikan oleh Perum Perumnas. Maka tidak mengherankan jika banyak sekali pendatang yang kemudian menetap di kelurahan tersebut. Pendatang tersebut kemudian berbaur dengan penduduk setempat yang memunculkan heterogenitas, sebagaimana karakteristik masyarakat perkotaan pada umumnya. Adanya perbedaan suku, pekerjaan, strata sosial, tingkat pendidikan, dan sebagainya tidak menimbulkan adanya segregasi atau pemisahan yang dapat memunculkan pengelompokan dalam masyarakat. Antara penduduk asli dan pendatang rupanya mampu berinteraksi dengan baik, bahkan kaum pendatang juga diikuti dalam setiap kegiatan sosial maupun pembangunan di lingkungan masing-masing.

Norma yang dipegang masyarakat sebagai kontrol perilaku umumnya adalah norma agama. Sementara norma sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat lebih fleksibel, dimana masyarakat umumnya lebih mudah menerima hal baru dalam budaya mereka. Hal ini cukup wajar, mengingat kelurahan tersebut berada di wilayah perkotaan yang dinamis.

d. Sikap masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan lingkungan mereka

Program peremajaan di Kelurahan Mojosongo meliputi kegiatan pemindahan permukiman, pembangunan kembali permukiman, pembangunan zona ekonomi rakyat dan pusat pedagang kaki lima, pembuatan talud Kali Kedung Jumbleng, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas ekonomi terutama di kawasan sekitar pasar untuk mendukung aktivitas pasar, dan penyediaan prasarana permukiman seperti jalan, drainase, pembuatan TPS, dan pembangunan MCK. Setelah program selesai, dilakukan kegiatan tindak lanjut berupa pemeliharaan lingkungan, yang tanggung jawabnya dipegang oleh masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan pemeliharaan/ pengelolaan lingkungan tersebut masih dilaksanakan hingga sekarang

Sikap masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah jenis mata pencaharian masyarakat, salah satunya adalah sebagai pengusaha industri tahu dan tempe. Keberadaan industri tersebut menuntut adanya kemampuan mengelola limbah dan ketersediaan prasarana sanitasi yang memadai sebagai saluran pembuangan limbah. Kenyataan yang ada saat ini, tidak semua industri mampu mengelola limbah dengan baik, yang apabila hal itu dibiarkan maka akan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran.

Faktor lainnya adalah status kepemilikan rumah. Apabila status kepemilikan rumah adalah rumah sendiri, maka masyarakat cenderung memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap lingkungan sekitarnya. Faktor tingkat pendapatan juga ikut mempengaruhi sikap masyarakat. Pada umumnya pendapatan yang tinggi dianggap memiliki taraf kehidupan yang tinggi. Biasanya bagi yang berpendapatan tinggi dan memiliki kelebihan akan tanggap terhadap segala sesuatu yang ada di sekitarnya termasuk permukiman tempat tinggalnya.

Kondisi sebaliknya bagi yang berpendapatan rendah, dapat dikatakan bahwa hasil pendapatan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bahkan kadang-kadang ada yang kurang. Biasanya orang yang berpendapatan rendah lebih cenderung untuk kurang memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Demikian pula halnya dengan warga Kelurahan Mojosongo yang rata-rata berpendapatan menengah ke bawah. Umumnya kepedulian mereka terhadap lingkungannya masih diragukan.

Namun dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, diketahui bahwa masyarakat setempat masih memiliki kepedulian terhadap pemeliharaan lingkungan di sekitarnya. Terbukti dengan adanya kegiatan kerja bakti yang masih rutin dilakukan setiap minggunya. Selain itu juga ibu-ibu yang dikoordinir oleh PKK yang juga turut mengelola prasarana lingkungan, khususnya sanitasi dan sampah. Namun kegiatan tersebut belum berjalan optimal karena keterbatasan masyarakat dalam hal pendanaan, khususnya untuk memperbaiki prasarana yang membutuhkan biaya yang relatif besar, misalnya jalan kampung.

e. Sikap masyarakat terhadap perbedaan gender (peran laki-laki dan perempuan)

Di Kelurahan Mojosongo, secara umum tidak ada perbedaan porsi peran antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat maupun dalam bidang ekonomi. Yang berbeda adalah jenis peran yang dijalankan oleh laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini lebih didasarkan pada keinginan masyarakat untuk menciptakan suatu keselarasan sosial.

Masyarakat rupanya menyadari bahwa secara kodrati, laki-laki dan perempuan itu berbeda. Oleh karena itu, sedapat mungkin peran yang dijalankan oleh laki-laki dan perempuan tersebut tidak melanggar kodrat yang telah digariskan oleh Tuhan. Sebagai contoh, pekerjaan atau peran yang lebih banyak membutuhkan dukungan kekuatan fisik lebih pantas dikerjakan pria, sedangkan pekerjaan yang membutuhkan ketelitian biasanya lebih banyak dipercayakan kepada perempuan. Perbedaan dalam hal ini didasarkan kepantasan mengenai siapa pelaku yang sebaiknya menjalankan peran tersebut. Standar kepantasan tersebut telah tertanam melalui tradisi dan norma yang berlaku di masyarakat setempat sejak lama.

Pembedaan tersebut tidak hanya berlaku pada wilayah publik, tetapi juga pada wilayah domestik (keluarga). Meskipun demikian, pembedaan tersebut tidak dimaksudkan untuk memarginalkan atau mendiskriminasi perempuan, tetapi justru dimaksudkan untuk menghormati kaum perempuan itu sendiri. Adapun perbedaan peran gender di Kelurahan Mojosongo dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III. 2
Perbedaan Peran Gender di Kelurahan Mojosongo

Aktivitas	Peran Laki-laki	Peran Wanita
Rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"> - Secara umum, pria sebagai kepala rumah tangga. - Pria sebagai pencari nafkah utama 	<ul style="list-style-type: none"> - Wanita sebagai ibu rumah tangga - Wanita berperan ganda, yaitu reproduktif, produktif, mengelola masyarakat, dan peran sosial dalam masyarakat
Sosial kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang peranan besar - Bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat menjaga kebersamaan/kerukunan dan kesejahteraan antar warga, seperti : anjagsana, kerja bakti, diskusi-diskusi, dsb - Disalurkan melalui wadah organisasi RT dan RW 	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang peranan yang besar sama dengan kaum pria - Bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan peningkatan kesejahteraan ibu dan anak, serta urusan pengelolaan keuangan dalam kegiatan warga, baik yang bersifat rutin maupun berkala - Disalurkan melalui wadah organisasi PKK
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Peran pria sangat besar, yaitu sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga - Pandangan budaya masyarakat mengharuskan pria berperan utama dalam bidang ekonomi - Terdapat organisasi profesi untuk menyalurkan aktualisasi diri maupun membantu penyelesaian masalah pekerjaan, seperti paguyuban tukang becak, paguyuban pengusaha tahu dan tempe, dsb 	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagian besar wanita di kelurahan tsb tidak bekerja (ibu rumah tangga) - Wanita yang bekerja umumnya karena membantu suami mencukupi kebutuhan keluarga - Wanita yang bekerja sebagian besar di sektor informal - Pandangan budaya masyarakat tidak mengharuskan wanita bekerja di luar rumah - Terdapat organisasi sebagai wadah bagi wanita untuk meningkatkan ketrampilannya, seperti paguyuban menjahit, dsb
Pengelolaan prasarana lingkungan (jalan, sampah, sanitasi/drainase, MCK)	<ul style="list-style-type: none"> - Pria kurang berperan - Peran pria lebih banyak sebagai pelaksana perbaikan/pemeliharaan prasarana, khususnya prasarana jalan - Sumbangan yang diberikan umumnya tenaga dan materi 	<ul style="list-style-type: none"> - Wanita berperan besar - Peran wanita sebagai konseptor dan pengelola keuangan - Wanita membuat program bulanan maupun tahunan untuk mengelola prasarana tsb melalui kelompok PKK - Sumbangan yang diberikan berupa tenaga, waktu, pikiran, dan materi

Sumber : Hasil Analisis , 2005

Dalam bidang sosial kemasyarakatan misalnya, terbentuknya kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan seperti PKK, RT, RW, paguyuban pengelola MCK, dan lain-lain banyak mengikutsertakan perempuan di dalamnya. Kaum perempuan lebih dipercaya untuk mengurus kegiatan organisatoris secara lebih baik daripada kaum pria. Wanita dianggap lebih terlatih dalam mengelola keuangan, serta lebih kreatif dalam memanfaatkan dana-dana yang ada. Di samping itu, mengingat banyak kaum perempuan di Kelurahan Mojosongo yang merupakan ibu rumah tangga, maka mereka relatif mempunyai lebih banyak waktu luang untuk mengawasi jalannya kegiatan sosial kemasyarakatan tersebut.

Sementara itu dalam bidang ekonomi, peran untuk mencari nafkah memang masih didominasi oleh kaum pria sebagai kepala rumah tangga. Meskipun tidak sedikit wanita di kelurahan tersebut yang bekerja, baik bekerja bersama-sama suaminya maupun bekerja sebagai buruh atau pedagang. Berdasarkan survei wawancara yang dilakukan, kebanyakan wanita yang bekerja terdapat di RW III. Di RW ini sebagian besar masyarakat bekerja sebagai pengusaha tahu dan tempe serta pedagang. Hal ini dipengaruhi oleh keberadaan Pasar Mojosongo yang berdekatan dengan RW tersebut. Oleh karena itu, mata pencaharian masyarakat setempat umumnya dipengaruhi oleh kegiatan yang berlangsung di pasar. Wanita yang bekerja umumnya membantu suaminya untuk memasarkan produk tahu dan tempe di Pasar Mojosongo. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa di Kelurahan Mojosongo terdapat sebagian wanita yang bekerja.

Namun tanggung jawab memenuhi nafkah keluarga masih dibebankan pada kaum pria. Wanita yang bekerja oleh masyarakat setempat, dianggap hanya untuk membantu suaminya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Jadi belum dapat dikatakan bahwa wanita di Kelurahan Mojosongo dijadikan sebagai tulang punggung keluarga dalam bidang ekonomi. Terlebih lagi, untuk RW lainnya sebagian besar warga wanitanya merupakan ibu rumah tangga.

3.3 Kondisi Wilayah Sebelum Peremajaan

Sebelum dilakukan peremajaan, yaitu sebelum tahun 1997-an, di Kelurahan Mojosongo banyak sekali bermunculan permukiman kumuh, terutama di sekitar bantaran kali. Banyaknya permukiman kumuh tersebut disebabkan banyaknya pendatang yang mengadu nasib di Kota Solo. Tetapi sebagian besar pendatang tersebut berasal dari golongan masyarakat berpenghasilan rendah yang mulai terpinggirkan dari pusat kota atau pendatang dari luar kota yang mencari keberuntungan di kota. Kondisi tersebut kemudian memunculkan permukiman kumuh.

Mengenai karakteristik masyarakat, pada umumnya masyarakat bekerja pada sektor informal terdiri dari buruh, tukang becak, perajin sangkar burung, pembuat tahu tempe, bekerja pada peternakan babi dan lain-lain. kondisi sosial ekonomi termasuk dalam golongan masyarakat berpenghasilan rendah dimana sebagian besar masyarakat memiliki tingkat pendapatan yang terbatas dan pendidikan yang rendah.

Kondisi sosial yang ada tidak jauh berbeda dengan kondisi sosial ekonominya. Perilaku warga terhadap lingkungannya hampir sama dengan perilaku masyarakat pada permukiman kumuh lain. Tidak adanya tempat sampah yang memadai mendorong warga membuang sampah di saluran air. Tidak adanya fasilitas MCK yang layak di lingkungan mereka apalagi di dalam rumah juga mendorong mereka untuk membuang hajat di saluran ataupun pekarangan.

Terbatasnya kemampuan para pendatang tersebut membuat mereka nekat untuk menempati tempat tinggal sementara sebelum mereka memperoleh tempat tinggal tetap, yaitu di tanah-tanah kosong bantaran sungai Kali Anyar. Para pendatang tersebut membangun gubug-gubug dari bahan-bahan yang tidak tahan lama dan dari bahan bangunan bekas meskipun adapula yang membangun secara permanen dari tembok batu bata.

Kondisi lingkungan permukiman di sekitar bantaran tersebut juga tidak jauh berbeda. Walaupun lahan yang ada relatif lebih luas tetapi perkembangan selanjutnya permukiman tersebut menjadi permukiman kumuh dengan kondisi sanitasi yang buruk. Banyak bangunan semi permanen yang sebagian besar berlokasi di RW I, RW II, RW III, RT 02 RW IV serta RW VI, sementara bangunan permanen terkonsentrasi di sepanjang jalan Brigjen Katamsa dan jalan-jalan kampung yang mempunyai dimensi agak besar.

3.4 Kondisi Wilayah Setelah Peremajaan

Peruntukan bangunan di kawasan yang telah diremajakan terdiri dari hunian, sosial, perekonomian dan campuran. Sebagian besar bangunan diperuntukan sebagai hunian dan yang lain difungsikan untuk fasilitas sosial dan perekonomian. Secara lebih rinci guna lahan untuk permukiman dan pekarangan $\pm 35\%$, perdagangan $\pm 5\%$, kuburan $\pm 15\%$, tegalan $\pm 15\%$, tanah kosong $\pm 5\%$ dan lainnya (jalan, saluran dan lainnya) sebesar $\pm 25\%$.

Mengenai kondisi prasarana jalan umumnya dalam kondisi yang baik hanya beberapa tempat mengalami kerusakan. Fungsi jalan adalah sebagai prasarana penghubung antara suatu wilayah dengan wilayah lain baik di dalam maupun di luar kawasan. Jalan yang ada di kawasan umumnya berkonstruksi aspal, beton, paving dan sebagian jalan tanah. Jalan aspal yang sangat vital adalah jalan Brigjen Katamso yang membujur utara ke selatan dengan ROW 15 m.

Keberadaan jalan ini sangat penting karena menghubungkan wilayah Mojosoongo bagian utara dan yang lainnya dengan pusat Kota Surakarta. Jalan aspal yang lain seperti jalan Mr. Sartono, jalan Tentara G. Pelajar dan jalan Gunung Agung memiliki lebar 5-6 m dengan kondisi yang cukup baik. Tetapi untuk jalan aspal lain yang berada pada tengah kawasan kondisinya mulai banyak yang retak dan berlubang-lubang. Selain itu lebar jalan tersebut semakin lama semakin tidak mampu menampung tingginya arus lalu lintas di kelurahan tersebut, mengingat pertumbuhan kelurahan tersebut relatif tinggi sebagaimana wilayah pusat kota pada umumnya.

Jalan paving dan jalan beton terdapat di sebagian besar kawasan yang telah diremajakan. Secara umum jalan-jalan ini memiliki lebar 1,5-3 m dan masih dalam kondisi cukup baik, tetapi pada lokasi tertentu terdapat pula jalan paving dan beton dengan kondisi yang sudah rusak. Sebagian besar jalan-jalan tersebut merupakan hasil dari kegiatan peremajaan dan program Pemerintah lainnya tetapi sebagian lagi merupakan hasil swadaya masyarakat. Untuk jalan tanah di kawasan peremajaan hanya sebagian kecil saja. Jalan ini menghubungkan wilayah permukiman dengan kebun/ ladang atau ke wilayah lain yang lokasinya jauh dari permukiman.

Dalam hal prasarana drainase maka fungsi utamanya dalam kawasan adalah untuk mengalirkan air, baik air buangan rumah tangga maupun air hujan. Mengingat fungsinya, maka kondisi saluran akan sangat berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya. Saluran utama di kawasan Mojosongo adalah Kali Anyar yang bermuara di Bengawan Solo. Kali Anyar merupakan muara dari saluran-saluran drainase sekunder yang mengalir di dalam kawasan dan saluran-saluran lain di luar kawasan. Salah satu saluran sekunder di kawasan adalah Kedung Jumbleng dan Kali "Tusirah", saluran ini mengalir dari utara ke selatan.

Kondisi Kali Kedung Jumbleng pada saat ini sangat mengkhawatirkan. Walaupun pada saat peremajaan lingkungan telah dibangun *retaining wall*, pada saat ini bangunan penahan tersebut banyak yang retak dan bahkan ada sebagian yang roboh sehingga membahayakan rumah maupun jalan di samping kiri kanannya. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, warga diwakili pengurus RW setempat telah mengajukan usulan perbaikan dan pada lokasi tertentu membuat dinding penahan darurat dari karung pasir dan bambu.

Untuk Kali “Tusirah” kondisi fisiknya lebih baik dari Kali Kedung Jumbleng tetapi pada saat ini kondisi saluran banyak ditumbuhi tanaman dan terlihat ada pendangkalan yang cukup berat. Keadaan ini diperparah dengan adanya sampah yang dibuang ke saluran terutama di waktu kemarau. Mengenai kondisi saluran yang lain pada umumnya dalam kondisi baik tetapi di beberapa tempat terlihat adanya saluran yang telah retak-retak dan beberapa lokasi lagi terutama di RW II telah menimbulkan genangan karena tidak berfungsi dengan baik.

Dalam hal persampahan, setelah peremajaan selesai maka masyarakat sudah mulai timbul kesadaran membuang sampah. Mereka membuang sampah di bak-bak sampah dan kemudian diteruskan ke TPS untuk diangkut ke TPA. Tetapi kondisi ini ternyata tidak bertahan lama, pada saat ini kebiasaan warga untuk membuang sampah di saluran atau pekarangan di beberapa lokasi sudah mulai tumbuh kembali.

Mengenai kondisi permukiman, setelah adanya peremajaan maka permukiman kumuh yang sebelumnya ada telah berubah menjadi permukiman yang tertata. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu di beberapa tempat khususnya di RW I, II dan RW VI telah mulai tumbuh permukiman kumuh baru dengan rumah-rumah yang sangat padat dan terdiri dari bangunan semi permanen maupun non permanen. Walaupun permukiman kumuh yang ada skalanya sangat kecil dibandingkan luas kawasan secara keseluruhan tetapi karena pada kawasan tersebut baru saja selesai diremajakan, tentunya keberadaan permukiman kumuh baru tersebut perlu mendapat perhatian khusus.

BAB IV

ANALISIS PERAN WANITA DALAM PENGELOLAAN PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN DI KELURAHAN MOJOSONGO

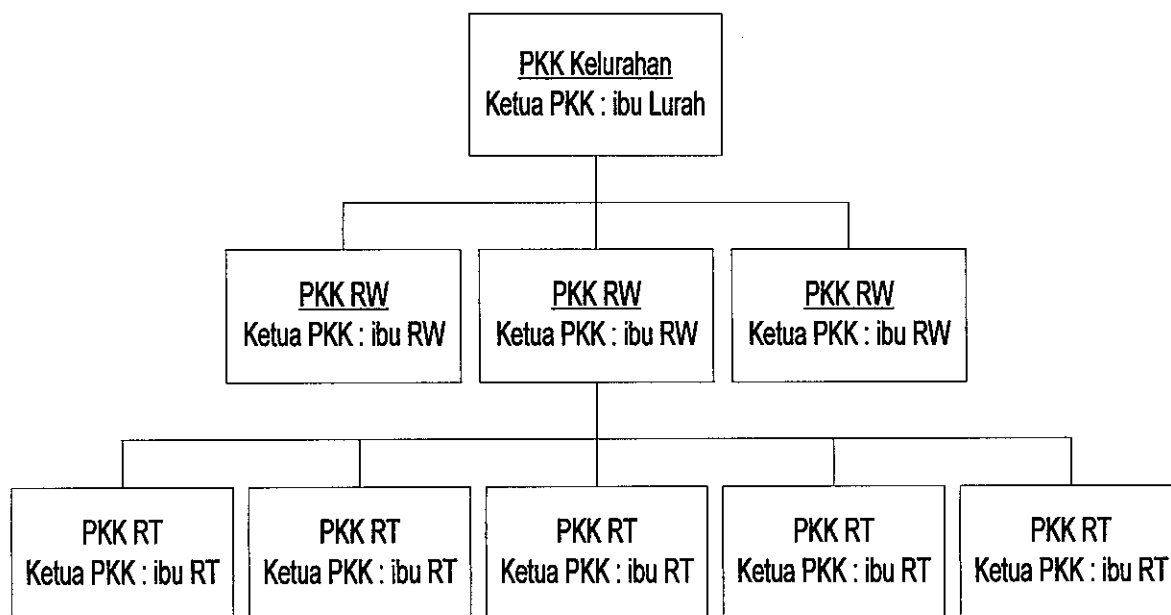
Dalam bab ini akan membahas tentang peran wanita Kelurahan Mojosoongo dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat, seperti dalam rumah tangga, dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan dalam kegiatan ekonomi, khususnya ekonomi keluarga. Selanjutnya secara khusus pembahasan akan diarahkan pada peran serta wanita dalam pengelolaan prasarana lingkungan permukiman di kelurahan tersebut.

4.1 Aktivitas Wanita dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

Jumlah penduduk wanita di Kelurahan Mojosoongo adalah 20.853 jiwa, yang mana 50% diantaranya adalah ibu rumah tangga. Aktivitas sebagai ibu rumah tangga menjadikan mereka banyak menghabiskan waktunya di rumah. Untuk melepaskan kejenuhan menjalankan tugas rumah tangga sehari-hari, para wanita tersebut melakukan aktivitas di luar rumah yang bersifat sosial kemasyarakatan.

Aktivitas sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh para wanita ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang dilakukan secara individu maupun yang dilakukan secara kelompok. Aktivitas secara individu ini diantaranya menghadiri acara pernikahan, takziah, arisan, dan lain sebagainya. Namun dalam pembahasan ini akan lebih difokuskan pada aktivitas sosial kemasyarakatan yang dilakukan melalui wadah kelompok.

Dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di Kelurahan Mojosongo, wanita khususnya para ibu-ibu memang lebih banyak berperan jika dibandingkan dengan kaum pria. Kegiatan tersebut dikoordinir oleh kelompok PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). PKK merupakan salah satu organisasi bagi para ibu sebagai wadah untuk menyalurkan semua potensi yang mereka miliki, khususnya dalam bidang sosial kemasyarakatan. PKK Kelurahan Mojosongo telah terbentuk dalam suatu struktur yang permanen, dengan level tertinggi adalah PKK Kelurahan, yang membawahi PKK Tingkat RW, sedangkan PKK RW membawahi PKK RT. Berikut adalah struktur organisasi PKK yang ada di Kelurahan Mojosongo.



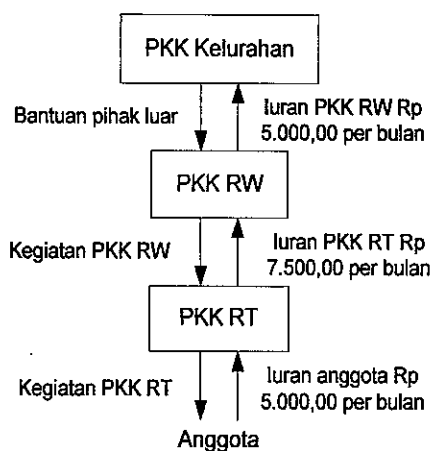
Sumber : Hasil Analisis, 2005

Gambar 4.1
Struktur Organisasi PKK Kelurahan Mojosongo

PKK Kelurahan bertanggung jawab mengkoordinir PKK pada tingkat di bawahnya, yaitu PKK RW. Demikian selanjutnya, PKK RW bertanggung jawab mengkoordinir PKK RT. Sementara itu PKK RT lah yang lebih banyak berperan secara langsung dalam kegiatan sosial, seperti Posyandu, Jimpitan, Kerja Bakti, pengadaan beras untuk penduduk miskin (raskin), Dasawisma, dan pendataan penduduk. Sementara PKK RW biasanya memprakarsai kegiatan yang sifatnya koordinatif antar RT. Kelurahan sendiri lebih banyak bertugas mengawasi, mengontrol, dan membantu melancarkan kegiatan PKK pada tingkat di bawahnya, juga berperan sebagai penghubung antara PKK pada tingkat RW dan RT dengan kebijakan pada tingkat yang lebih tinggi (pemerintah).

Kelompok PKK di Kelurahan Mojosongo telah mempunyai program konkrit untuk dijalankan setiap tahunnya. Program tersebut terdiri dari program tahunan dan program bulanan. Program tahunan biasanya dirancang oleh PKK Kelurahan untuk selanjutnya didelegasikan pelaksanaannya kepada PKK RW. Sementara program bulanan lebih sering diselenggarakan oleh PKK RT karena lingkup kegiatannya pada tingkat RT, seperti Posyandu, Jimpitan, arisan bulanan, dan kerja bakti.

Untuk membiayai kegiatan PKK, setiap anggota diwajibkan membayar iuran Rp 5.000, 00 tiap bulannya yang dimasukkan ke kas PKK RT. PKK RT sendiri menyetor iuran Rp 7.500,00 per bulan ke kas PKK RW, dan PKK RW menyetor iuran Rp 5.000,00 ke PKK Kelurahan. Sebaliknya, apabila PKK mendapat bantuan dana dari pihak luar, maka dana tersebut diberikan melalui PKK Kelurahan yang selanjutnya akan disalurkan ke kelompok PKK di tingkat bawahnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Hasil analisis, 2005

Gambar 4.2
Mekanisme Pembiayaan PKK Kelurahan Mojosoongo

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan, maka diketahui bahwa dalam mengatur kegiatan PKK tersebut para ibu yang terlibat di dalamnya tidak mengalami hambatan yang berarti. Dengan kata lain, manajemen organisasi yang dilakukan relatif berhasil, terbukti dengan program-program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Hal ini ditengarai karena *behaviour* ibu-ibu yang cenderung memiliki pemikiran yang sederhana (patuh) dalam menyikapi setiap tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi. Ciri lainnya yang menonjol dari kaum wanita di kelurahan tersebut adalah semangat yang tinggi dalam menjalankan kegiatan yang bersifat kemasyarakatan, mengingat peran mereka sebagian besar adalah sebagai ibu rumah tangga yang banyak menghabiskan waktunya di rumah. Dengan adanya kegiatan di luar rumah, mereka mendapatkan kesempatan untuk dapat mengaktualisasikan potensi yang mereka miliki.

Selain faktor internal dari dalam diri wanita itu sendiri, terdapat faktor eksternal yang memberikan kesempatan yang lebih besar kepada para wanita untuk beraktivitas di bidang sosial kemasyarakatan. Salah satunya adalah dukungan yang besar dari keluarga dan masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa aktivitas wanita tersebut berarti positif bagi kemajuan hubungan kemasyarakatan, di samping juga dapat membantu meringankan tugas administrasi kelurahan, misalnya dalam pendataan penduduk.

Hambatan yang dialami dalam menjalankan organisasi PKK tersebut terutama disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya wanita yang berada di dalamnya. Dengan tingkat pendidikan yang rata-rata hanya merupakan tamatan SD, maka akan sulit bagi mereka untuk mengerjakan tugas-tugas administratif, baik internal organisasi maupun tugas yang diberikan oleh pihak kelurahan seperti pendataan penduduk. Sejauh ini tanggung jawab tersebut hanya bisa dilaksanakan oleh sebagian anggota saja. Jadi selama ini upaya untuk kaderisasi dalam organisasi sulit dilakukan karena kapasitas sebagian besar anggotanya yang dimungkinkan tidak akan bisa memikul tanggung jawab yang dibebankan oleh organisasi.

Dalam bidang sosial kemasyarakatan, marginalisasi dan subordinasi terhadap perempuan rupanya tidak terbukti. Dikatakan tidak terjadi marginalisasi terhadap perempuan karena wanita dalam hal ini melalui wadah PKK, menjalani suatu proses pembelajaran untuk dapat meningkatkan kualitas dirinya. Pembelajaran tersebut dilakukan melalui diskusi-diskusi, pelatihan-pelatihan, dan tugas-tugas yang diberikan oleh PKK.

Dalam hal pengambilan keputusan, kelompok PKK mempunyai wewenang penuh untuk menentukan setiap program yang akan dijalankannya. Pihak luar, bahkan kelurahan, tidak bisa melakukan intervensi terhadap setiap keputusan yang diambil. Tetapi secara informal pihak kelurahan seringkali memberikan masukan bagi PKK dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, subordinasi terhadap perempuan tidak terjadi di kelurahan tersebut, khususnya yang dilakukan melalui kelompok PKK.

4.2 Aktivitas Wanita dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga

Aktualisasi perempuan Mojosoongo dalam ruang publik tidak hanya dalam kegiatan-kegiatan sosial saja. Ternyata terdapat sebagian wanita yang juga turut berperan membantu meningkatkan ekonomi keluarga. Hal ini dilakukan oleh para ibu di RW III, yang sebagian besar dari mereka bekerja bersama-sama dengan suami mereka menjalankan industri pembuatan tahu dan tempe serta sekaligus sebagai pedagang yang memasarkan sendiri produk buatannya.

Selain itu, terdapat juga sebagian warga wanita yang bekerja sebagai buruh industri dan pedagang. Hal tersebut dianggap sebagai hal yang wajar, dimana masyarakat setempat sudah dapat menerima keadaan dimana wanita bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Terlebih lagi kelurahan tersebut terletak dipertanian, yang masyarakatnya cenderung berpikir secara modern dan mudah menerima budaya yang baru maupun perubahan yang cepat.

Keberadaan Pasar Mojosoongo sedikit banyak berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar pasar. Diantaranya adalah berkembangnya sektor informal di bidang perdagangan dan jasa, berupa PKL-PKL yang berlokasi di sekitar pasar. Berkembangnya sektor informal ini membuka kesempatan bagi para wanita untuk bekerja dan membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Jenis usaha yang dijalankan oleh kaum ibu di kelurahan tersebut antara lain dengan berjualan makanan dan minuman di sekitar pasar.

Adanya pembagian tanggung jawab dalam menanggung ekonomi keluarga ini menunjukkan bahwa akses para wanita di kelurahan ini terhadap sumber daya sudah relatif tinggi. Pandangan bahwa antara suami dan istri memiliki kesetaraan dalam tanggung jawab ekonomi keluarga, rupanya didukung oleh budaya Jawa pada umumnya yang menganggap bahwa wanita adalah pusat keluarga. Jadi wanita mempunyai kekuasaan, pengaruh, kekuatan, kebebasan, dan posisi tawar yang baik, setara dengan suaminya.

Wanita dapat memberikan kontribusi dalam ekonomi keluarga ini secara bebas, karena masyarakat menganggap bahwa peran wanita tersebut masih dalam ruang domestik yaitu keluarga, dan belum signifikan dalam ruang publik. Padahal apabila ditelaah lebih jauh, maka peran wanita ini akan dapat meningkatkan posisinya dalam ruang publik. Sebagaimana diungkapkan oleh Engels bahwa wanita dapat melepaskan diri dari kekuasaan patriarkhal apabila berperan secara ekonomi, meskipun hanya dalam lingkup keluarga.

Pihak pemerintah sendiri melalui Kelurahan memiliki kepedulian yang besar dalam mengoptimalkan peran wanita dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga. Salah satunya dibuktikan dengan dibentuknya paguyuban penjahit, yang kegiatan utamanya adalah memberikan pelatihan kepada ibu-ibu dan remaja putri dalam membuat pakaian/menjahit. Namun demikian, kegiatan tersebut belum bisa berjalan dengan baik karena kurangnya minat kaum wanita untuk mengikuti kegiatan tersebut. Sebagian dari mereka beralasan bahwa mereka lebih mengutamakan menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga, sehingga tidak mempunyai waktu lagi untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Beberapa wanita menganggap bahwa ketrampilan menjahit kurang *up to date* dengan perkembangan industri saat ini, sehingga tenaga ahli jahit kurang diminati oleh pasar. Meskipun paguyuban tersebut masih berjalan hingga saat ini, namun semakin lama semakin menurun aktivitasnya. Pihak kelurahan dan PKK sendiri masih belum menemukan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Sebenarnya pemberian latihan/kursus ini mempunyai arti yang sangat penting bagi kaum wanita. Tidak hanya sekedar menambah ketrampilan, tetapi lebih dari itu, secara psikologis dapat meningkatkan kepercayaan diri pada kaum wanita. Dengan semakin meningkatnya kemampuan mereka, maka hal itu memungkinkan wanita untuk menjalani sendiri proses kesetaraan dirinya dengan setiap orang yang berhubungan dengannya.

4.3 Aktivitas Wanita dalam Pengelolaan Prasarana Lingkungan Permukiman

Prasarana permukiman yang dibicarakan dalam hal ini adalah jaringan jalan, sampah, sanitasi, dan air bersih/MCK. Sementara aktivitas wanita dalam pengelolaan prasarana lingkungan difokuskan pada lingkungan RW yang dahulu pernah dilakukan peremajaan. Pengelolaan tersebut tidak hanya dilakukan oleh kalangan wanita sendiri, tetapi juga bersama-sama dengan unsur yang lain, seperti kaum pria, dan juga pemerintah. Kegiatan pengelolaan prasarana lingkungan yang dilakukan oleh kaum wanita di Kelurahan Mojosoongo secara mandiri, melalui PKK masing-masing RT, meliputi kegiatan pengelolaan sampah dan MCK. Sedangkan yang dilakukan bersama-sama komponen masyarakat lainnya, yaitu laki-laki, adalah sanitasi dan jaringan jalan.

4.3.1 Peran Wanita dalam Pengelolaan Prasarana Sampah

Kondisi persampahan di Kelurahan Mojosoongo sebenarnya sangat rawan terhadap terjadinya pencemaran. Sampah yang terdapat di kelurahan tersebut tidak hanya berupa sampah domestik (rumah tangga), tetapi juga sampah yang dihasilkan akibat adanya kegiatan Pasar Mojosoongo. Keberadaan pasar, yang pada umumnya kegiatan yang berlangsung di pasar seringkali menimbulkan efek negatif bagi lingkungan di sekelilingnya. Luapan pedagang hingga ke luar area pasar, kegiatan bongkar muat barang, dan kegiatan pasar lainnya seringkali menimbulkan banyak sampah. Oleh karena itu, pengelolaan sampah dengan benar sangat diperlukan untuk menanggulangi penimbunan sampah di lingkungan kelurahan tersebut.

Setelah dilakukan peremajaan lingkungan di kelurahan tersebut, langkah-langkah pemeliharaan lingkungan pun dilakukan oleh masyarakat setempat. Khusus untuk sampah, masyarakat setempat kemudian membangun TPS-TPS pada masing-masing RT dan RW. Selain itu pada masing-masing rumah atau dasawisma disediakan tong-tong sampah untuk menampung sampah dari tiap rumah. Perlengkapan lainnya untuk pengelolaan sampah ini adalah gerobak sampah yang disediakan untuk mengangkut sampah non organik dari tiap rumah untuk dibawa ke TPS.

Proses pengelolaan sampah itu sendiri dilakukan dengan berbagai macam cara. Dalam hal ini dikoordinir oleh PKK pada masing-masing RT dan RW. Caranya adalah dengan menyewa jasa seorang atau sekelompok orang untuk mengumpulkan sampah di tiap-tiap rumah. Sementara yang mengkoordinir pengumpulan iuran pembayaran jasa pengumpulan sampah dilakukan oleh ibu-ibu PKK.

Khusus untuk RW I, masyarakat terutama wanita yang tergabung dalam PKK mempunyai cara yang unik dan lebih menguntungkan dalam mengelola sampah di lingkungan mereka. Sampah organik dari warga, oleh ibu-ibu tersebut dimanfaatkan kembali untuk kompos. Pada awal pasca peremajaan, kegiatan ini masih berlangsung secara aktif karena masih ada panduan dari Dinas Kebersihan Kota Surakarta. Namun untuk sekarang ini, antusiasme masyarakat setempat relatif berkurang, terlebih karena adanya kendala dalam hal pemasaran. Sampai saat ini kompos yang diproduksi sulit untuk dipasarkan, karena tidak adanya agen yang dapat membantu untuk memasarkannya. Sementara PKK sendiri kurang menguasai strategi pemasarannya.

Dari kenyataan di atas, nampak bahwa kemampuan mengelola sampah dengan baik yang dikuasai oleh PKK tidak terlepas dari peran *stakeholder* yang lain, terutama pemerintah. Pada awalnya pemerintah melakukan pendampingan terhadap masyarakat mengenai pengelolaan sampah dengan baik. Dan untuk selanjutnya, pengelolaan dijalankan sendiri oleh masyarakat. Pada dasarnya masyarakat telah mampu mengelola dengan baik sampah yang ada di lingkungannya. Bahkan masyarakat telah mampu mengolah sampah hingga menjadi barang yang lebih berguna yaitu kompos. Namun yang masih menjadi kendala bagi masyarakat setempat adalah sulitnya memasarkan produk kompos tersebut. Oleh karena itu perlu adanya dukungan dan kerjasama dari *stakeholder* yang lain, baik swasta maupun pemerintah, untuk membantu memasarkannya. Dengan demikian masyarakat dapat lebih terpacu untuk mengolah sampah organik tersebut lebih baik lagi.

4.3.2 Peran Wanita dalam Pengelolaan Prasarana MCK

Untuk mendukung pembuangan limbah kolektif di lingkungan Kelurahan Mojosongo, khususnya untuk lingkungan permukiman yang mengalami peremajaan, maka dibangun MCK umum dan *septic tank* kolektif dengan sumur resapan. Prasarana ini dibangun untuk mengantisipasi limbah buangan manusia di sekitar sungai yang belum mempunyai WC sendiri. Pengadaan prasarana ini bersifat semi swadaya, yaitu sebagian dari masyarakat sendiri dan sebagian lainnya adalah bantuan dari proyek peremajaan.

Keberadaan MCK ini sangat dibutuhkan oleh warga setempat mengingat jumlah penduduk di lingkungan kelurahan tersebut yang sangat padat, sementara penduduknya umumnya merupakan masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Sehingga dimungkinkan tidak semua rumah tangga mempunyai kamar mandi dan WC masing-masing.

Setelah dilakukan peremajaan, maka di wilayah RW II dan RW III dibangun 3 buah MCK untuk digunakan masyarakat setempat. Keberadaan MCK tersebut sangat dibutuhkan oleh warga setempat, mengingat tidak semua warga memiliki kamar mandi dan WC sendiri. Di samping itu lingkungan RW III merupakan lingkungan industri tahu dan tempe yang sebagian besar tenaga kerjanya memanfaatkan MCK selama mereka bekerja.

Adapun pengelolaan MCK tersebut diserahkan kepada PKK RT, dimana MCK tersebut dibangun. PKK RT bertanggung jawab mengkoordinir iuran pemeliharaan MCK dari tiap-tiap warga. Sebagian dari dana tersebut dialokasikan untuk pemeliharaan, sedangkan sisanya dimasukkan dalam kas PKK RT. Pemeliharaan MCK adalah dengan membersihkannya secara rutin dan melakukan beberapa perbaikan yang dianggap perlu.

Hambatan yang masih dialami dalam memelihara prasarana MCK adalah kurangnya kepedulian warga yang menjadi pengguna dalam menjaga kebersihan MCK itu, sehingga MCK tersebut relatif mudah kotor dan rusak. Hal itu menyebabkan biaya pemeliharaannya menjadi lebih besar.

Sementara itu iuran yang dibayarkan untuk pemeliharaan MCK relatif kecil, sehingga seringkali tidak cukup untuk menutupi biaya pemeliharaannya. Akibatnya, kerusakan yang terjadi tidak cepat tertangani. Untuk menutupi kekurangan dana perbaikan, maka warga yang tinggal di sekitar MCK berswadaya membiayai perbaikan secara bersama-sama.

Sama halnya dengan pengelolaan prasarana sampah, para wanita di Kelurahan Mojosongo secara kolektif telah dipercaya secara penuh dalam mengatur penggunaan asset publik. Hal ini menunjukkan bahwa wanita tersebut telah mampu mengembangkan sistem manajemen dengan baik, sekaligus sebagai sarana pembuktian diri bahwa wanita mampu berperan dalam sektor publik dengan kemampuan yang tidak kalah dengan kaum pria.

4.3.3 Peran Wanita dalam Pengelolaan Prasarana Sanitasi

Masalah sanitasi selalu menjadi masalah yang sangat penting untuk segera ditangani di Kelurahan Mojosongo. Permukiman penduduk yang padat dan berdesakan, keberadaan pasar, serta keberadaan pabrik tahu dan tempe, memunculkan kerawanan bagi lingkungan kelurahan tersebut terhadap terjadinya pencemaran. Munculnya bahaya pencemaran tersebut dapat ditengarai dari timbunan sampah dan genangan limbah di Kali Kedung Jumbleng dan Kali Anyar yang melalui kelurahan tersebut. Kenyataan ini tidak hanya terjadi sekarang ini saja, tetapi sudah terjadi sebelum lingkungan tersebut diremajakan.

Dahulu kondisinya lebih memprihatinkan, yakni permukiman masyarakat banyak yang menempati sempadan sungai sementara permukiman tersebut tidak dilengkapi dengan prasarana MCK yang memadai. Kenyataan selanjutnya dapat ditebak, mereka memanfaatkan sungai yang ada di sekitar permukiman mereka untuk mandi, mencuci dan buang air. Akibatnya, sungai menjadi tercemar. Ditambah lagi sungai tersebut belum memiliki talud, sehingga rawan terhadap erosi dan pendangkalan sungai.

Setelah dilakukan peremajaan di lingkungan sekitar sungai, maka permukiman di sempadan sungai dibongkar dan agak dijauhkan dari sungai, yang mana konsep pembangunan permukiman yang baru mengacu pada konsep *river front settlement*. Sementara sungai yang ada diarahkan sebagai *blue belt* bagi kawasan sekitarnya. Oleh sebab itu dicanangkan program PROKASIH (Program Kali Bersih) untuk mengatasi pencemaran sungai. Namun seiring dengan berjalannya waktu, program pemeliharaan Kali tidak dapat berjalan secara efektif.

Pengelolaan prasarana yang masih kurang optimal adalah pengelolaan prasarana sanitasi. Hal itu disebabkan masyarakat relatif kurang peduli dengan kebersihan lingkungan di sekitarnya. Selain itu juga dipengaruhi keberadaan beberapa pabrik tahu dan tempe di kelurahan tersebut. Tidak semua pabrik tersebut mempunyai sistem pengelolaan secara benar, terutama pabrik yang skala usahanya masih relatif kecil.

Biasanya limbah pabrik itu dibuang pada saluran yang sama dengan limbah rumah tangga. Padahal saluran tersebut adalah saluran terbuka dengan dimensi yang tidak begitu besar. Di samping itu, saluran sanitasi itu belum mempunyai pembuangan akhir yang memadai, yaitu hanya dialirkan ke kali baik Kali Kedung Jumbleng maupun sungai Kali Anyar. Akibatnya, sungai-sungai tersebut rawan terhadap pencemaran yang selanjutnya akan membahayakan lingkungan sekitarnya.

Masyarakat pada dasarnya kurang memahami cara-cara pengelolaan limbah yang baik dan benar. Mereka menganggap bahwa menjaga selokan agar tidak mampet saja cukup untuk mengatasi permasalahan sanitasi di lingkungan mereka. Sementara saluran pembuangan akhir masih diarahkan ke sungai, jadi belum ada saluran pembuangan air limbah yang memadai. Padahal dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan beberapa industri tahu dan tempe, berpotensi menghasilkan limbah yang cukup berbahaya. Meskipun saat ini masyarakat tidak menggunakan air sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi air sungai yang tercemar tetap saja akan membahayakan kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Oleh karena itu perlu adanya keterlibatan *stakeholder* yang lain untuk membantu masyarakat setempat mengatasi hal tersebut.

Peran wanita sendiri kurang signifikan dalam pengelolaan sanitasi ini, begitu pula peran masyarakat secara keseluruhan. Artinya, secara umum masyarakat masih belum menyadari pentingnya pengelolaan limbah yang baik dan benar terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang bersangkutan. Latar belakang pendidikan masyarakat setempat sangat mempengaruhi jenis pekerjaan dan cara pandang mereka tentang lingkungan.

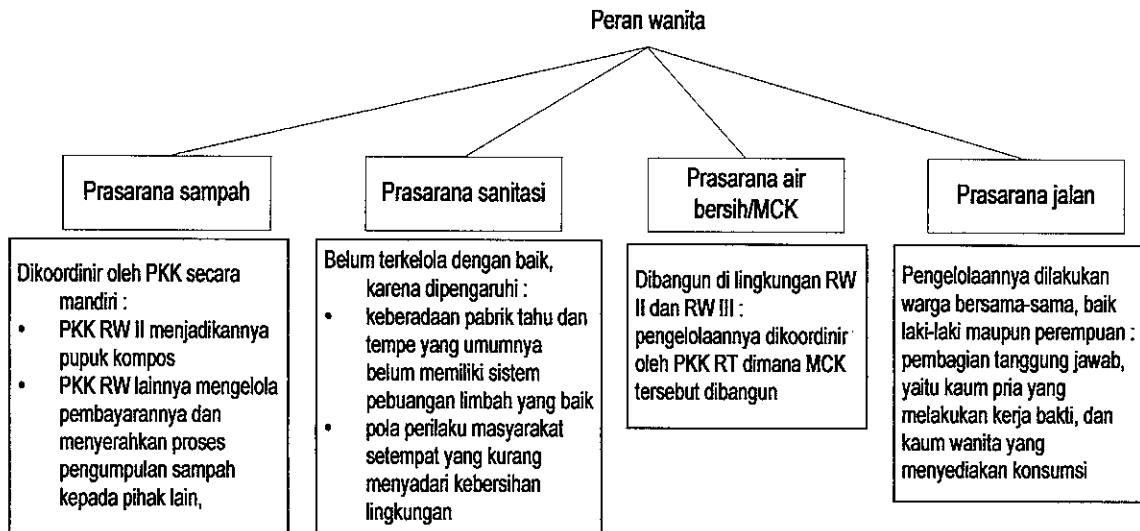
Permasalahan sanitasi yang hingga saat ini masih berlangsung, diakibatkan perlakuan yang kurang bijaksana dari masyarakat terhadap lingkungannya. Permasalahan ini perlu mendapatkan perhatian semua pihak, mengingat dampak yang mungkin ditimbulkan oleh masalah sanitasi ini, seperti banjir, dan berbagai penyakit misalnya diare, penyakit kulit, demam berdarah, dan sebagainya.

4.3.4 Peran Wanita dalam Pengelolaan Prasarana Jalan Kampung

Fungsi jaringan jalan di kelurahan ini sangat penting, selain untuk mendukung sirkulasi dalam kawasan permukiman, juga untuk mendukung sistem sirkulasi perdagangan di kelurahan tersebut. Oleh karena itu perlu adanya pengaturan yang baik untuk mengantisipasi perkembangan kegiatan perekonomian yang relatif tinggi arus lalu lintas modanya. Jaringan jalan tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu jalan aspal dan jalan yang terbuat dari paving block. Jalan paving block ini umumnya terdapat di kawasan bantaran sungai, karena fungsinya untuk menghindari terjadinya genangan.

Mengenai pengelolaannya, dilakukan secara bersama-sama oleh warga setempat baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini dikoordinir oleh masing-masing RT. Prasarana jalan terdiri dari dua jenis yaitu jalan aspal dan jalan paving. Lingkungan yang dilalui oleh jalan paving ini kebanyakan adalah lingkungan yang dulunya dilakukan peremajaan. Dalam pengelolaannya tidak ada perbedaan perlakuan antara kedua jenis jalan tersebut. Sebagai contoh konkrit dari pengelolaan oleh masyarakat setempat, setiap minggunya dilakukan kerja bakti untuk membersihkan selokan jalan atau memperbaiki jalan yang berlubang.

Secara umum, peran wanita dalam pengelolaan prasarana lingkungan permukiman di kelurahan tersebut secara keseluruhan dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Hasil Analisis, 2005

Gambar 4.3
Peran Wanita dalam Pengelolaan Prasarana Permukiman
Di Kelurahan Mojosongo

4.4 Pendekatan Peran Serta Wanita dalam Pengelolaan Prasarana Lingkungan dengan GAD (*Gender and Development*)

Dalam subbab ini, kajian tentang pendekatan peran serta perempuan dimaksudkan untuk melihat perlakuan-perlakuan yang diberikan kepada perempuan dalam pembangunan. Pendekatan GAD dianggap relevan dalam isu gender karena menekankan pada relasi perempuan dan laki-laki dalam pembangunan.

Masing-masing laki-laki dan perempuan memainkan peran yang berbeda dalam pembangunan, tetapi mereka memiliki kedudukan yang setara (tidak ada pihak yang ter subordinasi ataupun terdiskriminasi). Namun dalam penelitian ini, lebih banyak membahas tentang perempuan karena terdapat fenomena yang menarik, yaitu perempuan memainkan peran yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki dalam kegiatan pengelolaan prasarana. Tidak seperti banyak teori dan penelitian tentang gender yang selama ini lebih banyak mengungkapkan posisi perempuan yang diperlakukan tidak adil.

Sebagaimana perempuan pada umumnya, kaum wanita di Kelurahan Mojosongo juga menjalankan dua peran dalam dua ruang sekaligus, yaitu peran dalam ruang domestik yaitu keluarga sebagai istri dan ibu, serta ruang publik sebagai anggota masyarakat. Peran domestik ini sering dibebankan sebagai tugas dan tanggung jawab perempuan. Sebaliknya peran publik berkaitan dengan dunia di luar rumah, baik dalam pekerjaan formal, kemasyarakatan, dan sosial ekonomi banyak diidentikkan dengan dunia kaum laki-laki.

Dalam kondisi tersebut prinsip egalitarian sudah berlangsung secara wajar, dimana wanita dianggap sebagai bagian dari proses kehidupan kemasyarakatan dan pembangunan, setara dengan kaum pria. Dengan demikian, pendekatan *women in development* sudah dilalui karena tidak ada lagi diskriminasi terhadap perempuan di Kelurahan Mojosongo.

Keterlibatan perempuan dalam kegiatan pengelolaan dianggap mampu meningkatkan efisiensi pembangunan, karena peran wanita tersebut dapat menggantikan peran laki-laki yang lebih dahulu harus menjalankan kewajibannya dalam memenuhi nafkah keluarga. Bahkan peran wanita melalui kelompok PKK tersebut dirasakan lebih efektif karena karakteristik dasar pada wanita umumnya yang cenderung bekerja lebih tekun dan hati-hati. Dengan demikian, pendekatan *women and development* juga sudah berlangsung, dimana wanita tidak hanya sekedar terlibat dalam pengelolaan tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas kerja pengelolaan tersebut. Dalam hal ini wanita tidak lagi menjadi objek segala macam proses pembangunan yang tinggal diterima, tetapi semakin mampu menanggapi, memahaminya, dan menjalaninya dengan kekuatan dan keinginan sendiri.

Tidak diragukan lagi, bahwa pemberdayaan wanita juga sudah berlangsung, meskipun tingkatannya belum mencapai tahap yang memuaskan. Dalam kegiatan pengelolaan prasarana yang dijalankan di Kelurahan Mojosongo, wanita ditempatkan pada posisi yang penting bahkan telah diakui kemampuannya dalam mengelola prasarana tersebut secara mandiri. Yang menjadi persoalan saat ini adalah kemampuan sumber daya manusia dari kelompok wanita di kelurahan tersebut yang masih relatif rendah. Dengan demikian dikhawatirkan bahwa pengelolaan yang dijalankan tidak mampu berkembang (*stagnan*). Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk dapat meningkatkan kemampuan wanita baik secara individu maupun kelompok.

Pendekatan pemberdayaan ini memiliki makna bahwa segala perubahan yang diinginkan oleh kaum wanita haruslah diciptakan oleh wanita itu sendiri. Salah satunya dengan mendirikan lembaga/ organisasi yang dapat mewakili kepentingannya. Terdapat beberapa macam alternatif organisasi dimana wanita dapat berpartisipasi di dalamnya. Organisasi tersebut dapat berupa organisasi yang bersifat produktif (bertujuan menghasilkan pendapatan), seperti koperasi, paguyuban profesi, dan lain-lain. Alternatif lainnya adalah organisasi kemasyarakatan (bertujuan menghasilkan pelayanan bagi masyarakat), misalnya : Posyandu, PKK, dan lain-lain. Alternatif selanjutnya adalah organisasi yang bersifat politik (berorientasi pada salah satu partai politik).

Tantangan yang dihadapi dalam upaya memberdayakan perempuan di kelurahan tersebut secara internal adalah perasaan malu, takut, dan kurang percaya diri dalam diri perempuan dalam menerima kekuasaan yang dipercayakan padanya, sehingga perempuan sukar mengambil keputusan secara independen. Selain itu, mereka kurang berminat terhadap kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan berpikir, namun lebih tertarik pada kegiatan-kegiatan untuk melatih kemampuan motorik. Hal itu diakibatkan oleh lingkungan yang mempengaruhi perempuan dengan mental yang demikian. Adapun secara eksternal, tantangan yang dihadapi adalah struktur budaya masyarakat yang sedemikian rupa hingga melahirkan pandangan yang stereotip terhadap perempuan, akibatnya pembagian kerja oleh masyarakat lebih berdasarkan seks, bukan karena kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing pribadi wanita.

Kendala lainnya adalah pekerjaan rumah tangga yang mereka jalani. Dalam sehari mereka disibukkan dengan pekerjaan membereskan rumah tangga, melayani suami, dan mendidik anak-anaknya. Dengan demikian waktu yang tersisa bagi mereka untuk beraktivitas di luar rumah relatif sedikit. Itupun jika mereka tidak kelelahan karena saratnya pekerjaan dalam rumah tangganya. Kendala lainnya adalah perspektif negatif perempuan terhadap dirinya sendiri. Dari pengamatan yang dilakukan, nampak bahwa para wanita umumnya memiliki kecemasan karena telah mengabaikan keluarganya. Hal ini yang menghalangi mereka untuk meluangkan waktu dalam organisasi, baik profesi, kemasyarakatan, maupun politik.

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi, wanita harus meningkatkan kemampuan dengan berbagai cara, diantaranya adalah dengan menegmbangkan pendidikannya, kemampuan berkomunikasi, dan pengembangan pengorganisasian. Dengan demikian, kaum perempuan dapat mempersiapkan secara lebih matang untuk mengubah/memperbaiki lingkungannya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.

4.5 Pengaruh Budaya Jawa dan Surakarta terhadap Fenomena Peran Wanita di Kelurahan Mojosongo

Budaya Jawa atau dalam hal ini adalah orang Jawa diidentikkan dengan dua karakter, yaitu positif dan negatif. Dikatakan positif, orang Jawa mempunyai ciri-ciri ramah, hangat, toleran, sabar, dan kalem. Sedangkan dari sisi negatif, orang Jawa dikatakan orang yang penuh basa-basi, berbelit-belit, dan lembek.

Dari dua karakter tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip dasar yang dimiliki oleh orang Jawa yaitu terkontrol, tenang, berkepala dingin, sabar, halus, tenggang rasa, bersikap sederhana, jujur, halus, dan mengejar kepentingan sendiri.

Pada kultur Jawa, dahulu wanita Jawa merupakan wajah ketertindasan. Artinya, kultur Jawa dianggap kurang memberi tempat bagi kesejajaran laki-laki dan wanita. Tetapi apabila dilihat dari fenomena yang terjadi di Kelurahan Mojosoongo, menunjukkan bahwa wanita sama sekali tidak tertindas. Meskipun dalam hal ini wanita berperan 'di balik layar', namun peran tersebut tetap saja menonjol.

Pada penelitian tentang peran serta perempuan dalam pengelolaan prasarana lingkungan di Kelurahan Mojosoongo ini pendekatan yang digunakan adalah *Gender and Development* (GAD). GAD menggambarkan kesetaraan posisi laki-laki dan perempuan dengan memberikan peran tertentu. Dari hasil penelitian ini, laki-laki ikut berperan dalam memajukan perempuan, khususnya dalam pembangunan. Dalam hal ini perempuan bukan hanya sebagai penerima hasil saja, karena perempuan juga ikut memikul tanggung jawab sebagaimana halnya kaum pria.

Dengan adanya pengaruh dari kultur Jawa di kelurahan yang bersangkutan, peran perempuan lebih banyak dalam bidang administrasi. Dimana mereka ikut aktif dalam pengelolaan sumber dana yang ada melalui wadah yang bernama PKK. Apabila dikaitkan dengan kultur Jawa tersebut, maka peran wanita di kelurahan tersebut masih dinilai sewajarnya (tidak menyimpang dari budaya yang ada), yaitu wanita memiliki peranan yang sangat penting meskipun belum begitu besar pengaruhnya.

4.6 Tingkat Partisipasi Wanita dalam Mengelola Prasarana Lingkungan

Berbicara tentang tingkat partisipasi, maka dalam pengelolaan prasarana lingkungan di Kelurahan Mojosongo, kaum wanita telah turut berperan aktif tidak hanya ikut memanfaatkan prasarana tersebut, tetapi sudah ikut memelihara prasarana yang ada di lingkungannya. Bahkan dapat dikatakan bahwa peran wanita dalam kegiatan pengelolaan prasarana lingkungannya lebih besar dibandingkan peran laki-laki. Hal ini ditunjukkan dengan dibentuknya kelompok-kelompok ibu-ibu yang khusus mengurus masalah pengelolaan prasarana di lingkungannya, meskipun baru mencakup prasarana sampah dan MCK. Namun ini membuktikan bahwa pengelolaan telah terorganisasi dengan baik, yang mana terdapat pembagian tugas yang jelas dalam mengelolanya.

Pada awal dilakukan peremajaan, penyediaan prasarana dipenuhi dengan dibentuknya kemitraan antara masyarakat setempat dengan pihak konsultan yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam hal ini pengendalian keputusan, perencanaan, dan tanggung jawab pembangunan adalah kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, pada tahap ini tingkat partisipasi masyarakat, termasuk kaum wanita di dalamnya, berada pada level *partnership* (kemitraan). Setelah peremajaan selesai dilakukan, maka tanggung jawab pemeliharaan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat setempat, dalam hal ini peran sebagian besar dijalankan oleh PKK.

Kelompok PKK bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan menyangkut permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pemeliharaan. Sedangkan untuk prasarana lainnya, seperti jaringan jalan dan sanitasi, pemeliharaan dilakukan oleh warga secara keseluruhan di bawah tanggung jawab masing-masing RT.

Dari awal peremajaan hingga sekarang ini terjadi peningkatan level partisipasi pada kaum wanita, yang dulunya berada pada tingkat kemitraan (*partnership*) dan sekarang ini menuju tingkat pelimpahan kekuasaan (*delegated power*). Artinya, ada usaha dari kaum wanita untuk memberdayakan dirinya sendiri dan berperan dalam pembangunan. Kaum wanita di kelurahan tersebut telah memiliki kesadaran bahwa terdapat potensi yang besar di dalam dirinya, yang akan disayangkan jika tidak diberdayakan.

Dengan melihat kenyataan yang ada, diketahui bahwa kaum wanita tersebut tidak hanya mampu melakukan aktivitas sosial seperti kaum wanita pada umumnya, tetapi juga memiliki pemikiran-pemikiran sendiri dan menentukan pilihan-pilihan yang baik bagi lingkungannya, salah satunya dalam hal pengelolaan prasarana lingkungan.

4.7 Rumusan Konseptual Peran Wanita dalam Pengelolaan Prasarana Lingkungan di Kelurahan Mojosongo

Jika dicermati lebih dalam kondisi realitas peran perempuan di Kelurahan Mojosongo, maka alur dan kenyataan empiris yang terjadi di atas agak berbeda dengan hasil studi/ penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa ahli, terutama yang berasal dari Barat.

Dalam beberapa studi yang pernah dilakukan oleh beberapa ahli menunjukkan bahwa ketidakadilan gender dengan pihak wanita yang lebih banyak menjadi korbannya, masih saja terjadi terutama pada sektor publik. Sementara wanita sendiri sebagai pihak yang lebih dirugikan, belum mampu berbuat banyak untuk memperjuangkan kepentingannya, sehingga adanya pihak-pihak yang membantu meningkatkan harkat kaum wanita melalui program-program pembangunan tetap saja tidak dapat berjalan secara efektif. Hal ini terjadi karena pada dasarnya wanita sendirilah yang mengetahui apa yang terbaik bagi dirinya, sementara pihak lain tersebut mempunyai kepentingan/misi tertentu yang memungkinkan kepentingan wanita menjadi kurang diprioritaskan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi mengenai peran wanita di Kelurahan Mojosongo menunjukkan bahwa wanita memiliki kedudukan yang sentral baik dalam sektor privat maupun publik. Pada dasarnya, penguasaan sektor publik masih didominasi oleh kaum pria. Namun wanita sendiri tidak pernah merasa terusik ataupun tersubordinasi oleh hal tersebut. Pengaruh budaya Jawa secara tersirat menampakkan kekuatan wanita. Dalam hal ini kekuasaan pria dalam ruang publik merupakan representasi dari kualitas wanita sebagai istri dan ibu. Yang menarik dalam hal ini adalah melalui ruang privat wanita mempunyai pengaruh yang besar terhadap pengambilan keputusan pada sektor publik.

Semakin berkembangnya peran wanita dapat secara efektif menekan ketidakadilan gender secara signifikan. Peran tersebut tidak hanya dalam bidang sosial kemasyarakatan dan ekonomi, tetapi telah berkembang ke arah penguasaan pengelolaan aset publik yaitu prasarana lingkungan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya telah dapat menerima keterlibatan perempuan secara organisatoris dalam sektor publik. Terlebih lagi, tidak ada lagi diskriminasi mengenai jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh perempuan. Meskipun demikian, pekerjaan tersebut tetap disesuaikan dengan kodrat perempuan itu sendiri sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan.

Meningkatnya partisipasi perempuan ini terdorong oleh adanya kegiatan organisasi kewanitaan di wilayah yang bersangkutan. Organisasi perempuan, seperti PKK misalnya mempunyai ciri tersendiri, diantaranya mampu mendorong partisipasi anggotanya karena ada keinginan dari masing-masing anggota untuk saling berbagi kekuasaan (tidak ada yang ingin lebih menonjol). Adapun fungsi manajemen yang dijalankan oleh kelompok/organisasi tersebut diharapkan dapat menciptakan alternatif budaya baru, yang mana mampu memfasilitasi perempuan dalam rangka mengurangi dominasi budaya patriarkhal yang selama ini masih berlaku di masyarakat.

Fungsi manajemen yang dijalankan organisasi kewanitaan akan dapat meningkatkan harkat wanita itu sendiri apabila memiliki wawasan gender yang baik. Artinya, berkeinginan untuk menghilangkan segala bentuk ketidakadilan gender. Dalam suatu fungsi manajemen organisasi kewanitaan, beberapa langkah manajemen yang perlu dikembangkan adalah sebagai berikut :

1. *Planning*

Maksud *planning* atau perencanaan dalam hal ini yaitu untuk mengawali suatu kegiatan, organisasi kewanitaan itu perlu merencanakan strategi-strategi dalam rangka mencapai tujuan. Strategi ini berfungsi untuk mengatur pembagian kerja berdasarkan kemampuan yang dimiliki, menentukan peran perempuan dalam masyarakat, meningkatkan kemampuan perempuan supaya akses terhadap sumber daya produksi dan prasarana, dan mengurangi kontrol masyarakat atau pihak luar terhadap organisasi tersebut.

2. *Directing/Organizing*

Dimaksudkan mengatur struktur organisasi dan jaringan kerja yang dibentuk. *Organizing* dapat dilakukan dalam bentuk pengarahan berorganisasi yang sifatnya motivasi dan pendidikan yang terus menerus/berkelanjutan.

3. *Controlling*

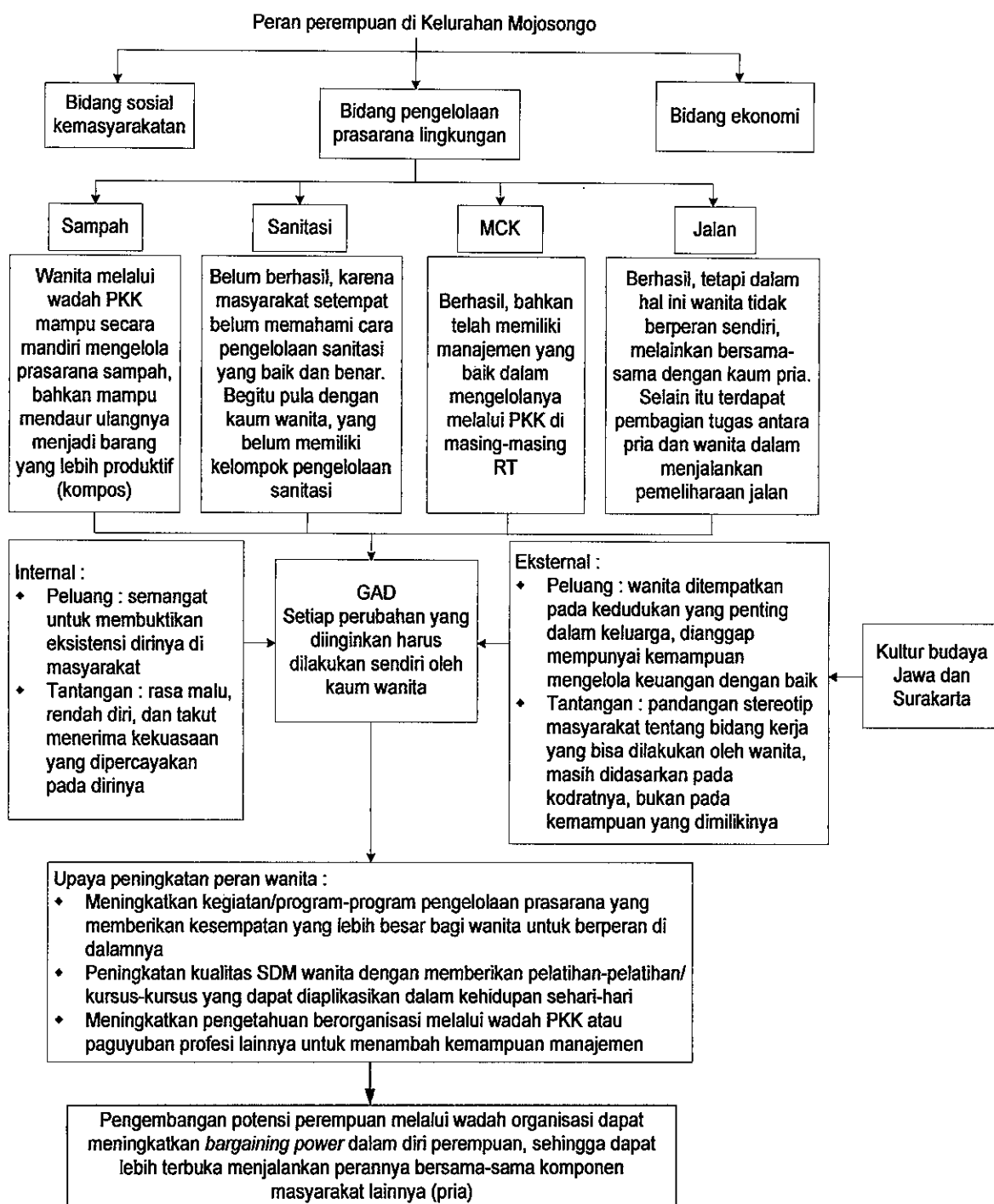
Atau disebut juga pengawasan, yang terdiri dari *monitoring* yang dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan evaluasi yang dimaksudkan untuk membetulkan kesalahan yang telah dilakukan.

Dalam menjalankan manajemen tersebut, peran wanita tidak terlepas dari kontribusi komponen masyarakat lainnya, yaitu kaum pria. Hal ini disebabkan karena manajemen tersebut juga membutuhkan suatu sifat maskulin, di samping nilai-nilai feminitas yang dominan. Dengan demikian, perlu kerjasama dan komunikasi yang terbuka tanpa membedakan gender, antara pria dan wanita, sehingga manajemen yang dijalankan dapat lebih efektif.

Keberhasilan kaum wanita dalam menjalankan pengelolaan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang muncul dari dalam diri wanita itu sendiri salah satunya adalah semangat yang tinggi untuk menunjukkan eksistensinya di masyarakat dengan mengaktualisasikan dirinya melalui PKK. Sedangkan faktor eksternalnya adalah dukungan yang besar dari keluarga dan masyarakat. Kultur masyarakat Jawa menempatkan wanita dalam posisi yang penting, baik dalam keluarga maupun di masyarakat. Oleh karena itu, kesempatan lebih terbuka bagi wanita untuk menjalankan aktivitas di luar rumah, baik di bidang sosial kemasyarakatan, ekonomi, maupun pembangunan.

Pengembangan potensi perempuan melalui wadah organisasi secara signifikan dapat meningkatkan *bargaining power* dalam diri perempuan. Penguatan organisasi tersebut dimungkinkan dapat memperbesar akses perempuan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya dan prasarana yang penting bagi kelangsungan hidup masyarakat. Dengan demikian, pentingnya keberadaan perempuan bukan hanya sebagai “penggembira” saja, melainkan mampu ikut menentukan keberhasilan pembangunan, lambat laun akan mendapatkan pengakuan dari masyarakat.

Dari keseluruhan analisis yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disusun suatu rumusan sebagai berikut :



Sumber : Hasil Analisis, 2005

Gambar 4.4
Rumusan Analisis Peran Wanita di Kelurahan Mojosongo

BAB V PENUTUP

Berdasarkan pembahasan secara keseluruhan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini dapat dihasilkan kesimpulan, temuan unggulan dan rekomendasi.

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan kajian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- Konsep isu gender yang dikemukakan dalam penelitian ini berusaha memperlihatkan bahwa wanita seharusnya memiliki kedudukan yang setara dengan pria dalam pembangunan, karena terbukti wanita pun mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan. Namun kesetaraan tersebut tidak perlu ditunjukkan dengan jenis peran yang dilakukan wanita harus sama dengan peran laki-laki, mengingat secara kodrati wanita berbeda dengan laki-laki. Kesetaraan yang dimaksud dalam hal ini adalah porsi dan posisi yang diberikan kepada wanita seimbang dengan laki-laki.

- Posisi organisasi sangat penting sebagai media bagi wanita untuk menyalurkan aspirasi dan potensi yang dimilikinya untuk kepentingan pembangunan, masyarakat pada umumnya, maupun untuk wanita itu sendiri.
- Organisasi wanita, dalam hal ini PKK sangat penting karena merupakan pendukung aktivitas masyarakat, terutama untuk urusan-urusan yang menyangkut pengelolaan keuangan, administrasi, maupun peningkatan kesejahteraan ibu dan anak
- Keberadaan organisasi bagi wanita dapat digunakan untuk memperjuangkan kesejahteraan bagi wanita, karena wanita itu sendiri lah yang harus memperjuangkan kepentingannya.
- Pengembangan potensi perempuan melalui wadah organisasi secara signifikan dapat meningkatkan *bargaining power* dalam diri perempuan. Penguatan organisasi tersebut dimungkinkan dapat memperbesar akses perempuan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya dan prasarana yang penting bagi kelangsungan hidup masyarakat. Dengan demikian, pentingnya keberadaan perempuan bukan hanya sebagai “penggembira” saja, melainkan mampu ikut menentukan keberhasilan pembangunan, lambat laun akan mendapatkan pengakuan dari masyarakat.

5.2 Temuan Unggulan

- Peningkatan peran wanita dalam pembangunan dengan pendekatan GAD berusaha menyeimbangkan dan mengoptimalkan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Selain itu, untuk memperkuat wanita melalui kemandirian yang lebih besar. Mengingat perlakuan-perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan dalam pembangunan, dipandang tidak saja sebagai masalah bagi wanita, tetapi juga bagi laki-laki karena laki-laki sendiri memiliki keterbatasan yang memerlukan peran wanita untuk dapat menyempurnakannya.
- Dengan relasi yang baik antara laki-laki dan wanita, maka mobilisasi sumber daya dan kemampuan dapat lebih optimal, karena perbedaan karakteristik antara laki-laki dan wanita dapat saling melengkapi kekurangan masing-masing.
- Pengelolaan prasarana lingkungan permukiman yang dijalankan para wanita di Kelurahan Mojosongo dikordinir oleh kelompok PKK yang secara struktural terbentuk pada tingkat kelurahan sebagai level tertinggi, PKK RW, dan PKK RT sebagai kelompok pada level yang paling rendah.
- Manajemen tersebut akan lebih efektif jika tidak hanya nilai-nilai feminitas yang berperan didalamnya, namun juga terdapat sifat maskulin yang turut terlibat didalamnya. Oleh karena itu, organisasi kewanitaan membutuhkan kerjasama dan komunikasi yang terbuka dengan pihak lainnya yang terkait, diantaranya dengan komponen masyarakat yang terdiri dari kaum pria dan juga pemerintah.

- Prinsip manajemen yang dijalankan oleh kelompok tersebut, meliputi :
 - ❖ *Planning*, berfungsi untuk merencanakan strategi-strategi dalam rangka mencapai tujuan. Strategi ini berfungsi untuk mengatur pembagian kerja berdasarkan kemampuan yang dimiliki, menentukan peran perempuan dalam masyarakat, meningkatkan kemampuan perempuan supaya akses terhadap sumber daya produksi dan prasarana, dan mengurangi kontrol masyarakat atau pihak luar terhadap organisasi tersebut.
 - ❖ *Organizing/Directing*, berfungsi mengatur struktur organisasi dan jaringan kerja yang dibentuk. Organizing dapat dilakukan dalam bentuk pengarahan berorganisasi yang sifatnya motivasi dan pendidikan yang terus menerus/berkelanjutan.
 - ❖ *Controlling*, yaitu pengawasan. Pengawasan ini dapat berupa *monitoring* yang dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan evaluasi yang dimaksudkan untuk membetulkan kesalahan yang telah dilakukan.
- Keberhasilan kaum wanita dalam menjalankan pengelolaan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang muncul dari dalam diri wanita itu sendiri salah satunya adalah semangat yang tinggi untuk menunjukkan eksistensinya di masyarakat dengan mengaktualisasikan dirinya melalui PKK. Sedangkan faktor eksternalnya adalah dukungan yang besar dari keluarga dan masyarakat.

Kultur masyarakat Jawa menempatkan wanita dalam posisi yang penting, baik dalam keluarga maupun di masyarakat. Oleh karena itu, kesempatan lebih terbuka bagi wanita untuk menjalankan aktivitas di luar rumah, baik di bidang sosial kemasyarakatan, ekonomi, maupun pembangunan.

- Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi kaum wanita dalam mengelola prasarana lingkungan telah mencapai level pelimpahan kekuasaan (*delegated power*). Artinya, kaum wanita telah mampu memberdayakan dirinya sendiri untuk turut berperan dalam pembangunan. Kaum wanita di kelurahan tersebut telah memiliki kesadaran bahwa terdapat potensi yang besar di dalam dirinya, yang akan disayangkan jika tidak diberdayakan.
- Hambatan yang dialami para wanita dalam menjalankan perannya mengelola prasarana lingkungan adalah kualitas sumber daya manusia dalam diri wanita itu sendiri yang masih relatif rendah. Hal itu menjadikan kemampuan mereka dalam berorganisasi kurang berkembang.
- Hambatan lainnya adalah masalah waktu bagi wanita untuk beraktivitas, dimana kebanyakan mereka lebih mengutamakan menyelesaikan urusan rumah tangga terlebih dahulu, sebelum beraktivitas di luar rumah.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat direkomendasikan beberapa hal, sebagai berikut :

1. Kenyataan telah membuktikan bahwa wanita mampu memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan kesempatan yang lebih besar bagi wanita untuk lebih berperan dalam kegiatan pengelolaan, melalui program-program pembangunan yang menitikberatkan pada wanita sebagai subjeknya.
2. Peningkatan kualitas sumber daya wanita dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan/kursus-kursus ketrampilan yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi saat ini, sehingga dapat langsung diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kursus computer, dan sebagainya.
3. Peningkatan kemampuan berorganisasi melalui forum-forum diskusi dan simulasi, sehingga diharapkan PKK dapat melakukan kaderisasi dengan lebih baik
4. Kebersamaan dalam budaya masyarakat setempat yang masih kental perlu dipertahankan, dengan mengefektifkan aktivitas-aktivitas sosial kemasyarakatan, sehingga masyarakat setempat lebih peduli terhadap pemeliharaan lingkungan tempat tinggalnya.

Dengan demikian diharapkan masyarakat mampu melanjutkan upaya pemeliharaan prasarana lingkungan pasca peremajaan, agar kondisi lingkungan tersebut lebih sehat dan nyaman untuk ditinggali.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Creswell, John W. 1998. *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Traditions*. America : Sage Publition
- Denzin, Noerman & Yvona S. Lincoln. 1994. *Handbook of Qualitative Research*. America : Sage Publition
- Freire, Paulo. 1985. *Pedagogy of The Oppressed*.
- Handayani, Christina S. dan Ardhian Novianto. 2004. *Kuasa Wanita Jawa*. Yogyakarta : LKiS
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti. 2002. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. UMM Press. Malang
- Kodoatie, Robert J. 2003. *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Komarudin. 1997. *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman*. Jakarta : Yayasan Realestat Indonesia – PT Rakasindo
- Mikkelsen, Britha. 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mosse, Julia C. 1996. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

- Murniati, A. Nunuk Prasetyo. 2004. *Getar Gender*. Magelang. Indonesiatera.
- Nasir, Moh. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nasution. 1988. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Tarsito
- Nasution. 2002. *Metode Research*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Panudju, Bambang. 1999. *Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Bandung : Alumni
- Reinharz, Schulamit. 1992. *Feminist Methods in Social Research*. Oxford University Press. New York.
- Salusu. 1998. *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta : Gramedia.
- Saptari R. 1997. *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Grafiti.
- Singarimbun, Masri, Effendi, Sofyan. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: PT. Pustaka LP3S Indonesia.
- Soemarwoto, Otto. 1997. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta : Djambatan.
- Sugiarto, et al. 2001. *Teknik Sampling*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Subagio, P. Joko. 1991. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sumiarni, Endang. 2004. *Jender dan Feminisme*. Yogyakarta : Wonderful Publishing Company
- Staggenborg, Suzanne. 2003. *Gender, Keluarga, & Gerakan-gerakan Sosial*. Jakarta : Mediator
- Umar, N. 1999. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*. Paramadina. Jakarta.

MAKALAH, SEMINAR/LOKAKARYA

Badriah. 2000, *Seminar Wanita Tangse dalam Sosial Ekonomi Rumah Tangga* : Suatu Kajian di Desa Seukeuk, Banda Aceh, Ringkasan Hasil Penelitian STIES.

LAPORAN PROYEK

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah. 1996. SSUDP: *Usulan Teknik Housing and Urban Renewal for Surakarta.*

Departememn Kimpraswil. 2001. SSUDP: *Consulting Services for Benefit Monitoring and Evaluation and Implementation Completion Report.*

Wastuwidaywan, PT. 2001. *Bantuan Teknis Kawasan Perkotaan Kota Surakarta.* Jakarta: Departemen Kimpraswil Dirjend Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan Bagian Proyek Pengendalian Pelaksanaan Revitalisasi Kawasan.

Wastuwidyawan, PT. 1995/1996. Laporan Bulanan (Juni 1996-Desember 1996). Proyek Pendamping Technical Assistance SSUDP Bidang Cipta Karya (PPMU) Tahun Anggaran 1995/1996.